



SOSIOLOGI PEDESAAN

Amruddin, Roosganda Elizabeth, Faidah Azuz,
Talitha Wenifrida Massenga, Herlyna Novasari Siahaan,
Lili Winarti, Abdi Suprayitno, Marhawati, Sari Anggarawati

ISBN 978-623-198-655-9



9 786231 986559

SOSIOLOGI PEDESAAN

**Amruddin
Roosganda Elizabeth
Faidah Azuz
Talitha Wenifrida Massenga
Herlyna Novasari Siahaan
Lili Winarti
Abdi Suprayitno
Marhawati
Sari Anggarawati**



GETPRESS INDONESIA

SOSIOLOGI PEDESAAN

Penulis :

Amruddin
Roosganda Elizabeth
Faidah Azuz
Talitha Wenifrida Massenga
Herlyna Novasari Siahaan
Lili Winarti
Abdi Suprayitno
Marhawati
Sari Anggarawati

ISBN : 978-623-198-655-9

Editor : Yuliatr Novita, M.Hum.

Penyunting: Mila Sari, M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit : GETPRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 2 September 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Sosiologi Pedesaan dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini berisikan tentang ruang lingkup sosiologi pedesaan, karakteristik dan kebudayaan desa, perubahan dan mobilitas sosial, konsep kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan, konsep pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat modernisasi, modal sosial, dan masalah sosial.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, 2 September 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PEDESAAN	1
1.1 Pengertian.....	1
1.2 Sejarah dan Tokoh Sosiologi.....	4
1.3 Perkembangan Sosiologi Pedesaan	6
1.4 Perkembangan Sosiologi Pedesaan di Indonesia	8
DAFTAR PUSTAKA.....	12
BAB 2 KARAKTERISTIK DAN KEBUDAYAAN DESA.....	13
2.1 Karakteristik Desa.....	13
2.2 Kebudayaan Desa.....	16
2.3 Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa	17
2.4 Kesimpulan.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23
BAB 3 PERUBAHAN DAN MOBILITAS SOSIAL	25
3.1 Pendahuluan	25
3.2 Perubahan Sosial; Telaah Teori dan Kajian	27
3.3 Mobilitas Sosial: Telaah Teori dan Kajian.....	33
3.4 Penutup	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
BAB 4 KONSEP KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN	39
4.1 Pendahuluan	39
4.2 Kekuasaan.....	41
4.2.1 Unsur-unsur dan Saluran-saluran Kekuasaan.....	44
4.2.2 Bentuk-bentuk Pelapisan Kekuasaan	45
4.2.3 Cara mempertahankan Kekuasaan.....	47
4.3 Wewenang	48
4.4 Kepemimpinan.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	58
BAB 5 KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.....	59
5.1 Pendahuluan	59
5.2 Tujuan Pemberdayaan	62
5.3 Prinsip Pemberdayaan	63
5.4 Contoh Program Pemberdayaan Masyarakat	65
DAFTAR PUSTAKA.....	69
BAB 6 PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	71
6.1 Pendahuluan	71
6.2 Definisi, Fungsi dan Karakteristik Pendidikan Non Formal	72

6.3 Tantangan dan Peluang dalam mengembangkan pendidikan Non Formal.....	76
6.4 Konsep Pemberdayaan dalam Pendidikan Non Formal.....	77
6.5 Program dan Aktivitas Pendidikan Non Formal dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	79
6.6 Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pendidikan Non Formal.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
BAB 7 MASYARAKAT MODERNISASI	85
7.1 Pendahuluan	85
7.2 Perubahan Sosial dalam Masyarakat Modernisasi	86
7.3 Tantangan dalam Masyarakat Modernisasi	88
7.4 Peran Pendidikan dalam Masyarakat Modernisasi	90
7.5 Masyarakat Inklusif Dalam Era Digital.....	92
7.6 Etika dan Nilai dalam Masyarakat Modernisasi.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	96
BAB 8 MODAL SOSIAL	99
8.1 Pendahuluan	99
8.2 Definisi Modal Sosial	103
8.3 Unsur dan Komponen Modal Sosial.....	105
8.3.1 Kepercayaan (<i>Trust</i>).....	105
8.3.3 Jaringan Sosial (<i>Networks</i>)	110
8.4 Tipe – Tipe Modal Sosial	111
8.4.1 Modal Sosial Terikat (<i>Bonding Social Capital</i>)	111
8.4.2 Modal Sosial Menjembatani (<i>Bridging Social Capital</i>)	113
8.4.3. Modal Sosial Jaringan (<i>Linking Sosial Capital</i>).....	116
8.5 Peran Modal Sosial dalam Masyarakat Desa	118
DAFTAR PUSTAKA.....	122
BAB 9 MASALAH SOSIAL	125
9.1 Pendahuluan	125
9.2 Masalah Sosial Menurut Para Ahli.....	126
9.3 Faktor-Faktor Penyebab Masalah Sosial	127
9.3.1 Faktor Ekonomi.....	127
9.3.2 Faktor Pendidikan.....	128
9.3.3 Faktor Budaya	129
9.3.4 Faktor Biologis.....	129
9.3.5 Faktor Psikologis	131
9.3.6 Faktor Lingkungan	131
9.3.7 Faktor Konflik dan Kekerasan	131
9.3.8 Faktor Demografi.....	133
9.3.9 Faktor Teknologi.....	133
9.4 Masalah Sosial di Sektor Pertanian.....	134
9.4.1 Ketimpangan Ekonomi.....	134

9.4.2 Ketenagakerjaan	135
9.4.3 Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah	136
9.4.4 Akses terhadap Sumberdaya	136
9.4.5 Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan.....	137
9.4.6 Konflik Lahan.....	138
9.4.7 Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan	139
9.4.8 Keberlanjutan Lingkungan	140
9.5 Dampak Masalah Sosial.....	141
9.5.1 Dampak Positif.....	141
9.5.2 Dampak Negatif	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Auguste Comte, Bapak Sosiologi.....	6
Gambar 1.2. Sajogjo tokoh Sosiologi Pedesaan Indonesia	10
Gambar 2.1. Wilayah di Indonesia, 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.024 Kecamatan, 74.954 Desa.....	14

BAB 1

RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PEDESAAN

Oleh Amruddin

1.1 Pengertian

Sosiologi berasal dari bahasa latin yang dari dua kata; *Socius* dan *Logos*. Secara harfiah atau etimologis kata *socius* berarti teman, kawan, sahabat, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang berteman, berkawan, bersahabat atau suatu ilmu yang membicarakan atau mempelajari tentang masyarakat, atau ilmu pengetahuan tentang hidup bermasyarakat.

Sosiologi telah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena sosiologi memiliki ciri-ciri utama, sebagai berikut :

1. Sosiologi bersifat empiris berarti ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada pengamatan atau observasi terhadap kenyataan.
2. Sosiologi bersifat teoritis berarti sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori.
3. Sosiologi bersifat kumulatif artinya bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.

4. Sosiologi bersifat non etis artinya ilmu pengetahuan ini tidak mempersoalkan baik buruknya fakta tertentu tetapi tujuannya untuk menjelaskan fakta yang ada secara analitis.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri sosiologi adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi termasuk kelompok ilmu sosial. Maksudnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa atau gejala sosial.
2. Sosiologi bersifat kategoris (deskriptif), tidak normatif, artinya bahwa sosiologi membicarakan objeknya secara apa adanya.
3. Sosiologi termasuk ilmu murni (*pure science*), bahwa sosiologi bukan ilmu praktis, artinya tujuan penelitian ilmu sosiologi semata-mata demi perkembangan ilmu itu sendiri, bukan untuk kepentingan kehidupan praktis.
4. Sosiologi bersifat generalis (nometetis), sosiologi meneliti prinsip-prinsip umum saling hubungan manusia, bukan ideografis, yakni meneliti secara khusus peristiwa demi peristiwa.
5. Sosiologi bersifat abstrak, hampir sama dengan generalis, perbedaan terletak pada penekanannya, yaitu pada wujud kesatuan yang bersifat umum atau terpisah-pisah.
6. Sosiologi bersifat tradisional sekaligus empiris, artinya menyandarkan pada pemikiran logika sekaligus berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada dalam masyarakat.
7. Sosiologi merupakan ilmu yang umum (general), artinya sosiologi mempelajari gejala umum yang ada pada setiap interaksi manusia, bukan mempelajari ilmu dengan gejala khusus.

Sebagai halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat agak sukar untuk memberikan suatu batasan

tentang masyarakat oleh karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup pelbagai faktor sehingga walaupun diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. Beberapa orang sarjana mencoba untuk memberikan definisi masyarakat (*society*) diantaranya;

Mac Iver dan Charles C. Page yang mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial.

Ralp Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Menurut Sugihen (1997), jika memahami sosiologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, maka sosiologi pedesaan itu dipahami sebagai penerapan teori-teori (umum) sosiologi itu dalam mempelajari masyarakat dan sosiologi pedesaan itu adalah sosiologi dari kehidupan pedesaan (Smith dan Zopf dalam Sugihen). maksudnya ialah bahwa sosiologi pedesaan itu suatu pengetahuan yang sistematis sebagai hasil penerapan metode ilmiah di dalam upaya mempelajari masyarakat pedesaan, struktur dan organisasi sosialnya yang ada, sistem dasar masyarakat dan proses sosial yang terjadi.

Rahardjo (2014) memberi penjelasan tentang perbedaan maupun persamaan antara sosiologi pedesaan dengan sosiologi pertanian. Pertama, sosiologi pedesaan lahir dan mengalami perkembangannya yang mantap sebagai suatu disiplin ilmu di AS sedangkan sosiologi pertanian lahir dan berkembang di Eropa

(khususnya Jerman). Kedua, sosiologi pedesaan lahir terlebih dahulu daripada sosiologi pertanian, oleh karena itu sosiologi pedesaan lebih mantap sebagai suatu disiplin ilmu. Ketiga, sosiologi pertanian lahir dan perkembangan sebagai respons terhadap perkembangan yang terjadi di Barat-Utara saat ini, khususnya dengan semakin menipisnya perbedaan antara desa dan kota.

1.2 Sejarah dan Tokoh Sosiologi

Sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte (1789-1857) seorang filsuf Prancis ketika menerbitkan buku keduanya berjudul *Course de Philosophie Positive*. Walaupun demikian dalam buku *Social Theory: A Guide to Central Thinkers* yang di bahasa Indonesiakan menjadi Teori-teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka yang ditulis oleh Peter Beilharz (2002), tidak ditemukan nama Auguste Comte.

Meskipun Comte memperkenalkan istilah sosiologi, akan tetapi Herbert Spencer (1820-1903) yang mempopulerkan istilah tersebut melalui bukunya *Principles of Sociology* (1898). Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat dengan menerapkan teori evolusi organik. Setelah buku tersebut terbit, sosiologi kemudian berkembang pesat ke seluruh dunia.

Karl Marx (1818-1883) salah satu karya populernya adalah *Das Capital* (1867), Marx memberikan sumbangan bagi sosiologi dengan pandangannya bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurut Marx perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, yakni; kelas borjuis (kelompok yang menguasai alat-alat produksi) dan kelas proletar (kelompok rakyat jelata yang tidak memiliki alat-alat produksi).

Emile Durkheim (1858-1917) juga merupakan tokoh pelopor perkembangan sosiologi. Bukunya yang berjudul *The Division of Labor in Society* (1896) merupakan suatu upaya untuk mengkaji suatu gejala yang sedang melanda masyarakat yaitu tentang pembagian kerja. Menurut Durkheim, pembagian kerja berfungsi untuk meningkatkan solidaritas.

Tokoh terakhir yang dapat disebut tokoh sosiologi klasik adalah Max Weber (1864-1920). Salah satu buku Weber yang terkenal adalah *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1904). Dalam buku tersebut Weber mengemukakan tesisnya mengenai keterkaitan antara etika protestan dengan munculnya kapitalisme di Eropa Barat.

Jauh sebelumnya, seorang sarjana Arab yang lahir di Tunis, Ibnu Khaldun (1333-1406) menjadi pemikir besar dunia melalui bukunya “Muqaddimah” yang monumental mengenai sejarah umat manusia. Muqaddimah, mengemukakan pengaruh lingkungan fisik terhadap manusia, bentuk organisasi sosial primitif, dan modern, hubungan antar kelompok dan berbagai fenomena kultural.

Di tanah air, tokoh terkemuka dalam sosiologi adalah Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, banyak ahli dikemudian hari mengutip pendapatnya tentang ilmu apa itu sosiologi, keduanya menyimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.



Gambar 1.1. Auguste Comte, Bapak Sosiologi

1.3 Perkembangan Sosiologi Pedesaan

Terdapat dua versi sosiologi pedesaan, yang lama (klasik) dan yang baru (*modern*). Yang baru merupakan tuntutan perkembangan dari sosiologi pedesaan di negara-negara kapitalis industri modern. Karena dinegara-negara itu telah terjadi perubahan dan perkembangan drastis (khususnya yang terjadi di pedesaan, sehingga dirasakan semakin kurang tepatnya sosiologi pedesaan lama sebagai kersangka pemahaman terhadap masyarakat pedesaan yang telah berkembang. Perubahan yang sangat mendasar adalah semakin menipisnya perbedaan antara desa dan kota dalam berbagai aspeknya.

Menurut Jhon M Gillette (1922), sosiologi pedesaan adalah cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari komunitas-komunitas pedesaan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi serta kecenderungan-kecenderungannya dan merumuskan prinsip-prinsip kemajuan.

Menurut N.L. Sim, sosiologi pedesaan adalah studi tentang asosiasi antara orang-orang yang hidupnya banyak tergantung pada pertanian.

Menurut T.Lynn dan Paul E. Zopf, sosiologi pedesaan adalah kumpulan pengetahuan yang telah disistematisasi yang dihasilkan lewat penerapan metode ilmiah ke dalam studi tentang masyarakat pedesaan; organisasi dan strukturnya, proses-prosesnya, sistem sosial yang pokok dan perubahan-perubahannya.

Semua definisi tersebut di atas adalah definisi sosiologi pedesaan lama, (klasik) yakni menggambarkan keadaan Barat secara umum memperlihatkan perbedaan yang jelas dan bahkan dikotomis antar kawasan desa dan kota

Pada era globalisasi perbedaan antara kota dan desa semakin kabur terutama disebabkan teknologi transportasi dan komunikasi maka sosiologi pedesaan mempunyai pemahaman yang berbeda dari pemahaman yang lama. Menurut Karl Kautsky dalam karyanya mencari perubahan-perubahan yang dialami pertanian di bawah dominasi produksi kapitalis. Menurut Raharjo, (2014) bahwa sosiologi pedesaan yang baru hedaknya merupakan studi tentang bagaimana masyarakat desa (bukan hanya desa pertanian) menyesuaikan diri terhadap masuknya kapitalisme modern ditengah kehidupan mereka.

Sebagai salah satu spesialisasi dalam sosiologi maka pemahaman terhadap latar belakang teoritik Sosiologi Pedesaan tidak meninggalkan disiplin iduknya yakni sosiologi. Dan sampai dengan menemukan jati dirinya, sosiologi masih dipengaruhi oleh ilmu alam yang kemudian dikenal dengan pandangan positivistik.

Sebenarnya akar teoritis sosiologi dapat ditelusuri sejak abad pertengahan melalui pemikiran-pemikiran filsafat kemasyarakatan seperti Plato, Aristoteles, Hobbes dan lain lain, memahami masyarakat identik dengan organisme biologis atau hukan alam fisika lainnya. Karena itu tidak mengherankan kalau di dalam ilmu sosiologi muncul teori evolusi sosial yang tidak lain diadopsi dari teori evolusi biologis dalam ilmu pengetahuan alam.

Ilmu pengetahuan alam juga populer dengan teori evolusi Darwin, maka dalam sosiologi dikenal dengan Darwinisme sosial yang ditempatkan pada figur seorang Herbert Spencer. Perspektif evolusioner yang dibangun Spencer melalui rekayasa Darwinisme sosial itu kemudian berkembang pesat dalam kerangka pemikiran teoritik ilmu sosial termasuk pemikiran Auguste Comte dengan teori *The Law of Three Stages*, atau Herbert Spencer dengan teori *Survival of the fittest*. Keduanya sama sama menggambarkan atau menjelaskan perubahan masyarakat sebagai sebuah suatu perkembangan yang bertahap dan bersifat evolusioner.

1.4 Perkembangan Sosiologi Pedesaan di Indonesia

Menurut Zainuddin (2009), perkembangan sosiologi pedesaan di Indonesia memang mempunyai warna tersendiri. Karena urangnya orang yang ahli di bidang sosiologi maka tidak heran kalau kemudian perkembangannya hanya merujuk pada beberapa orang sebagai referensi. Di Indonesia perkembangan sosiologi pedesaan (awalnya sosiologi pertanian) tidak dapat dipisahkan dengan nama besar Prof. DR. Sajogyo. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan sosiologi pedesaan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dimulai di Universitas Indonesia kemudian berlanjut ke Intitut Pertanian Bogor (ITB).

Dalam usahanya memperkenalkan sosiologi pedesaan, Sajogyo banyak merujuk pada pemikiran beberapa tokoh yang mempunyai dasar ilmu yang berbeda seperti DH. Penny yang banyak menulis tentang masalah pertanian di Sumatra Utara, AT.Mosher yang ahli di bidang ekonomi pertanian dan lama mengajar di India, yang kemudian mengantarkannya pada satu kepercayaan bahwa ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk menjelaskan perilaku orang dan masyarakat dengan cara menghadapi teori pada praktik dan kenyataan. Selain kedua

tokoh tersebut di atas, rujukan lainnya adalah Timmer (1947) yang menjadi perintis pemakaian istilah “agronomi sosial” kemudian Gouldner seorang sosiolog yang membedakan antara *clinical sociology* dan *engineering sociology*.

Perkembangan Sosiologi Pedesaan di Indonesia penting menyimak apa yang terjadi di Kampus IPB Bogor. Kajian Sosiologi pedesaan di IPB dimulai pada tahun 1959 pada tingkat pertama mahasiswa diberikan dua mata kuliah dari gugus sosial ekonomi (wajib) yaitu ekonomi pertanian dan sosiologi pertanian, perkembangan selanjutnya terjadi difrensiasi dimana kuliah sosiologi pedesaan terbatas di fakultas pertanian (Zainuddin, 2009).

Perkembangan berikutnya pada tahun 1975 ketika dibuka Pasca Sarjana studi sosiologi pedesaan sebagai salah satu program tersendiri. Pada tahap awal hanya ada 3 orang dosen senior itupun dari luar (UI) yakni Prof. Selo Soemardjan, S. Tjondronegoro, dan Fujiwati Sajogyo.

Perkembangan sosiologi pedesaan IPB tidak luput dari kritik, salah satunya datang dari White (2003) yang secara umum mengkritik keberadaan ilmu-ilmu sosial di Indonesia, bahwa semua ilmu sosial di Indonesia mengalami ketertinggalan. Ketertinggalan itu selain disebabkan karena warisan kolonial juga karena tekanan politik Orde Baru. Lebih spesifik White menyoroti sosiologi pedesaan IPB yang dinilai kurang mendalami transformasi agraria, kurang terisi *critical discourse* dan banyak bersifat apologi yang membenarkan kondisi masyarakat menurut kebijakan politik orde baru.

Atas kritikan itu sosiologi pedesaan IPB memfokuskan kajian pada 3 gugus bidang kajian (Zainuddin, 2009) :

1. Transisi agraria yang mengarah kepada pemerataan peluang usaha, peluang kerja, pemerataan penghasilan
2. Upaya mengubah tujuan dan cara-cara mengelola masyarakat

3. Perkembangan penduduk dan kehidupan sosial yang peka lingkungan dalam pola pedesaan ke perkotaan bagaimana memencapai keberlanjutan sosial dalam hubungan antar keduanya.



Gambar 1.2. Sajogjo tokoh Sosiologi Pedesaan Indonesia

Prof. Sajogjo hadir memberikan kuliah umum (1997) di Universitas Negari Makassar (UNM) dahulu IKIP Ujungpandang, yang diundang oleh “murid kesayangannya” Prof. Idrus Abustam bertindak sebagai direktur pascasarjana pertama UNM.

Sosiologi pedesaan khususnya di IPB Bogor merupakan salah satu disiplin (ilmu Pengetahuan) yang berdiri sendiri. Sebagai ilmu pengetahuan posisi Program studi Sosiologi pedesaan tidak terbatas pada pengajaran ilmu pengetahuan secara teoritis tetapi juga melakukan aksi sosial yang ditunjukkan dengan adanya pendampingan dan kerjasama dengan beberapa organisasi baik skala nasional maupun internasional dalam membuat perencanaan pembangunan sebagai wujud tanggung jawab ilmiah (akademis).

Untuk menjelaskan posisi akademisnya, program sosiologi pedesaan mempunyai tujuan:

1. Sebagai penganalisis masyarakat pedesaan yang mampu melukiskan dan menjelaskan dari segi mikro dan makro

parameter sosial-ekonomi-budaya dan politik yang melingkupi masalah pembangunan manusia dan masyarakat pedesaan.

2. Dalam memonitor dan memahami proses akibat dampak perubahan sosial yang menyertai pembangunan.
3. Dan diupayakan melakukan *engineering* sosiologi.

Ketiga tujuan tersebut menempatkan sosiologi pedesaan di IPB sesungguhnya telah melakukan suatu perubahan ideologi dan restrukturisasi aksi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Tetapi meskipun demikian sosiologi pedesaan tidak pernah menyimpang dari ranah ilmu pengetahuan namun harus diakui tidak bebas nilai seperti penganut positivisme.

Pengertian atau pemahaman tentang konsep desa dan perdesaan itu kelihatannya amat berbeda dari satu kawasan ke kawasan yang lain, berbeda dari suatu negara ke negara yang lain. Dengan demikian mungkin sekali juga menurut Sugihen (1997), konsep sosiologi pedesaan itu berbeda dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, oleh karena itu perlu memahami benar terlebih dahulu konsep atau pengertian pedesaan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo. (2014). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian (edisi keempat). Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Ritzer, G. (2013). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta : Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S (1995). Sosiologi : Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press.
- Sugigen, B.T. (1997). Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar). Jakarta : PT.RajaGrafinfo Persada.
- Zainuddin, S. (2009). Sosiologi Pedesaan Sebagai Ilmu Pengetahuann. Jurnal Academica. Volume 1, ISSN.1411-3341.

BAB 2

KARAKTERISTIK DAN KEBUDAYAAN DESA

Oleh Roosganda Elizabeth

2.1 Karakteristik Desa

Pengertian desa umumnya sering dikaitkan dengan pertanian, dan desa kerap didefinisikan sebagai “Pemukiman para petani”. Meski kenyataannya, desa tidak selalu identik sebagai wilayah pertanian. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa maupun wilayah pedesaan, umumnya merupakan suatu bagian wilayah suatu negara yang meskipun merupakan pemasok dan penyedia pangan nasional, terutama wilayah perkotaan, namun menjadi menyumbang ketimpangan dan kesenjangan pembangunan di lintas sektor dikarenakan relatif sering terabaikan dalam pembangunan baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik dan. Ciri utama yang melekat pada desa adalah sebagai tempat menetap dan bermukimnya suatu kelompok masyarakat dalam skala kecil dan diliputi berbagai keterbatasan (Egon E. Bergel; dalam: Elizabeth. 2016; dan Mutmainnah, 2017: 38).



Gambar 2.1. Wilayah di Indonesia, 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.024 Kecamatan, 74.954 Desa (Sumber Kemendes PDTT, 2019)

Karakteristik desa mencerminkan aspek: sosial, ekonomi dan budaya. Karakteristik Desa, dan tingkat perkembangannya melalui beberapa aspek, diantaranya yaitu: (1) dari aspek wilayah, letak antar daerahnya yang berjauhan dan luas; (2) dari aspek potensi sumberdaya alam, merupakan sumber kekayaan yang sangat kaya, luas dan beragam, namun belum mampu menjadikan penduduknya berada dalam konteks kehidupan layak dan kesejahteraan; (3) dari aspek penduduk, merupakan suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah, karena penduduk yang relatif jarang; (4) dari aspek ekonomi, penduduk desa mayoritas bermata pencaharian di bidang dan ataupun bersifat agraris yang cenderung relatif homogen; (5) dari aspek infrastruktur, pengetahuan dan teknologi, fasilitas sarana dan prasarana di desa sangat kurang dan terbatas, sehingga terkesan bersifat tertutup serta tingkat pendidikan dan teknologi yang relatif masih rendah; (6) dari aspek adat istiadat, sosial dan budaya, meski dengan penduduk yang relatif jarang namun hubungan antar penduduk sangat erat dan memegang teguh adat. Umumnya desa didiami oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen dengan nilai-nilai kebersamaan dan kekerabatan yang merupakan ciri khas dalam kehidupan

sosialnya. Dengan kata lain, penduduk desa mampu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya secara mudah dan kebersahajaan mereka menjadi perisai perekat dan keharmonisan dalam kehidupannya; (7) dari aspek ketenagakerjaan dan ketersediaannya, sumber daya manusia (SDM) dan kompetensinya di pedesaan relative sangat ketinggalan dibanding di perkotaan, yang tidak terlepas dari faktor kebijakan pembangunan pemerintah yang lebih menitik beratkan pada sektor di luar pedesaan; (8) dari aspek tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, dan jenjang/tingkat Pendidikan, yang ada di perdesaan masih sangat minim. Ketersediaan tenaga pendidik, misalnya yang memiliki jenjang akademik strata satu ke atas, penempatannya lebih banyak di perkotaan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab pencapaian akademik dan tingkat keilmuan siswa didik di desa tidak tercapai sebagai mana halnya di perkotaan. Jenjang pendidikan masyarakat di desa relatif rendah umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA, bahkan tidak bersekolah sehingga terasa ketertinggalannya dari di perkotaan, ditambah akses pendidikan yang jauh letaknya sedikitnya di kota kecamatan. Terlebih kaum wanitanya yang dinikahkan sebelum waktunya masih lazim dan kerap ditemukan.

Berbagai aspek tersebut merupakan factor penyumbang rendahnya kuantitas dan kualitas SDM siap pakai di pedesaan. Impaknya menjadi puncak akar permasalahan ketidak berdayaan sektor desa, ketidakmampuan yang mempengaruhi kemandirian, budaya kerja, inovatif, dan tidak mampu untuk menguasai SDA wilayah dan disekitar pemukiman mereka, juga kurang memiliki wawasan dan pemikiran-pemikiran menjadikan kurangnya inisiatif mereka dalam menghadapi permasalahan usahatani, perekonomian dan keseharian kehidupan di perdesaan. Tanpa adanya pengalaman dan kurangnya pengetahuan SDM yang luas tentang usaha lainnya selain usahatani dan kegiatan ekonomi sekedar untuk hidup yang mereka geluti, setidaknya

melatarbelakangi penyebab penduduk desa sulit keluar dari garis kemiskinan yang melingkupi kehidupannya.

Selain faktor internal masalah kekurangan SDM dipedesaan tersebut, juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti halnya infrastruktur, sarana prasarana umum, misalnya transportasi, yang menyebabkan kendala keterbatasan mengakses kegiatan dan usaha di luar wilayah pedesaannya, sehingga kegiatan ekonomi yang mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keseharian saja.

2.2 Kebudayaan Desa

Budaya desa merupakan ciri yang melekat di diri masyarakat pedesaan dalam aspek sosial dan kehidupan antar satu desa dan lainnya dengan keberagaman adat istiadat, pola berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama warga masyarakatnya yang memiliki karakter menjadi perbedaan khas tersendiri dengan kehidupan masyarakat perkotaan; diantaranya keakraban sesama warga, gaya hidup, nilai-nilai kebersamaan, bersahaja, saling mengenal, memiliki pertalian persamaan perasaan terhadap kesukuan, maupun kebiasaan. Bertani, sebagai kegiatan keseharian sumber ekonomi disamping pekerjaan lainnya yang bersifat sambilan. Dalam kehomogenan mata pencaharian pertanian umumnya menganut pola pertanian tradisional yang masih menjunjung tinggi nilai kearifan local saling membantu, gotong-royong, tolong menolong, kesertiakawanan sosial, kekompakan, persamaan pengalaman, pola dan budaya kerja.

Nilai-nilai kebersamaan sesama warga untuk tolong menolong dan bergotong-royong termasuk pada acara pesta, sunat rasul, kemalangan, kematian dan berbagai kegiatan sosial lainnya, yang telah mengakar dalam aspek kehidupan masyarakat desa merupakan warisan dari generasi lampau yang seiring dengan perjalanan waktu sudah mulai memudar dengan

kemunculan industri-industri pertanian dan pesatnya perkembangan teknologi yang semuanya didasarkan pada hitungan ekonomi.

Seiring perkembangan zaman, budaya pertanian tradisional terpinggirkan dengan pesatnya perkembangan teknologi dicerminkan meningkatnya kebutuhan alsinta (alat mesin pertanian) yang membutuhkan SDM (sumber daya manusia) yang memadai. Disinilah peran penting dan sangat dibutuhkannya partisipasi para petugas penyuluh lapang. Penyuluh pertanian dalam memberdayakan masyarakat dengan beberapa edukasi seperti: (i) edukasi pengaplikasian teknologi baik dalam budidaya, panen, pascapanen; (ii) edukasi mengendalikan HPT dengan pengaplikasian obat-obatan secara lima tepat (waktu, jenis, dosis, cara, jumlah) dalam usahatani; sdalamerta (iii) edukasi penjualan/pemasaran secara digital (e-commerce), penggunaan teknologi yang modern untuk memasarkan hasil pertanian seperti media social yang dapat membantu masyarakat (Elizabeth. 2019-2023). Digitalisasi merupakan teknologi yang sangat bermanfaat mengatasi kesulitan dan keterbatasan akses pemasaran untuk jual beli hasil panen.

2.3 Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa

Seiring pesatnya kemajuan teknologi dan keberhasilan industri masuk desa, tentunya mempengaruhi budaya kerja masyarakat desa dan mengalami perubahan, serta pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam membangun sektor pedesaan. Memberdayakan masyarakat desa merupakan upaya penting membuat mereka yang umumnya merupakan petani menjadi lebih pintar untuk lebih mandiri.

Untuk mengkaji pemberdayaan dan pembangunan Masyarakat desa 1. Aspek sosial; Desa umumnya dideskripsikan sebagai suatu wilayah dengan sarana dan prasarana terbatas, seperti tempat bersekolah terbatas sehingga tingkat pendidikan yang rendah, fasilitas kesehatan kurang memadai, sehingga tingkat kesehatan di banyak desa juga sangat rendah karena puskesmas dan praktek dokter yang sangat sedikit. Kondisi ini dengan mudah menunjukkan bahwa (Elizabeth. 2021); 2. Aspek ekonomi; infrastruktur (sarana-prasarana) ekonomi terbatas, susah mengakses suatu lokasi ekonomi, misalnya jauh dari pasar dan alat transportasi terbatas, yang kesempatan kerja sangat minim/terbatas, mayoritas di sektor pertanian, ketidak merataan ketersediaan SDA (sumber daya alam), yang terbatas/tidak ada SDA akan menjadikan masyarakatnya serba kekurangan terutama ekonomi (miskin); dan 3. Aspek budaya. Pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga dasar berbasis budaya, yaitu: (i) Memberikan kebutuhan dasar yang sama (pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi) kepada para pelaku ekonomi; (ii) Memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mendapat pekerjaan, baik swasta, pemerintah, pertanian dan industry; (iii) Menjadikan nilai-nilai lokal sebagai dasar dalam strategi pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya dalam memenuhi keinginan secara luas sehingga memiliki kemampuan melakukan pilihan dalam lingkungannya dan dapat memenuhi semua keinginannya yang terkait dengan perekonomian dan kehidupan kedepannya (Luis & Moncayo, n.d.). Pasal 1 ayat 12 dinyatakan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Desa berkewajiban

mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 67 ayat 2). Pasal 68 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Memberdayakan masyarakat desa meliputi berbagai aspek, diantaranya: (i) memperkuat potensi masyarakat desa untuk lebih berdaya, berpendidikan dan mandiri; (ii) menciptakan suasana kondusif yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang melalui potensi dan sumberdaya yang dimiliki supaya lebih mandiri kedepannya; (iii) melindungi, keberpihakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa, berdasarkan tujuan bahwasanya pemberdayaan masyarakat desa adalah memberikan kemandirian kepada masyarakatnya; (iv) usaha yang dilakukan dengan meningkatkan taraf pendidikan, sumber ekonomi serta pembangunan sarana-prasarana seperti sumber energi, sekolah dan lain sebagainya.

Selain potensi masyarakat desa, beberapa elemen terkait yaitu peranan pemerintah haruslah menyesuaikan dengan misi pemberdayaan, mampu membangun partisipasi masyarakat, mampu berdialog dengan masyarakat, menciptakan instrumen regulasi mekanisme pasar yang berpihak. Memberdayakan masyarakat desa merupakan (i) upaya merubah dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa supaya terlepas dari kemiskinan; (ii) Membuat masyarakat desa berdaya dan mempunyai suatu potensi dan keterampilan sendiri untuk dapat bertahan hidup di era globalisasi dan revolusi teknologi sekarang ini; (iii) memberdayakan masyarakat tani di perdesaan dilakukan supaya dapat menghasilkan panen yang lebih baik, meningkatkan penghasilan, menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam aktivitas pertaniannya; (iv) memberdayakan masyarakat desa dan keluarganya beserta dengan kegiatan pendidikan luar sekolah supaya mampu menolong dirinya sendiri baik dibidang social, ekonomi, politik sehingga pendapatan dan kesejahteraan

mereka akan dapat tercapai. Dengan semakin ketatnya persaingan usaha dan semakin sulit dan pesatnya laju roda kehidupan, maka masyarakat desa harus mampu meraih peluang dengan memiliki kompetensi (kemampuan) dan keterampilan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Pemberdayaan masyarakat tani di perdesaan adalah supaya mampu melakukan kegiatan budidaya dan perkeekonomian sehari-hari untuk memenuhi kecukupan kebutuhan hidup.

Untuk membangun dan mengembangkan masyarakat desa beserta pertaniannya untuk bisa menjadi pertanian berteknologi, dengan 1) membangun dan mengembangkan budaya tradisional, pandangan hidup serta sosial ekonomi masyarakat desa; 2) dengan tetap mempertimbangkan dan tidak mengenyampingkan budaya dan kearifan local; diantaranya adalah: (i) dengan mengupayakan teknologi pertanian yang dapat dipahami dan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha tani agar berkembang; (ii) para petugas lapang berperan sebagai Pendidik, untuk meningkatkan pengetahuan dan memberi informasi kepada petani; (iii) memberi Pelajaran dan gambaran contoh untuk pemacu semangat mengelola usaha taninya dan untuk pemicu yang secara efektif dan efisien menumbuhkembangkan sikap keterbukaan dan bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan para petani; (iv) memberdayakan dan membangun Masyarakat desa diharapkan tercapai dengan peran penting pendidikan, pelatihan dan petugas lapang sebagai komunikator menyampaikan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan di luar sekolah supaya terjadi perubahan perilaku dan kepribadian masyarakat desa sebagaimana yang diharapkan (Elizabeth. 2023).

Sistem ekonomi yang pada awalnya yang bergantung pada kondisi alam dan bercorak teknologi tradisional pun akan mengalami perubahan. Dengan adanya alat-alat mekanisasi pertanian, tahapan pekerjaan usahatani dikerjakan oleh mesin, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, hingga penanganan

panen. Dilakukannya pembukaan areal baru, lahan tidur dan lahan pertanian non produktif dapat ditingkatkan menjadi lahan produktif. Kegiatan usahatani yang bercorak tradisional akan berubah; Tingkat usaha dari petani kecil menjadi petani komersial, dampak positif ini akan dapat dilihat dalam kurun waktu jangka panjang. Terjadinya pergeseran teknologi dan upah, serta perpindahan tenaga kerja manusia menjadi mesin. Pergeseran dan perubahan lainnya seperti sosial budaya yang mana nilai-nilai kebersamaan, saling tolong-menolong, menjadi terkikis dikarenakan para petani dalam kegiatan pertaniannya sudah dikerjakan oleh mesin.

Petugas lapang/pendidik luar sekolah dalam bertindak untuk pelaksanaan tugas lapangan perlu memahami prinsip-prinsip pemberdayaan dan Pembangunan nilai, norma, budaya dan adat istiadat serta kearifan local masyarakat desa, dengan persamaan persepsi dan tujuan, seperti: (i) menciptakan dan menjalin hubungan yang akrab dengan Masyarakat desa; (ii) Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan; (iii) Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya; (iv) Pengembangan pola pikir untuk berpikir mandiri dan kreatif; (v) membuat tempat usaha dan kegiatan ekonomi yang paling baik; dan beberapa kegiatan yang bermanfaat dan berhasil guna lainnya. Membangun dan memberdayakan masyarakat desa dapat dilakukan, antara lain dengan (1) Pendekatan Kelompok, melalui: Ceramah, Sarasehan, Kelompok Diskusi, Field Trip, Karya Wisata; (2) pendekatan perorangan/secara individu, melalui: Kunjungan Rumah, Kunjungan Usahatani, Petani contoh, dan diskusi/tanyajawab di lapangan; (3) Pendekatan Massal, melalui: Kampanye, Pameran, Brosur, Leaflet, Media Massa, Siaran Radio-Televisi, Internet, dsb. Dengan catatan setiap petugas lapang harus memahami dan bertujuan terbaik mencapai pemberdayaan masyarakat desa yang maju dan mandiri.

2.4 Kesimpulan

Masyarakat desa yang akan dibangun dan diberdayakan hendaknya juga memiliki keinginan untuk maju dan berkeinginan memiliki kompetensi untuk berkembang, berpartisipasi, bersedia menerima pendidikan dan turut aktif dalam setiap tahapan proses pemberdayaan tersebut. Dari aspek sosial-ekonomi masyarakat di pedesaan sangat bergantung pada sumber daya dan kondisi alam sekitar mereka, yang umumnya bermatapencaharian di sektor pertanian sebagai usaha dan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Sedemikian pentingnya peran pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa dimana kegiatannya merupakan faktor pelancar pembangunan pertanian, sehingga perlu adanya petugas lapang yang mampu memanejemen atau mengatur supaya petani tidak ketinggalan informasi maupun teknologi pertanian;. Pendidikan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa bisa mencakup: pendidikan untuk masyarakat desa dan petani, pendidikan budidaya hingga pemasaran produk pertanian (hulu hingga hilir), pendidikan pengolahan produk hasil panen (agroindustry), serta berbagai pelatihan yang terkait lainnya berdasarkan karakteristik individunya, kebutuhan, motivasi, tujuan, serta lingkungan fisik dan sosial masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliyah, M. (2016). Pemberdayaan: Kementerian Sosial & LSPS. Jurnal, 1, No 2, 2011.
- Asriyanti Syarif-Mutmainnah Zainuddin. 2017. Inti Sari Sosiologi Pertanian. Penerbit CV. INTI MEDIATAMA, 2017.
- Elizabeth. R. 2003; 2004; 2007; 2014; 2019; 2022; 2023. Available: SINTA ID: 6671403; <https://orchid.org/0000-0003-4937-9739>.
- Mubyarto. 1987. Pengantar Ekonomi Pertanian. Cetakan Kesembilan. Jakarta: LP3ES
- <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/753/Penyuluhan-dan-Pemberdayaan-Petani-Indonesia.pdf>
- Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Jurnal Penyuluhan, 4(1). <https://doi.org/10.25015.v4i1.2170>
- Penson, John, Oral Crapps, C Parr Rosson III, and Richard T Woodward. 2010. *Introduction to Agricultural Economics*. Fifth Edition. New York: Prentice Hall.
- Permentan No.03/Permentan/Sm.200/1/2018 Tentang Pembangunan Pertanian dan Masyarakat Pedesaan
- Undang-Undang Nomor 16. (2006). tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Kementan Pertanian, 160.

BAB 3

PERUBAHAN DAN MOBILITAS SOSIAL

Oleh Faidah Azuz

3.1 Pendahuluan

Panta corei kai ouden menei (semua berubah, tidak ada yang tetap) adalah kalimat seorang filosof Yunani yang hidup pada 535-475 SM bernama Heraklitus. Dalam prosa lainnya Heraklitus mengatakan bahwa “Anda tidak mungkin melangkah dua kali dalam sungai yang sama”. Kalimat tersebut adalah pemikiran Heraklitus tentang perubahan. Dalam artikulasi lain pemikiran tersebut hendak mengatakan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak mungkin mengelak dari perubahan, bahkan udara yang kita hirup selalu berubah dalam tiap helaan napas.

Tetapi tidak semua Filosof berpendapat bahwa kehidupan selalu berubah. Permenides (520-450 SM) meyakini bahwa realitas dunia itu satu, eksistensinya tidak mengenal waktu (*timeless*) dan bentuknya satu (*uniform*). Berdasarkan pendapat ini dikatakan bahwa perubahan itu sulit dibayangkan atau bahkan tidak mungkin terjadi (Harper and Leicht, 2019). Gunawan (2014) menjelaskan lebih lanjut bahwa dua aliran pemikiran ini kemudian berkembang ke arah yang berlawanan. Pemikiran Heraklitus dikaitkan dengan gagasan tentang perubahan masyarakat, di lain pihak pemikiran Permenides dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai kestabilan masyarakat.

Tulisan ini tidak ditujukan untuk membahas secara detail perbedaan pemikiran keduanya. Tulisan ini hendak melihat lebih jauh hal yang berkaitan dengan perubahan sosial (Gunawan, 2014). Perubahan dengan demikian merupakan gagasan atau konsep yang memiliki akar pemikiran sejarah yang panjang, dan terus berkembang hingga kini, sejalan dengan perumpamaan bahwa “sungai akan terus mengalir”.

Dalam tataran yang lebih luas, perubahan yang berkaitan dengan individu adalah perubahan pola pikir, kesehatan, interaksi, dan lainnya yang bersifat pribadi. Perubahan berkaitan struktur dan budaya masyarakat secara keseluruhan telah memengaruhi tata kehidupan baik individu maupun masyarakat. Undangan perkawinan yang dulunya membutuhkan pakem ketika diantarkan ke keluarga terlebih mereka memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, kini berubah. Ketika dulu saat mengantarkan undangan perkawinan dalam masyarakat Maluku harus diawali dengan pemberitahuan lisan (*buang suara*) yang kemudian diikuti oleh utusan khusus yang mengantarkan undangan. Dalam situasi sekarang, tata cara pengantaran undangan telah mengalami perubahan. Undangan dapat berupa aplikasi digitak, melalui WA, atau media sosial lainnya. Bukan berarti tata krama telah berkurang, tetapi fenomena ini dipahami oleh kedua pihak (yang mengundang dan yang diundang) sebagai perubahan cara/media. Demikianlah perubahan terus berlanjut.

Dalam tataran global, kita hidup di dunia yang penuh dengan transformasi sosial, ketidakpastian ekonomi, inovasi budaya dan gejolak politik. Dua dekade pertama abad kedua puluh satu telah ditandai oleh serangkaian peristiwa bersejarah yang penting, termasuk serangan teroris 11 September 2001, krisis keuangan global pada tahun 2007-2008, Musim Semi Arab pada tahun 2011, dan pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Optimisme yang terkait dengan 'Akhir Sejarah' yang diantar oleh berakhirnya Perang Dingin yang terkait dengan

kebangkitan populisme otoriter, kemunduran demokrasi, dan meningkatnya ketidaksetaraan (Harper and Leicht, 2019).

Pada saat yang sama, norma-norma sosial telah berubah dengan cara-cara yang tidak terbayangkan dua dekade lalu. Di banyak negara di dunia, pernikahan gay kini disahkan dan kehadiran kaum gay dan lesbian secara terbuka dalam kehidupan publik menjadi hal yang normal. Di seluruh dunia, politik identitas telah menjadi pusat perjuangan baru untuk hak asasi manusia. Perkembangan semacam ini juga memicu bentuk-bentuk baru dari respon reaksioner, termasuk bentuk-bentuk nasionalisme yang revanchis dan politik identitas yang eksklusif. Tidak hanya dalam bentuk-bentuk tersebut terlihat masyarakat cukup reaksioner, tetapi juga dalam munculnya perjuangan-perjuangan baru di sekitar tema-tema dekolonialitas, peringatan sejarah, restorasi tanah, atau Black Lives Matter, kekuatan warisan yang diwarisi dari masa lalu menjadi nyata.

Di antara semua peristiwa ini, tren dan kecenderungan jangka panjang telah memunculkan tantangan baru: Perubahan Iklim, sebagai titik balik yang berpotensi tidak dapat diubah dalam kehidupan alam; misalnya, urbanisasi populasi manusia; reorientasi geopolitik yang menyertai munculnya Cina sebagai kekuatan global; dan kebangkitan kecerdasan buatan. Dan sering kali semua perubahan ini terjadi dengan cepat.

3.2 Perubahan Sosial; Telaah Teori dan Kajian

Pembicaraan tentang perubahan sosial diketahui memiliki pijakan sejarah yang panjang dan berkembang hingga saat ini. Wilbert Moore mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial. Struktur menjadi kata kunci penting. Dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Norma, nilai, dan gejala kultural merupakan bagian dari struktur sosial (Gunawan, 2014).

Struktur sosial sebagai jaringan hubungan sosial yang bertahan lama di mana interaksi antara orang atau kelompok telah menjadi rutin dan berulang. Struktur sosial dapat dipahami sebagai peran sosial yang bertahan lama, kelompok organisasi, institusi, dan masyarakat. Pengertian struktur sosial yang merujuk pada pola perilaku, sementara interaksi sosial dalam pandangan Wilbert Moore mendasari diri pada kegiatan yang berulang-ulang dan rutin (Harper and Leicht, 2019).

Perubahan sosial setidaknya memiliki enam dimensi. Dimensi pertama perubahan sosial yang berhubungan dengan jenis perubahan (*types of change*); dimensi kedua berkaitan dengan tingkatan sosial (*levels of change*); dimensi ketiga berhubungan dengan kerangka waktu (*times frames of change*); dimensi keempat berkaitan dengan penyebab perubahan (*causes of change*); dimensi kelima berkaitan dengan niat manusia (*relationships of change to human intentions*); dan dimensi keenam berkaitan dengan beberapa istilah yang berbeda namun masih dalam koridor perubahan sosial antara lain proses, kemajuan, perkembangan, dan pembangunan (Harper and Leicht, 2019).

Pada dimensi *types of change* dijelaskan oleh Harper (2019) bahwa kata perubahan mengandung makna ada yang berubah. Dalam konteks ini setidaknya terdapat lima cara berbeda di mana struktur dapat diubah. *Pertama*, ada perubahan dalam personil di mana orang-orang baru dengan sejarah hidup dan pengalaman yang berbeda secara terus menerus masuk dan keluar dari peran yang sudah mapan.

Kedua, ada perubahan dalam bagian struktur yang saling berhubungan. Hal ini mencakup perubahan hubungan peran seperti perbedaan peran keluarga. Pada tingkat yang berbeda, meningkatnya kompleksitas masyarakat dan meningkatnya spesialisasi pekerjaan dalam konteks ekonomi merupakan perubahan dalam cara apa struktur saling berhubungan.

Ketiga, ada perubahan dalam fungsi struktur, yaitu perubahan dalam apa yang mereka lakukan untuk masyarakat dan bagaimana mereka beroperasi. Sebagai contoh, di Amerika kontemporer, banyak gereja tidak hanya berfungsi untuk mempromosikan kepercayaan agama, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga konseling keluarga dan layanan sosial dan sebagai pendukung perubahan politik. Baik gereja-gereja Protestan fundamentalis maupun Konferensi Amerika dan Konferensi Waligereja Katolik Roma telah berfungsi secara lebih terbuka sebagai pendukung perubahan politik (seperti dalam bidang aborsi).

Keempat, ada perubahan dalam hubungan antara berbagai struktur yang berbeda. Sebagai contoh, sejak tahun 1890-an, hubungan antara buruh dan manajemen di Amerika telah berevolusi dari yang sering kali tidak beradab dan konfrontasi yang penuh kekerasan pada abad ke-19 menjadi negosiasi yang bersifat diametral dan sangat terstruktur.

Kelima, munculnya struktur-struktur baru. Sebagai contoh, ada bukti bahwa sistem global telah berinteraksi dalam satu sistem ekonomi, budaya, dan politik. Sistem pemerintahan dikendalikan bukan pada sistem demokrasi yang berbasis masyarakat, tetapi demokrasi yang melebar menjadi konglomerasi.

Dimensi *levels of change*. Dimensi itu berfokus pada karakteristik individu secara keseluruhan seperti perubahan sikap dan karakteristik demografis (usia dan jenis kelamin). Di samping itu *level of change* juga berkaitan dengan perubahan pada tataran aspek-aspek budaya dan unit struktural dari sistem yang kecil menjadi sistem yang besar dan inklusif. Secara umum kita ketahi bahwa lebih mudah untuk melihat perubahan dalam skala kecil atau tingkat mikro yang melibatkan orang-orang dan kelompok-kelompok di sekitar kita secara langsung. Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa apa yang terjadi pada kita dibentuk oleh apa yang terjadi pada level makro masyarakat.

Dimensi *times frames of change*. Perubahan jangka pendek dalam hidup kita sering kali terlihat jelas, tetapi perubahan jangka panjang mungkin lebih sulit untuk dilihat. Berfokus hanya pada perubahan jangka pendek dapat menipu. Beberapa perubahan yang berulang berulang, seperti siklus bisnis tahunan dan tahap perkembangan keluarga, beroperasi dalam jangka pendek dan mungkin mungkin tidak melibatkan banyak perubahan sama sekali dari sudut pandang rentang waktu yang lebih panjang. Untuk melanjutkan keluarga kita Sebagai contoh, individu dapat mengalami perubahan dramatis dan sering kali traumatis saat mereka beralih dari pengantin baru dan memiliki anak kecil, menjadi keluarga dengan anak remaja, dan kemudian menjadi keluarga "sarang kosong" setelah anak-anak telah pergi.

Sebuah kajian tentang perubahan sosial pasca revolusi hijau kiranya dapat mewakili dimensi *times frame of change* (Saleh, 2021). Kajian perubahan sosial pasca revolusi hijau melihat adanya perubahan struktur pekerjaan akibat adanya revolusi hijau di pedesaan Jawa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa revolusi hijau dalam satu pihak berhasil meningkatkan produktivitas tanaman terutama dengan menggunakan bibit dan pupuk. Tetapi bersamaan dengan itu, perubahan penggunaan benih padi yang baru yang lebih produktif telah mengubah cara bercocok tanam yang selama ini dilakoni. Akibatnya, banyak butuh tani kehilangan pekerjaan. Dan untuk tetap mempertahankan hidup, para buruh tani tersebut beralih pekerjaan. Mereka menjadi buruh bangunan di perkotaan. Perubahan ini dalam jangka panjang menyebabkan berubahnya struktur dan relasi keluarga. Munculnya istilah mudik saat lebaran kemungkinan besar dipicu oleh perubahan struktur pekerjaan yang mana revolusi hijau menjadi salah satu penyebab urbanisasi.

Dimensi *causes of change*. Membedakan antara penyebab dan konsekuensi dari perubahan merupakan hal yang penting baik untuk alasan ilmiah maupun praktis, namun tidak selalu

mudah. Dalam ilmu sosial, "penyebab" selalu merupakan kesimpulan, bukan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya dari serangkaian pengamatan. Apakah kita memperlakukan sesuatu sebagai penyebab atau akibat sering kali bersifat sewenang-wenang. Jika ada urutan sebab akibat antara $A \Rightarrow B \Rightarrow C$, maka B adalah konsekuensi dari A dan juga penyebab dari C. Terdapat perbedaan penting antara penyebab perubahan eksternal (eksogen) dan internal (endogen). Ini adalah perbedaan konseptual dan agak artifisial. Namun, ini merupakan perbedaan yang penting untuk dapat menemukan sumber-sumber perubahan yang berbeda.

Perubahan eksternal terjadi karena adanya hal-hal yang berasal dari luar, seperti teknologi baru, ide, gaya, penyakit, dan sebagainya. Pada analisis terakhir, semua sistem sosial adalah sistem terbuka, tunduk pada penetrasi elemen-elemen baru dari sistem lain. Secara historis, para pedagang, imigran, dan tentara pendudukan telah menjadi pembawa perubahan yang penting di antara masyarakat. Dalam konteks Indonesia, datangnya para transmigran telah membawa perubahan baik dari segi teknik bertani, budaya dan kemudian saling berbaur, maupun kehidupan sosial ekonomi lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dondo (2021) tentang dampak sosial tambang mas di Sulawesi Utara memperlihatkan adanya dua akibat, yang positif dan negatif. Hal positif terlihat dengan bermuncunya kios atau toko-toko di sekitar area penambangan yang memberikan peluang peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Kajian tersebut juga menelaah dampak negatif dari aktifitas penambangan yakni rusaknya lingkungan dan terancamnya kondisi kesehatan masyarakat sekitar (Dondo, Kiyai and Palar, 2021).

Dimensi *relationships of change to human intentions*. Beberapa tren berskala besar tidak disengaja - artinya tidak ada yang yang tidak disengaja. Contohnya antara lain pergeseran tingkat kelahiran dan kematian, urbanisasi, atau pertumbuhan

proporsi rumah tangga yang tidak berkeluarga. Ada pula yang disengaja dan direncanakan, seperti perubahan hukum, pengembangan dan penyebaran teknologi baru, dan perubahan kebijakan pemerintah yang sengaja diinduksi oleh para pembuat undang-undang dan perencana.

Perubahan-perubahan tersebut didorong oleh *human agency*. Dalam kaitannya dengan *human agency* terdapat tiga jenis perubahan yakni: tren, perubahan yang disengaja dan terencana yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan elit, dan perubahan berhubungan dengan gerakan sosial yang melibatkan segmen populasi yang luas.

Tren dan perubahan tidak disengaja baru saja dialami oleh masyarakat dunia dengan adanya Covid-19. Hal ini terlihat dalam temuan oleh Prasetya (2021) bahwa Covid yang menyerang dunia secara cepat telah menyebabkan adanya perubahan sosial luar biasa terutama dalam hal perilaku kesehatan masyarakat dan perubahan lapangan kerja. Perubahan perilaku sehat dan *social distancing* telah membuat kekeluargaan yang luas menjadi kekeluargaan yang menyempit (Prasetya, Nurdin and Gunawan, 2021).

Dimensi *Change and Other Terms*. Perubahan adalah istilah yang luas, umum, dan netral, sedangkan istilah proses, kemajuan, evolusi, dan perkembangan memiliki arti yang lebih spesifik. Setiap aspek perilaku manusia dapat dilihat sebagai sebuah proses yang memusatkan perhatian kita pada aspek perilaku yang aktif dan dinamis. Namun ada juga proses perilaku yang mempertahankan stabilitas. Perubahan adalah sebuah proses, tetapi tidak semua proses adalah perubahan. Kemajuan menyiratkan peningkatan kualitatif agar segala sesuatunya menjadi lebih baik.

Gagasan tentang kemajuan pada dasarnya sarat akan nilai. Ini adalah konsep normatif manusia yang penting tetapi bukan konsep ilmiah. Kita dapat berdebat tentang apakah perubahan

tertentu mewakili kemajuan atau tidak. Terakhir, ada gagasan tentang evolusi dan perkembangan sebagai jenis perubahan. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan sosial menggambarkan evolusi sebagai "perkembangan yang kurang lebih teratur yang sederhana ke entitas sosial yang lebih kompleks" (Vago in Herper, 2019)), tetapi pandangan yang lebih sosiologis menggambarkan evolusi sebagai kemunculan kebaruan sosial dan seleksi, reproduksi, dan transmisinya.

3.3 Mobilitas Sosial: Telaah Teori dan Kajian

Pembicaraan tentang mobilitas sosial tidak dapat dilakukan tanpa menyinggung struktur sosial dan stratifikasi sosial. struktur sosial yang ditandai dengan adanya pelapisan sosial atau disebut juga dengan stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi sosial diartikan sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas atau lapisan secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang dan kelas rendah. Dasar dari stratifikasi adalah adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial (Setyowati *et al.*, 2020).

Pada masyarakat yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka (*open social stratification*) maka setiap anggotanya memiliki kesempatan untuk dapat menuju kelapisan yang lebih tinggi. Menurut Kornblum (1988), mobilitas sosial adalah perpindahan individu, keluarga atau kelompok sosial dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Dalam perpindahan yang dilakukan dapat mempengaruhi status sosial yang dimiliki yaitu bisa naik atau turun, bahkan bisa tetap pada tingkat yang sama tetapi dalam pekerjaan yang berbeda.

Kajian tentang mobilitas sosial umumnya dilakukan pada dua ranah, ranah sosiologi dan ranah ekonomi. Kajian mobilitas sosial pada ranah sosiologi mendasari diri pada perubahan status

dan posisi sosial dalam hierarki masyarakat, sedangkan kajian mobilitas sosial dalam ranah ekonomi cenderung difokuskan pada perubahan penghasilan (Pattinasarany, 2016).

Dalam ranah sosiologi, mobilitas sosial diartikan sebagai perubahan status sosial dan posisi individu keluarga atau kelompok dalam hierarki masyarakat. Giddens dalam Pattinasarany (2016) mengartikan mobilitas sosial sebagai pergerakan individu dan kelompok di antara kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda.

Kajian mobilitas sosial umumnya melihat ada beberapa faktor utama yang berkontribusi pada mobilitas sosial, faktor tersebut adalah pendidikan, kesempatan atau peluang individu mencapai tujuan hidup, memiliki kualitas hidup yang baik, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, latar belakang keluarga, dan modal sosial (Pattinasarany, 2016).

Mobilitas sosial menurut Soekanto adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. struktur sosial ini mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya, sehingga menempatkan individu atau kelompok sosial ada dalam kedudukan yang berbeda-beda yang kemudian membentuk pelapisan masyarakat (Setyowati *et al.*, 2020). Mobilitas sosial dengan demikian adalah perubahan stratifikasi sosial yang terjadi baik secara vertikal maupun horisontal. Mobilitas sosial vertikal dapat turun atau naik.

Dalam studi kontemporer tentang mobilitas sosial, sebuah perbedaan penting dibuat antara pola-pola mobilitas sosial yang teramati, yang kadang-kadang disebut sebagai 'mobilitas absolut', dan fluiditas sosial (atau 'mobilitas relatif'). Mobilitas absolut berkaitan dengan pola dan tingkat mobilitas, di mana mobilitas dipahami secara sederhana sebagai perpindahan antar

kelas asal (kelas sosial tempat seseorang dibesarkan) dan kelas tujuan (Richard Breen, 2018).

Mobilitas sosial menyangkut hubungan antara asal-usul kelas dan posisi kelas saat ini. posisi kelas saat ini: secara khusus hal ini didasarkan pada perbandingan, antara orang-orang dari asal kelas yang berbeda, tentang peluang mereka untuk satu kelas tujuan dibandingkan dengan kelas yang lain.

Fluiditas sosial sering ditafsirkan sebagai indeks kesetaraan dalam kesempatan untuk mengakses posisi sosial yang lebih atau kurang menguntungkan posisi sosial di antara orang-orang yang berasal dari asal-usul sosial yang berbeda (dengan kata lain, sebagai indeks keterbukaan masyarakat), dan penelitian kontemporer mengenai mobilitas sosial karenanya lebih memperhatikan fluiditas sosial daripada mobilitas absolut (Curtis, 2016; Goldthorpe, 2016)

Dalam tataran lain, mobilitas sosial diartikan sebagai konsep yang membicarakan ketimpangan dalam terminologi sosiologis. Mobilitas sosial mengacu pada pergerakan individu di antara berbagai tingkat hierarki sosial, biasanya didefinisikan dalam kategori pekerjaan atau kelas sosial yang luas. Jumlah mobilitas sosial sering digunakan sebagai indikator tingkat keterbukaan dan keluwesan suatu masyarakat. Studi tentang mobilitas melihat tingkat mobilitas, pola mobilitas (baik jarak dekat antara tingkat hierarki yang berdekatan maupun jarak jauh antara tingkat yang terpisah jauh), siapa yang direkrut ke berbagai posisi dan faktor penentu pemilihan ini. Mobilitas dapat juga dilihat dalam konteks generasi. Mobilitas antargenerasi membandingkan posisi individu saat ini dengan posisi orang tua mereka. Mobilitas intragenerasi membandingkan posisi yang dicapai oleh individu yang sama pada saat-saat yang berbeda dalam yang sama pada saat-saat yang berbeda dalam kehidupan kerjanya (Abercrombie, Hill and Turner, 2006).

Kajian mobilitas sosial yang dilakukan oleh Iwan Gardono Sujatmiko pada tahun 1996 dilakukan untuk melihat stratifikasi sosial, mengetahui pola mobilitas okupasi antar generasi, dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi mobilitas okupasi antar generasi. Sujatmiko menemukan bahwa antara lain *pertama*, persepsi responden tentang stratifikasi didasarkan pada aspek multi dimensi yang meliputi politik, ekonomi, dan sosial. *Kedua*, pola mobilitas antar generasi menunjukkan kesempatan untuk naik pada lapisan bawah cukup besar. *Ketiga*, pendidikan menjadi faktor penentu terjadinya mobilitas vertikal ke atas terutama pada masyarakat kelompok menengah. Anak-anak dari keluarga menengah ini berhasil memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari generasi sebelumnya (Pattinasarany, 2016).

Mobilitas sosial di pedesaan Indonesia dapat dilihat dalam kajian tentang nelayan (Setyowati *et al.*, 2020). Kajian ini menemukan bahwa dalam kehidupan nelayan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur terjadi mobilitas vertikal ke atas dan ke bawah. Pada nelayan yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas dikarenakan adanya perubahan dalam hal pekerjaan, seperti peningkatan pendapatan ataupun status sosialnya dari pekerjaan sebelumnya. Mobilitas vertikal ke atas ini sering kali terjadi pada buruh nelayan yang beralih pekerjaan menjadi juragan darat maupun juragan laut, maupun juragan laut yang beralih menjadi juragan darat. serta juragan darat yang beralih pekerjaan sebagai pedagang ikan. Mobilitas vertikal ke atas dapat terjadi oleh beberapa faktor, seperti adanya pemberian warisan, bantuan modal dari pemerintah, serta adanya keinginan dari diri sendiri untuk mengubah statusnya.

Pada kasus mobilitas vertikal ke bawah terlihat bahwa ada penurunan status sosial nelayan. Pada mobilitas vertikal ke bawah ini nelayan mengalami perubahan atau peralihan status sosial dan ekonomi lebih rendah dari status sebelumnya. Umumnya yang mengalami mobilitas vertikal ke bawah ini adalah nelayan yang sebelumnya berada pada kelas sosial atau berada

pada strata atas, seperti agen ataupun juragan darat. Agen atau pengepul ikan yang mengalami mobilitas vertikal ke bawah disebabkan oleh beberapa hal seperti berkurangnya ikan di nelayan, banyaknya saingan, memiliki perilaku boros serta mengalami kerugian akibat nelayan yang dipinjam modal tidak kunjung mengembalikan modal tersebut.

3.4 Penutup

Kajian tentang perubahan dan mobilitas sosial pada dasarnya menelaah perubahan posisi dan status individu atau kelompok dalam masyarakat. Pergerakan sosial tidak selamanya berarti mobilitas sosial vertikal ke atas atau menurun, namun yang tak kalah penting adalah mobilitas sosial horizontal yakni perubahan lapangan pekerjaan. Pada tataran ini perhatian perlu diletakkan bukan pada perubahan lapangan kerja semata, melainkan mengapa terjadi perubahan lapangan pekerjaan tersebut. revolusi hijau dan covid tampaknya menjadi faktor menarik untuk dielaborasi lebih jauh dalam konteks sosiologi pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, N., Hill, S. and Turner, B. S. (2006) *The Penguin Dictionary of Sociology*. Fifth. Penguin Books.
- Curtis, J. (2016) 'Social mobility and class identity: The role of economic conditions in 33 societies, 1999--2009', *European Sociological Review*, 32(1), pp. 108–121.
- Dondo, S. M., Kiyai, B. and Palar, N. (2021) 'Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow', *Jurnal administrasi publik*, 7(101).
- Goldthorpe, J. H. (2016) 'Social class mobility in modern Britain: changing structure, constant process', *Journal of the British Academy*, 4(89–111).
- Gunawan, D. H. (2014) *Perubahan sosial di pedesaan Bali: dualitas, kebangkitan adat, dan demokrasi lokal*. Marjin Kiri.
- Harper, C. L. and Leicht, K. T. (2019) *Exploring social change: America and the world*. Routledge.
- Pattinasarany, I. R. I. (2016) *Stratifikasi dan mobilitas Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prasetya, A., Nurdin, M. F. and Gunawan, W. (2021) 'Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal', *Sosietas*, 11(1), pp. 929–939.
- Richard Breen (2018) 'Social Mobility in Europe', in Grusky, D. B. and Weisshaar, C. R. (eds) *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*. 4th edn. Routledge.
- Saleh, A. (2021) 'Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan Pasca Revolusi Hijau', *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(2), pp. 71–93.
- Setyowati, I. S. et al. (2020) 'Proses Mobilitas Sosial Nelayan Kecamatan Paciran (Studi Kasus Komunitas Nelayan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)', *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(2), pp. 169–180.

BAB 4

KONSEP KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN

Oleh Talitha Wenifrida Massenga

4.1 Pendahuluan

Secara umum, konsep kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah modern. Gejala ini selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Oleh karena itu menarik untuk dipelajari.

Pada masa lampau, pendekatan sosiologi terhadap kekuasaan biasanya dilakukan dalam kerangka pembahasan mengenai pengendalian sosial. Pengendalian seringkali ditafsirkan sebagai penggunaan kekuasaan atau pengaruh untuk mencegah terjadinya perpecahan, mempertahankan ketertiban atau mencapai stabilitas sosial. Pembahasan pengendalian sosial biasanya terbatas pada orientasi terhadap masa lampau dan masa kini, sedangkan kekuasaan lebih relevan bagi masa depan, sebagai suatu konsep yang mempunyai kualitas dinamis.

Sosiologi sebagai suatu ilmu, tidak memandang kekuasaan sebagai suatu yang baik atau buruk, kecuali dalam penerapannya, tetapi sosiologi memandang kekuasaan sebagai unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat. Penilaian baik atau buruk harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Karena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka penggunaan kekuasaan harus dilihat bagi keperluan masyarakat (Soekanto, 2017).

Penafsiran-penafsiran mengenai peranan kekuasaan dan wewenang dalam pergaulan hidup semenjak abad ke 19 semakin meluas. Analisa yang semula dilakukan oleh Karl Marx (1973) ternyata banyak mendapatkan kritikan, namun sebagai tindak lanjut dari itu, ternyata kemudian banyak dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap proses-proses kemasyarakatan, termasuk kekuasaan dan wewenang. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang Hasil-hasil analisa yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu, selanjutnya hasil-hasil penelitian Max Weber, merangsang pada ahli-ahli sosial untuk terus mengadakan penelitian terhadap unsur-unsur kekuasaan dan wewenang yang selama ini agak diabaikan oleh para ahli ilmu politik.

Kekuasaan tidak terlepas dari dengan konsep wewenang, karena wewenang muncul pada saat masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya. Wewenang akan menjadi efektif apabila didulung oleh kekuasaan yang nyata. Apabila kekuasaan dikaitkan pada seseorang, maka orang tersebut disebut sebagai pemimpin dan masyarakat akan menganggap sebagai pemimpinnya.

Dalam mempelajari kepemimpinan, maka kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan merupakan unsur yang penting untuk dipelajari, karena dalam fakta sosial penggunaan kekuasaan disetiap masyarakat berbeda, sehingga kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan dari setiap masyarakat yang berbeda dapat dipahami sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat.

4.2 Kekuasaan

Authority berasal dari bahasa Inggris yang artinya berkuasa, ahli dan sumber, dalam bahasa Latin yaitu *autor* yang berarti, perencana, cikal bakal, pembina dan pendiri. Otoritas yaitu kekuasaan yang diberi legitimasi, diberikan kepada sebuah Lembaga masyarakat dimana para pejabatnya menjalankan fungsinya atau juga hak melakukan membuat peraturan untuk memerintah orang lain.

Max Weber (1947) seorang sosilog adalah pelopor pertama yang menggunakan istilah kekuasaan dalam sosiologi, merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor dalam hubungan sosial berada dalam suatu pekerjaan untuk melaksanakan keinginannya sebagai pemimpin dan yang menghilangkan hambatan. Selanjutnya Max Weber, mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu

Soekanto (2017) mengartikan kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kemampuan disini artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat.

Gary Yukl (1994) mengartikan kekuasaan sebagai suatu kapasitas untuk mempengaruhi secara unilateral sikap dan perilaku orang kearah yang diinginkan, sedangkan Robbins (1996) mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain.

Ada juga pendapat yang mengatakan kekuasaan (*power*) adalah kemampuan (*ability*) yang seseorang miliki untuk menggerakkan sumberdaya manusia, informasi dan material agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan memiliki

tiga unsur yakni kemampuan mendominasi (*power over*), kemampuan berbuat sesuatu (*power to*) dan kemampuan menolak permintaan orang lain (*power from*) (Nurahmi, 2014).

Kekuasaan adalah keberdayaan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya pemimpin berdaya untuk mengubah perilaku atau tingkah laku individu atau kelompok. Dengan kata lain kekuasaan berarti keberdayaan dalam mempengaruhi seseorang maupun kelompok, keputusan atau kejadian. Secara umum ada dua bentuk kekuasaan :

1. Kekuasaan pribadi; kekuasaan yang diperoleh dari para pengikutnya berdasarkan pada kekaguman, respek dan ikatan pada pemimpin.
2. Kekuasaan posisi; kekuasaan yang diperoleh dari wewenang formal organisasi.

Walaupun kekuasaan selalu ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, namun bukan berarti bahwa kekuasaan dapat dibagi rata pada semua anggota masyarakat, dengan ketidak merataan ini justru kemudian timbul makna pokok dari kekuasaan, yaitu sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar menurut pada kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan itu juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah itu patuh) dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kekuasaan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dengan begitu dapat merupakan suatu konsep kuantitatif dan kualitatif

Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai atau dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh ini, dengan rela atau

karena terpaksa. Apabila kekuasaan itu diterjemahkan dalam diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya.

Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana dalam hubungan-hubungan sosial maupun organisasi-organisasi sosial, akan tetapi pada umumnya kekuasaan yang tertinggi ada pada organisasi yang dinamakan “negara”. Secara resmi, negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, jika perlu dengan paksaan, juga negaralah yang membagi-bagikan kekuasaan-kekuasaan yang lebih rendah derajatnya, bentuk ini disebut sebagai kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan biasanya hanya dijalankan oleh segolongan kecil dari masyarakat yang menamakan dirinya sebagai *the rulling class*, hal ini umum ada pada masyarakat. *The rulling class* adalah pemimpin, namun bukan pemegang kekuasaan yang tertinggi.

Pelaksanaan kekuasaan pada kenyataannya seringkali tidak semulus yang diharapkan oleh kaum yang berkuasa. Rasa ketidakpuasan dari yang dikuasai dapat saja muncul karena perbedaan-perbedaan pikiran yang menguasai dengan yang dikuasai. Untuk menjalankan kekuasaan secara lancar, pihak penguasa senantiasa berusaha untuk mendapatkan dukungan dari yang dikuasai. Hal ini untuk menyatakan bahwa kekuasaan yang diselenggarakan memiliki legitimasi atau legal dan baik bagi masyarakat bersangkutan.

Uraian ini menjelaskan bahwa kekuasaan dapat meliputi ruang dan waktu, termasuk di dalamnya ada barang, manusia dan uang. Tetapi pada kenyataannya kekuasaan itu dinilai pada pengaruhnya terhadap manusia, terutama kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Jadi kekuasaan adalah sebuah kerangka yang multi dimensi, yang telah dianalisis dari berbagai sudut pandang sebagai karakteristik individual, sebagai proses mempengaruhi interpersonal, sebagai komoditas yang

diperdagangkan, sebagai tipe penyebab dan sebagai literatur dalam mempelajari nilai dan etika (Komang, et, all, 2009).

4.2.1 Unsur-unsur dan Saluran-saluran Kekuasaan

Soekanto (2017), menggambarkan beberapa unsur kekuasaan yang dapat dijumpai pada hubungan social antara manusia maupun antar kelompok, yaitu yang meliputi :

1. **Rasa Takut;** Perasaan takut pada penguasa membuat pihak lain memunculkan sikap patuh terhadap segala kemauan dan tindakan penguasa yang ditakuti. Rasa takut ini bernuansa negatif, karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa. Rasa takut merupakan gejala umum yang terdapat dimana-mana.
2. **Rasa Cinta;** Perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif, orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa, masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Reaksi kedua belah pihak bersifat positif,
3. **Kepercayaan;** suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Dengan kepercayaan ini maka orang-orang akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa, meskipun dalam tataran tertentu, pihak yang melaksanakan keinginan tidak mengetahui secara pasti maksud dari pihak yang memiliki keinginan.
4. **Pemujaan;** artinya adalah bahwa penguasa adalah pihak yang dipuja, akibatnya adalah apapun yang dilakukan oleh pihak yang dipuja selalu benar atau setidaknya dianggap sebagai kebenaran.

Saluran-saluran atau media tertentu yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan, yaitu:

1. **Militer;** penguasa lebih cenderung menggunakan paksaan (*coercion*) serta kekuatan militer (*military force*) dengan maksud menimbulkan rasa takut masyarakatnya, sehingga tunduk pada kemauan penguasa.

2. **Ekonomi;** penguasa cenderung menguasai sendi-sendi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penguasaan atas sendi pemenuhan kebutuhan hidup tersebut membuat masyarakat tidak memiliki pilihan yang lain dan penguasa dapat melaksanakan perintah-perintahnya melalui peraturan-peraturan yang disertai akibat sanksi.
3. **Politik;** penguasa membuat peraturan melalui badan-badan yang berwenang dan sah menurut masyarakat. Hal ini dibuat untuk meyakinkan dan memaksa masyarakat mentaati peraturan yang dikeluarkan penguasa.
4. **Tradisional;** terjadi penyesuaian tradisi antara pemegang kekuasaan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kesesuaian tersebut membuat pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan lancar.
5. **Ideologi;** penguasa-penguasa dalam masyarakat biasanya mengeluarkan doktrin-doktrin atau ajaran yang bertujuan menerangkan sekaligus menjadi pembenaran pelaksanaan kekuasaannya. Doktrin dan ajaran yang dikeluarkan disampaikan secara berulang dan masuk ke dalam ranah bawah sadar masyarakat, sehingga doktrin tersebut terinternalisasi dalam jiwa masyarakatnya.
6. **Saluran lainnya;** untuk lebih menyalurkan pengaruhnya, penguasa biasanya tidak hanya terbatas menggunakan saluran-saluran seperti di atas, tetapi menggunakan berbagai saluran lain, berupa komunikasi massa baik berupa iklan, pamphlet, surat kabar, radio, televisi, pagelaran music, atau apa saja yang dapat menarik simpati massa.

4.2.2 Bentuk-bentuk Pelapisan Kekuasaan

Bentuk dan sistem kekuasaan pada dasarnya selalu menyesuaikan diri pada masyarakat dengan adat istiadat dan pola-pola perilaku kelakuannya. Kekuasaan dianggap perlu ada dalam masyarakat, didasarkan pada kekuatiran terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Orang mulai sadar bahwa keteraturan atau ketertiban dalam masyarakat tidak dapat menggunakan pola penguasaan di bawah satu tangan, akan tetapi

harus ada pembagian kekuasaan, seperti yang dikemukakan oleh Robert M. Mc Iver (1954), bahwa kekuasaan itu ada dalam bentuk lapisan-lapisan atau piramida. Kekuasaan bukan semata-mata berarti bahwa banyak orang tunduk di bawah seorang penguasa. Mc Iver menggambarkan kekuasaan itu dalam tiga pola umum dari sistem lapisan-lapisan atau piramida kekuasaan, yaitu:

1. **Tipe Kasta;** adalah suatu sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta. Garis pemisah antar lapisan, relatif tidak mungkin ditembus.
2. Pada puncak paramida paling atas, duduk penguasa tertinggi dengan orang-orang disekitarnya, yang didukung oleh kaum bangsawan, tentara dan para pendeta. Lapisan kedua terdiri dari para petani dan buruh tani yang kemudian diikuti dengan lapisan terendah dalam masyarakat yaitu para budak.
3. **Tipe Oligarkis;** hampir seperti tipe kasta, yaitu dengan garis pemisah yang tegas, akan tetapi dasar perbedaan lebih ditentukan oleh kebudayaan masyarakat. Walaupun masih memuat unsur pewarisan kedudukan menurut kelahiran (*ascribe status*). Namun anggota masyarakat diberikan peluang mobilitas vertikal.
4. Kaum Industri, perdagangan dan keuangan memegang peranan penting pada tipe oligarkis ini. Ada beberapa cara dimana warga dari lapisan bawah naik tingkat lapisan dan juga ada kesempatan bagi warga lapisan menengah untuk menjadi penguasa.
5. **Tipe Demokratis;** menunjukkan keadaan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobile. Kelahiran tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang juga faktor keberuntungan.

Gambaran dari pola kekuasaan tersebut di atas, merupakan tipe ideal yang dalam kenyataan dan perwujudannya tidak jarang mengalami penyimpangan-penyimpangan, terutama disebabkan

oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan.

4.2.3 Cara mempertahankan Kekuasaan

Manusia menurut hakikatnya selalu memiliki hasrat untuk berkuasa, baik berkuasa untuk dirinya maupun berkuasa untuk pihak lain. Oleh karena itu, setiap penguasa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya. Karenanya mempertahankan menjadi hal yang penting dalam konteks penguasa, diperlukan suatu cara untuk mempertahankannya, yaitu:

1. Menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik, yang dianggap merugikan kedudukan penguasa. Peraturan-peraturan tersebut akan diganti dengan peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa, keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu akan ada pergantian kekuasaan dari seorang penguasa kepada penguasa yang lain.
2. Mengadakan sistem-sistem kepercayaan (*belief system*) yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Sistem-sistem itu meliputi ideologi, agama dan lainnya.
3. Menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik, yang dianggap lebih memudahkan kehidupan orang banyak.
4. Senantiasa mengadakan konsolidasi secara horisontal dan vertikal.

Menurut Setiadi dan Usman (2011), cara mengetahui siapa saja yang berkuasa dalam suatu sistem politik atau dalam suatu masyarakat, dapat dikemukakan tiga analisis yaitu:

1. Analisis Posisi; yaitu suatu analisis untuk mengetahui siapa yang berkuasa atau mempunyai pengaruh yang besar dalam pembuatan keputusan politik dengan melihat posisinya dalam lembaga pemerintahan. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa pejabat-pejabat yang menduduki

posisi-posisi yang tinggi dalam lembaga pemerintahan cenderung secara politis mempunyai kekuasaan yang besar pula.

2. Analisis Reputasi; yaitu analisis untuk mengidentifikasi pihak berkuasa yang tidak didasarkan pada bagian organisasi resmi akan tetapi pada reputasi kekuasaan mereka secara informal. Hal ini dapat diketahui dengan menanyakan informan-informan yang mengetahui mekanisme politik dari dekat.
3. Analisis keputusan; yaitu analisis untuk mengetahui siapa-siapa yang berkuasa dengan cara mengamati dan meneliti siapa-siapa yang ikut mengambil keputusan melalui beberapa kasus pengambilan keputusan yang dianggap cukup *representative*.

4.3 Wewenang

Wewenang merupakan kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Wewenang yang dalam istilah umum disebut sebagai *authority* atau *legalized power*, diartikan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, dan menyelesaikan pertentangan. Kekuasaan tanpa wewenang dapat dianggap kekuatan yang tidak sah oleh masyarakat. Kekuasaan harus mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar kekuasaan tersebut memiliki wewenang. .

Pengertian wewenang muncul di saat masyarakat mulai membagi tata kelola kekuasaan dan menentukan penggunaannya, namun bukanlah hal yang mudah sehingga belum ada yang berhasil dengan sadar mengatur setiap macam kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu menjadi wewenang karena tidak mungkin setiap macam kekuasaan menjelma menjadi wewenang, tingkatan kekuatan masyarakat akan menjadi kaku, sehingga tidak dapat mengikuti masyarakat yang dinamis.

Bentuk-bentuk Wewenang

Bentuk-bentuk wewenang secara umum, terbagi atas empat bentuk, yaitu :

Wewenang karismatik, tradisional dan rasional (legal) ; wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Orang-orang lain mengakui akan adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, oleh karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut berada diatas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya. Wewenang kharismatik, tidak diatur oleh kaidah-kaidah yang tradisional maupun rasional ; sifatnya adalah irasional. Tidak jarang terjadi bahwa kharisma yang dimiliki seseorang itu dapat hilang, seiring dengan dinamika dan perkembangan masyarakat yang memungkinkan terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat sehingga ada perbedaan-perbedaan faham dari berbagai nilai yang tadinya disepakati bersama.

Wewenang tradisional, dapat dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Namun sumbernya bukan dari kemampuan-kemampuan khusus seperti yang ada pada wewenang kharismatik. Wewenang tradisional diwariskan secara turun temurun dan mempunyai ciri-ciri utama yaitu :

- a. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat.
- b. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi.
- c. Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

Kepercayaan serta kehormatan yang diberikan kepada mereka yang mempunyai wewenang tradisional biasanya mempunyai fungsi yang memberikan ketenangan pada masyarakat dalam arti bahwa, masyarakat selalu mengikat dirinya pada tradisi. Wewenang tradisional dapat berkurang atau hilang, karena tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan demikian maka wewenang yang menyandarkan diri pada tradisi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat.

Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang bersandar pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini diartikan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditaati bersama, dan bahkan telah diperkuat oleh negara. Namun harus dilihat, apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau faktor lain, kemudian ditelaah pula hubungannya dengan sistem kekuasaan serta diuji apakah sistem hukum tersebut cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat, agar supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan tenteram.

Di dalam Masyarakat yang relatif demokratis, maka orang-orang yang memegang kekuasaan diberi kedudukan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas, agar supaya orang-orang yang memegang kekuasaan dapat menyelenggarakannya sesuai dengan kepentingan masyarakat.

1. Wewenang Resmi dan Tidak Resmi

Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang bersifat tetap dan tegas. Demikian juga dengan hak dan kewajiban serta peranan para anggota ditentukan dan ditetapkan dengan tegas.

Wewenang tidak resmi bersifat spontan, situasional dan didasarkan pada faktor saling kenal mengenal dan tidak diterapkan secara sistematis. Wewenang tidak resmi timbul dalam hubungan-hubungan antar pribadi dan ditentukan oleh pihak-pihak yang berhubungan.

2. Wewenang Pribadi dan Teritorial

Wewenang pribadi sangat tergantung dari solidaritas dan rasa kebersamaan yang tinggi dari anggota-anggota suatu kelompok ; individu-individu dianggap lebih banyak memiliki kewajiban-kewajiban daripada hak-hak. Struktur wewenang bersifat konsentris, artinya dari satu titik pusat lalu meluas melalui lingkaran-lingkaran wewenang tertentu. Setiap lingkaran wewenang dianggap mempunyai kekuasaan penuh di wilayahnya masing-masing.

Wewenang teritorial ditentukan oleh wilayah tempat tinggal. Pada kelompok ini, unsur kebersamaan cenderung berkurang, oleh karena desakan-desakan dari faktor individual. Hal ini bukan berarti bahwa kepentingan-kepentingan perorangan diakui dalam kerangka kepentingan-kepentingan bersama. Pada wewenang teritorial ada kecenderungan untuk mengadakan sentralisasi wewenang yang memungkinkan hubungan yang langsung dengan para warga kelompok.

Walaupun wewenang pribadi dan wewenang teritorial ini merupakan bentuk wewenang dengan substansinya masing-masing, namun dalam hal berbagai keadaan kedua bentuk wewenang tersebut, dapat saja hidup secara berdampingan.

3. Wewenang Terbatas dan Menyeluruh

Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan. Tetapi hanya terbatas pada salah satu

sektor atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama negara menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, tetapi jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya.

Wewenang menyeluruh, berarti wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh : setiap warga negara mempunyai wewenang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Jadi, apakah suatu wewenang bersifat terbatas atau menyeluruh tergantung dari sudut pandang pihak yang menyorotinya.

4.4 Kepemimpinan

Menurut arti secara harfiah, pimpin berarti bimbing. Memimpin berarti membimbing atau menuntun. Pemimpin merupakan orang yang membimbing ataupun seorang yang menggunakan wewenang serta mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi.

Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan dari seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Dalam kepemimpinan terdapat dua substansi yaitu kekuasaan dan wewenang. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial (Soekanto, 2017). Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau badan. Sebagai suatu proses, kepemimpinan meliputi segala Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.

Kepemimpinan seseorang (pemimpin) harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau *social basis*. Pertama-tama kepemimpinan erat hubungannya dengan susunan masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang agraris dimana belum ada spesialisasi, biasanya kepemimpinan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat.

Kepemimpinan di dalam masyarakat-masyarakat hukum adat yang tradisional dan homogen, perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat tersebut yang masih tegas-tegas memperlihatkan ciri-ciri paguyuban. Hubungan pribadi antara pemimpin dengan yang dipimpin sangat dihargai. Hal ini disebabkan pemimpin-pemimpin pada masyarakat tersebut adalah pemimpin=pemimpin tidak resmi *informal leader* yang mendapat dukungan tradisi atau karena sifat-sifat pribadinya yang menonjol. Dengan sendirinya masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin tersebut, beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkannya.

Tugas pokok seorang pemimpin :

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat. Dengan adanya kerangka pokok yang jelas, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata).
2. Mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin bangsa, harus aktif dalam menyalurkan ide-ide kecil masyarakat yang ia pimpin, tidak memilah mana yang didahulukan, ia harus bisa membagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Semua diberlakukan sama.
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia diluar kelompok yang dipimpin. Pemimpin harus bisa bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat, baik yang tidak

memilih dia, ataupun yang memilihnya pada saat pemilihan berlangsung. Begitu juga berlaku adil, tidak hanya pada kelompok yang ia pimpin, kelompok yang diluar ia pimpin pun, sudah sewajarnya memberikan aura positif. Seorang pemimpin juga bisa menerapkan bagaimana proses kepemimpinan itu ingin ia jalankan.

Ciri kepemimpinan dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu:

1. Pemimpin instrumental (*instrumental leader*) atau pemimpin yang berorientasi pada tugas (*task oriented leader*), berupaya agar kelompok tetap bergerak kea rah tujuannya. Pemimpin ini mencoba mencegah anggota agar tidak teralihkan, mengingatkan mereka aka napa yang mereka coba capai.
2. Pemimpin ekspresif (*expressive leader*) atau pemimpin sosioemosional (*socioemocional leader*), biasanya tidak diakui sebagai pemimpin tetapi nyatanya ia seorang pemimpin. Orang ini cenderung bergurau, untuk menawarkan simpati atau melakukan hal lain yang mengangkat semangat kelompok.

Kedua tipe ini penting sebab, yang pertama menjamin kelompok tetap pada jalurnya, sedangkan yang kedua meningkatkan kerukunan dan membatasi konflik. Gaya kepemimpinan (*leadership style*) yang dapat dianut menurut Henslin (2006) adalah:

1. Pemimpin otoriter (*authoritharian leader*), yaitu pemimpin yang tidak memberi kesempatan pada bawahannya untuk bertanya ataupun meminta penjelasan, dengan ciri-ciri pokoknya :
 - a. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak.
 - b. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.

- c. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok tersebut.
2. Pemimpin demokratis (*democratic leader*) yaitu pemimpin yang memberi kesempatan bawahannya berdiskusi, dengan ciri-ciri:
 - a. Secara musyawarah dan mufakat pemimpin mengajak warga atau anggota kelompok untuk ikut serta merumuskan tujuan-tujuan yang harus dicapai kelompok, serta cara -cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
 - b. Pemimpin secara aktif memberikan saran dan petunjuk-petunjuk.
 - c. Ada kritik positif, baik dari pemimpin maupun pengikut-pengikut.
 - d. Pemimpin secara aktif ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan kelompok.
3. Pemimpin liberal atau *laissez-faire*, yaitu pemimpin yang membiarkan kondisi yang ada pada bawahannya atau kebebasan tanpa pengendalian, dengan ciri-ciri :
 - a. Pemimpin menjalankan peranannya secara pasif.
 - b. Penentuan tujuan yang akan dicapai kelompok sepenuhnya diserahkan kepada kelompok.
 - c. Pemimpin hanya menyediakan sarana yang diperlukan kelompok
 - d. Pemimpin berada ditengah-tengah kelompok, namun hanya berperan sebagai penonton.

Di Cina, Lao-tzu menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki kemampuan melepaskan nafsu sendiri, melepaskan egonya demi kepentingan pengikutnya. Seperti langit dan bumi yang tidak mewakili diri sendiri tetapi mewakili keseluruhan alam, seorang pemimpin sebagai wakil para pengikutnya, bahkan mewakili harmoni semesta, mewakili Dao, tata kelola alami yang sejak awal mula menata alam semesta. Jauh sebelum manusia diciptakan. Contoh bias, diibaratkan bahwasanya pemimpin adalah angin dan pengikut adalah

rumput. Angin bertiup, maka rumput mengikuti gerak angin sehingga jika pemimpin menuju jalan yang tidak benar, maka pengikutnya akan berlaku tidak benar pula. Jadi, pemimpin adalah harmonisasi, kesediaan dan fleksibilitas mengikuti alam.

Di Indonesia, kepemimpinan juga ditemukan *dalam Asta Brata*, yaitu kitab yang berisikan nasehat-nasehat Sri Rama (dalam kumpulan seloka Ramayana) kepada adiknya untuk menjadi pemimpin yang baik. Nasehat-nasehat tersebut dinamakan *Asta Brata* (artinya delapan jalan), yaitu :

1. *Indra-Brata*, yang memberi kesenangan dalam jasmani
2. *Yama-Brata*, yang menunjuk pada keahlian dan kepastian hukum.
3. *Surya-Brata*, yang menggerakkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja persuasif
4. *Caci-Brata*, yang memberi kesenangan rohani
5. *Bayu-Brata*, yang menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan-segan untuk turut merasakan kesukaran-kesukaran dari pengikut-pengikutnya.
6. *Dhana-Brata*, menunjukkan pada suatu sikap yang patut dihormati.
7. *Paca-Brata*, yang menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian dan keterampilan.
8. *Agni-Brata*, yaitu sifat memberikan semangat kepada anak buah.

Kepemimpinan yang tersimpul dalam *Asta Brata* pada pokoknya menggambarkan sifat-sifat dan kepribadian delapan Dewa menurut mitologi Indonesia. Sifat-sifat tersebut dapat diterapkan dalam kepemimpinan yang moderen (Soekanto, 2017).

Kepemimpinan tradisional Indonesia, yang terdapat dalam pepatah Jawa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu :

Dimuka memberi teladan
Ditengah-tengah membangun semangat
Dari belakang memberikan pengaruh

Pepatah ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin dapat menempati ketiga kedudukan tersebut, yaitu sebagai pemimpin dimuka (*front leader*), pemimpin di tengah-tengah (*social leader*) dan sebagai pemimpin dari belakang (*rear leader*). Kepemimpinan tradisional ini masih tetap dipertahankan terutama pada masyarakat-masyarakat tradisional yaitu masyarakat-masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Henslin, James M., 2006. *Essensial of Sociology To Down Earth Approach* (book alone). Pearson Education Inc. Dialih bahasakan oleh Kamanto Sunarto, 2011. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta. Erlangga.
- Gary Yukl, 1994. *Leadership in Organization. Thried Edition*. Pearsen Pretice Hall.Inc
- Nurrahmi Hayani, 2014. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru. Beneteng Media.
- Max Weber, 1947. *Essay in Sociology*, Oxford University Press . Diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea. *Sosiologi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Robbins S.P. 1996. *Perilaku Organisasi, Kontroversi, Aplikasi*. Aneka Bahasa Indonesia. Jakarta PT.Prenhallindo.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta. Kecana.
- Soekanto Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi Cet.48.

BAB 5

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Oleh Herlyna Novasari Siahaan

5.1 Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat desa diartikan sebagai upaya pembangunan sumberdaya manusia yang melibatkan partisipasi masyarakat desa untuk menemukan potensi dan kemampuan guna mendapatkan manfaat yang lebih baik melalui peningkatan dari keadaan sebelum dilakukannya pemberdayaan dengan menerapkan prinsip keadilan dan kebersamaan. Secara harafiah, pemberdayaan berasal dari kata "power" yang artinya kekuasaan. Pemberdayaan menunjukkan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan. Pemberdayaan masyarakat biasanya ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin, dengan tujuan setelah dilakukannya pemberdayaan menjadi memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Empowerment* (pemberdayaan masyarakat) mencakup nilai-nilai sosial dalam pembangunan yang berpusat pada partisipasi (*people centered participatory*), proses pemberdayaan (*empowering*) dan keberlanjutan (*sustainability*) (Chambers, 1995)

UU nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu Upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya melalui program, kegiatan, pendampingan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dimaknai sebagai upaya menempatkan komunitas masyarakat sebagai subyek atau orang yang berpartisipasi aktif untuk melakukan kegiatan pemberdayaan secara mandiri dengan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, mengontrol sumberdaya yang ada di dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah secara mandiri sehingga masyarakat diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemberdayaan adalah proses memberi daya, memberi kuasa (*power*), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri masyarakat tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Nasdian, 2014). Sehingga masyarakat sebagai penerima pemberdayaan dengan tujuan mendapatkan kemandirian secara ekonomi, peningkatan kemampuan dan potensi dalam masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan, ada 2 kecenderungan proses dalam pemberdayaan yaitu :

1. Kecenderungan primer

Proses pemberdayaan yang menekankan pada pemberian sumberdaya, kemampuan, kekuasaan kepada masyarakat agar lebih berdaya dengan upaya membangun aset material guna mendukung kemandirian.

Misalnya, ketika pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan produktivitas lahan untuk kegiatan usahatani maka dalam kegiatan pemberdayaan tersebut diberikan Traktor untuk kemudahan saat mengolah usahatani.

2. Kecenderungan sekunder

Proses menekankan pada stimulasi dan motivasi kepada masyarakat yang diberdayakan agar mempunyai

kemampuan melalui proses dialog. Hal ini berkaitan dengan pemberian sosialisasi, bimbingan teknis pada proses pemberdayaan. Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan bersama-sama, namun yang sering terjadi di masyarakat desa bahwa kecenderungan primer dilakukan lebih dahulu untuk mendukung kecenderungan sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. *Targeted*

Upaya pemberdayaan harus terarah kepada penciptaan suasana yang memungkinkan untuk tujuan potensi masyarakat dapat berkembang dengan tujuan untuk mengatasi masalahnya sesuai kebutuhannya.

- a. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat agar program pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan keberdayaan (*empowering*) sebagai upaya peningkatan kemampuan dan ekonominya.
- b. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara individual masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri. Disamping itu kemitraan usaha antar kelompok dengan kelompok yang lebih baik saling menguntungkan dan memajukan kelompok.

(noor, 2011) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dikaji dari 3 aspek yaitu :

1. *Enabling*

Upaya untuk menggali potensi di dalam masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

2. *Empowering*

Upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang dilakukan untuk membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling utama dalam *empowerment* ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang mampu mengelola sendiri kebutuhan sandang, pangan dan papan melalui peningkatan pengetahuan dan peningkatan ekonomi masyarakat . Empowering yang terpenting adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya

3. *Protecting*

Upaya untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah dengan cara mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang atas yang lemah yang nantinya bertujuan untuk memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

5.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu (1) Mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat dari masyarakat lemah, miskin dan marjinal yang biasanya terdiri kelompok petani kecil, buruh tani, masyarakat desa yang didiskriminasi oleh karena keadaannya. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi mencakup pangan, pakaian, Kesehatan, Pendidikan dan transportasi. Kemiskinan juga diartikan dari keterbelakangan masyarakat desa melalui produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, dan pemanfaatan potensi serta sumberdaya yang belum maksimal. Selain itu juga untuk (2) memberdayakan kelompok masyarakat sehingga

secara sosial dan ekonomi dapat lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pemberdayaan (Franklin, 2015)

Sulistiyani (2004) dalam (sarinah, 2019) menyatakan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk komunitas masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan dan kemampuan sehingga menjadi mandiri untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang ada sebelum dilakukannya pemberdayaan masyarakat

Marikanto (2010) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan hal-hal berikut :

1. Perbaikan kelembagaan berkaitan dengan administrasi kelembagaan komunitas masyarakat desa yang berkaitan dengan legalitas
2. Perbaikan usaha berkaitan dengan pengembangan usaha maupun penerapan hilirisasi produk yang dihasilkan masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada di masyarakat
3. Perbaikan pendapatan berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat
4. Perbaikan kehidupan berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat setelah memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu meningkatkan perekonomian maka akan terjadi perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

5.3 Prinsip Pemberdayaan

Najiyat, et al. (2014) menyatakan prinsip-prinsip dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan.

1. Kesetaraan

Kesetaraan mengandung arti tingkatan, derajat, kedudukan yang sama. Prinsip inilah yang menjadi hal yang utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga pemberi program pemberdayaan dan penerima program adalah sama tingkatannya dimana masing-masing individu tentu memiliki pengalaman, kemampuan dan sumberdaya yang berbeda-beda dan inilah yang dibangun di dalam dinamika kelompok untuk saling belajar satu dengan yang lainnya. Pemberi program tidak bisa menganggap masyarakat sebagai pembelajar yang harus diajari dengan berbagai pengalaman dan ilmu pengetahuan, karena di sisi yang berbeda tentu penerima program sudah memiliki sebuah potensi kearifan lokal yang belum diketahui oleh pendatang dan itu juga menjadi hal baru bagi pemberi program pemberdayaan masyarakat.

2. Partisipatif

Hal ini berkaitan dengan peran aktif masyarakat yang diberdayakan melalui program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi dapat dibangun dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan program pemberdayaan. Misalnya sebuah lembaga melakukan program pemberdayaan dengan tujuan peningkatan masyarakat desa untuk menjadikan desa wisata, dimana yang mengetahui potensi dari desa tersebut adalah masyarakat itu sendiri sehingga dibutuhkan partisipasi aktif untuk mengembangkan potensi yang ada dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya dalam program pemberdayaan.

3. Kemandirian

Kemandirian berarti mampu tanpa bantuan orang lain bukan hanya mampu ketika program pemberdayaan berjalan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan melalui transfer ilmu pengetahuan, sehingga ketika program pemberdayaan

selesai masyarakat menjadi mampu dan mandiri. Bantuan atau sumberdaya yang diberikan sebagai pendukung untuk tercapainya kemandirian masyarakat, sehingga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat program pemberdayaan untuk mengembangkan kemampuan komunitas masyarakat bukan sebagai alat untuk mendapatkan bantuan.

4. Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu secara terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, pemberdayaan harus dilakukan secara intensif, menyeluruh dan tepat sasaran. Ketika program pemberdayaan ditujukan pada komunitas masyarakat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentu masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat. Ketika sudah mandiri, maka kelompok masyarakat tentu akan berusaha untuk mengembangkan usaha dari hasil pemberdayaan sehingga akan secara terus menerus berlanjut dan tidak hanya berbasis agenda pemberdayaan saja.

Hal-hal yang menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip pemberdayaan yaitu keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan program mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan program hingga mengelola hasil pemberdayaan.

5.4 Contoh Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat desa sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, BUMN, Lembaga masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan

taraf hidup masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan pedesaan yang berkualitas bagi masyarakatnya baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sunyoto Usman (2004), program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui program pembangunan pedesaan yaitu :

1. Pembangunan pertanian

Masyarakat desa yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani, pemberdayaan ini sangat dibutuhkan karena dengan program pembangunan pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani.

2. Industrialisasi pedesaan

Program industrialisasi pedesaan bertujuan untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan untuk mendapatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi produk pertanian.

3. Pembangunan masyarakat desa terpadu

Program pembangunan masyarakat terpadu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat kemandirian masyarakat desa. Unsur pembangunan masyarakat desa terpadu yaitu: pembangunan pertanian dengan padat karya yaitu menggunakan banyak tenaga kerja manusia masyarakat desa, menciptakan industri di desa sehingga membuka banyak kesempatan kerja bagi pencari kerja, dan mengembangkan kelembagaan masyarakat desa agar berkolaborasi dengan berbagai pihak contohnya investor yang ingin berinvestasi di desa

4. Program pusat pertumbuhan bertujuan untuk menentukan jarak ideal antara pedesaan dengan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Cara yang ditempuh adalah membangun pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat

penampungan hasil produksi desa, dan pusat informasi tentang hal-hal berkaitan dengan keinginan konsumen dan kemampuan produsen. Pusat pertumbuhan diupayakan agar secara sosial tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mempunyai fungsi dan sifat-sifat seperti kota.

Bentuk program pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan

Pemberdayaan bidang kelembagaan berkaitan dengan pembuatan persyaratan legalitas usaha kelompok. Dengan adanya legalitas kelembagaan memungkinkan kelompok masyarakat menjadi berkembang. Pemberdayaan bidang kelembagaan dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi cara pembuatan legalitas kelompok atau organisasi

2. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui sumberdaya atau potensi yang ada di masyarakat. Misalnya komunitas masyarakat desa memiliki potensi aren, program pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan membuat hilirisasi produk pertanian, misalnya mengolah aren menjadi gula merah, kolang-kaling, sehingga adanya peningkatan nilai tambah produk yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

3. Pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi

Pemberdayaan di bidang teknologi mencakup digitalisasi teknologi informasi. Misalnya, dalam sebuah komunitas masyarakat desa seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun koperasi di dalam pengelolaan kelembagaan petani dibutuhkan pemberdayaan terkait teknologi informasi.

4. Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan

Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan bertujuan untuk menambah kemampuan dan pengetahuan masyarakat. Bentuk pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, maupun *focus group discussion*.

Bentuk pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan mencari potensi dan sumberdaya yang ada di masyarakat. Desa terdiri dari kekayaan alam sebagai sumber produksi, sebagai bahan baku industri, dan sebagai penyedia tenaga kerja. Ketika sudah mengetahui potensi yang ada di masyarakat, lalu dibutuhkan Analisa awal permasalahan yang menyebabkan sumber daya tidak dimanfaatkan secara maksimal yang kemudian mencari solusi permasalahan dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat. Contohnya di sebuah desa dataran tinggi memiliki banyak areal persawahan dengan komoditas tanaman pangan dan hortikultura, masyarakat desa dalam melakukan usaha budidaya tanaman masih secara individu (belum membentuk kelembagaan petani) sehingga tidak ada transfer ilmu dan pengalaman antar sesama petani yang menyebabkan produktivitas rendah. Kemudian dari permasalahan tersebut dapat dilakukan program pemberdayaan mulai dari sektor hulu yang mencakup petani dan kelembagaan petani. Berdasarkan permasalahan tersebut memberikan sosialisasi tentang kelembagaan petani, apa keuntungan dan kemudahan yang didapatkan dengan membentuk kelembagaan dan melengkapi administrasi kelembagaan petani, kemudian melakukan pemberdayaan dari sektor usahatani, melalui program hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk dan peningkatan pendapatan. Saat masyarakat mau berpartisipasi aktif, tentu akan diperoleh peningkatan pengetahuan, peningkatan ekonomi di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1995). "Rural Development." Putting the Last First
London: New York: Longman.
- Franklin, 2015. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Desa
Nawang Baru Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat desa
(BPMD) di Kabupaten Malinau. *eJournal Ilmu Pemerintahan*,
3(2), pp. 1324-1338.
- Mardikanto, T (2010). Pemberdayaan masyarakat desa.
Surakarta : UNS Press
- najiyat, asmana & suryaadiputra, 2014. "*Pemberdayaan Masyarakat di
Lahan Gambuy*". s.l.:s.n.
- noor, m., 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), pp.
87-99.
- sarinah, e. a., 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi
Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran
Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat, Universitas galuh
Pangandaran*, 5(4), pp. 267-277.
- Sunyoto Usman, 2004, Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

BAB 6

PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Lili Winarti

6.1 Pendahuluan

Pendidikan menurut pada pasal 1 dan 3 tentang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan, guna menciptakan warga negara yang bermartabat, beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Dan tujuan dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang beriman, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan non formal merupakan bentuk pendidikan yang menempatkan perhatian pada pembelajaran di luar struktur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pendekatan ini memiliki fokus yang jelas, yaitu pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengangkat kualitas hidup dan kemampuan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih dari sekadar menyampaikan pengetahuan akademis, pendidikan non formal berusaha menghadirkan pembelajaran yang praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sub bab ini menjadi penting karena mengungkapkan peran krusial pendidikan non formal dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan akses ke pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif, pendidikan non formal menciptakan kesempatan bagi berbagai kalangan dan kelompok dalam masyarakat untuk mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan daya saing. Khususnya, pendidikan non formal memberikan manfaat besar bagi kelompok-kelompok marginal dan perempuan yang seringkali tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Melalui program pelatihan keterampilan, kursus, dan kelompok diskusi, pendidikan non formal memberikan wadah untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat rasa solidaritas sosial.

Pendidikan Non Formal dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan telah menjadi topik yang semakin relevan dan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi ketimpangan di pedesaan. Dalam konteks pedesaan, akses terhadap pendidikan formal seringkali terbatas oleh sejumlah faktor seperti jarak, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan ekonomi. Namun, pendidikan non formal muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pedesaan dengan cara yang inklusif dan relevan dengan konteks dan realitas mereka. Pendidikan non formal memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil tetap mempertimbangkan kendala yang mereka hadapi.

6.2 Definisi, Fungsi dan Karakteristik Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal adalah suatu bentuk pembelajaran yang berlangsung di luar struktur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Konsep pendidikan non formal mencakup

pembelajaran yang bersifat sadar, terencana, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu dalam aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Ciri-ciri penting pendidikan non formal adalah fleksibilitas, adaptabilitas, dan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Menurut (Daulay, H.P., dan Pasa, 2012), pendidikan nonformal adalah pendidikan yang berlangsung di luar jam sekolah dan diatur oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pendidikan keterampilan, pendidikan keagamaan, kursus-kursus, dan lain sebagainya. Dan menurut (Rahmat, 2018) menjelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan dan terstruktur secara sistematis (dengan penekanan pada peningkatan keterampilan) di luar kerangka teknologi pendidikan formal di sekolah. Meskipun memiliki variasi dalam waktu, tempat, sumber daya, dan peserta belajar yang beragam, pendidikan nonformal tetap diarahkan dan memiliki tujuan yang jelas.

Perbedaan antara pendidikan non formal, formal, dan informal adalah hal yang perlu dipahami dengan baik. Pendidikan formal adalah proses pembelajaran yang diatur oleh kurikulum resmi dan memiliki tingkatan pendidikan yang jelas. Sementara itu, pendidikan non formal memberikan pembelajaran tanpa terikat oleh kurikulum formal dan bersifat lebih fleksibel dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan informal berlangsung secara spontan dan tidak terstruktur, seringkali terjadi di lingkungan sehari-hari tanpa adanya rencana atau program pembelajaran yang khusus.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nonformal mencakup dua hal, yaitu (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan sebagai alternatif, tambahan, atau pelengkap dari pendidikan formal, dengan tujuan mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik dengan fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang professional

Menurut (Sudjana, 2010), ada 3 fungsi pendidikan nonformal meliputi:

1. Komplement (pelengkap) pendidikan sekolah, di mana pendidikan nonformal menyediakan kurikulum tetap yang dibutuhkan sesuai dengan situasi daerah dan masyarakat. Peserta didik pada lembaga pendidikan formal dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal seperti kursus komputer, bahasa asing, dan kursus kepribadian.
2. Suplement (tambahan), di mana pendidikan nonformal memberikan kesempatan bagi mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan formal, namun ingin meningkatkan pemahaman lebih lanjut dalam tempat dan waktu yang berbeda. Misalnya, bimbingan belajar dan les privat menjadi alternatif bagi mereka yang merasa perlu memperdalam pengetahuan dan keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan formal.
3. Substitusi (pengganti) pendidikan sekolah, di mana pendidikan nonformal dapat menggantikan fungsi sekolah terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program pendidikan formal. Bagi warga masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga pendidikan formal atau menghadapi putus sekolah (DO) dari pendidikan formal, pendidikan nonformal menjadi alternatif yang memungkinkan mereka untuk tetap mengakses pendidikan.

Karakteristik Pendidikan nonformal memiliki ciri-ciri unik yang membedakannya dari pendidikan formal atau sekolah, tetapi keduanya saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. (Abdulhak, Ishak dan Suprayogi, 2012) menjelaskan

karakteristik-karakteristik dari pendidikan nonformal sebagai berikut:

1. Berorientasi pada keterampilan yang segera diterapkan. Pendidikan nonformal menekankan pembelajaran yang fungsional sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan mereka.
2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan nonformal, peserta didik menjadi inisiator dan pengendali dari proses pembelajaran mereka sendiri.
3. Waktu penyelenggaraannya relatif singkat dan tidak berkesinambungan.
4. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan secara terbuka, dengan banyaknya keterlibatan peserta didik dalam menentukannya.
5. Menggunakan metode pembelajaran yang berbasis partisipasi, dengan fokus pada belajar mandiri.
6. Hubungan antara pendidik dan peserta didik bersifat mendatar, di mana pendidik berperan sebagai fasilitator bukan sebagai instruktur. Hubungan yang bersifat informal dan akrab membuat peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan mitra belajar.
7. Penggunaan sumber-sumber lokal. Mengingat keterbatasan sumber daya untuk pendidikan, pendidikan nonformal berupaya menggunakan sumber daya lokal seoptimal mungkin.

Dengan karakteristik-karakteristik ini, pendidikan nonformal menciptakan pendekatan pembelajaran yang berbeda, memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mereka, dan memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran.

Pentingnya pendidikan non formal dalam konteks pemberdayaan masyarakat tidak dapat diabaikan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, pendidikan non formal memberikan akses kesempatan bagi berbagai lapisan masyarakat untuk mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Ini sangat berarti bagi kelompok-kelompok marginal dan perempuan yang seringkali tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal. Melalui program pelatihan keterampilan, kursus, dan kegiatan partisipatif, pendidikan non formal menciptakan wadah untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat rasa solidaritas sosial dalam masyarakat.

6.3 Tantangan dan Peluang dalam mengembangkan pendidikan Non Formal

Mengembangkan pendidikan non formal memberikan tantangan dan peluang yang kompleks. Pertama, tantangan utama adalah mengatasi keterbatasan sumber daya. Program pendidikan non formal sering kali menghadapi keterbatasan dana, fasilitas, dan tenaga pengajar. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas dan skala program yang dapat dijalankan, terutama dalam mencapai daerah terpencil dan masyarakat yang rentan. Selain itu, mengamati kurikulum yang relevan dan memadai juga menjadi tantangan, karena pendidikan non formal harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Namun, dalam tantangan tersebut juga terbuka peluang untuk kreativitas dan inovasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pembelajaran. Kolaborasi dengan mitra dan lembaga lokal juga menjadi peluang dalam memperluas jangkauan program pendidikan non formal. Dengan strategi yang tepat, pendidikan

non formal dapat menjadi wadah untuk menciptakan pendidikan yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Tantangan lain adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat. Terkadang, pendidikan non formal dianggap sebagai alternatif atau opsi terakhir, sehingga tidak mendapatkan dukungan yang cukup dalam hal dana dan regulasi. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan non formal dapat mengurangi minat dan partisipasi dari pihak masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat peluang untuk memperkuat dukungan dan kesadaran tersebut. Melalui kampanye penyuluhan dan advokasi, masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan kontribusi pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, menjalin kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

6.4 Konsep Pemberdayaan dalam Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal sebagai pemberdaya masyarakat harus memiliki program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, pendidikan non formal harus responsif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini memerlukan identifikasi mendalam terhadap kebutuhan masyarakat secara inklusif, sehingga program-program yang disediakan dapat memberikan manfaat nyata dan relevan bagi semua lapisan masyarakat.

Tantangan dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat mengharuskan pendidikan non formal untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Program-program pendidikan non

formal harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan masalah sosial lainnya. Dengan menyediakan pelatihan keterampilan, kursus, dan lokakarya, pendidikan non formal dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan potensi individu dalam menghadapi realitas kompleks dunia kerja.

Selain itu, pendidikan non formal juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan tren global yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan program pendidikan non formal kepada masyarakat yang lebih luas. Keterampilan digital dan pemahaman teknologi juga menjadi hal penting yang harus diberdayakan dalam program pendidikan non formal guna meningkatkan daya saing dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi era digital ini.

Kesesuaian program-program pendidikan non formal dengan perkembangan masyarakat saat ini merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan non formal, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan program-program yang disediakan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam proses ini, partisipasi aktif dari masyarakat dalam merumuskan program-program pendidikan non formal akan membuka peluang untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengembangan sumber daya manusia di masa depan melalui pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Awalnya, masyarakat cenderung berbasis agraris, namun dengan perkembangan zaman, masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat industri yang lebih maju. Oleh karena itu, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat industri ini, dengan

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat semakin mengarah ke masyarakat informasi yang mengandalkan teknologi digital. Dalam konteks ini, pendidikan harus berinovasi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan dan kesempatan di era masyarakat informasi. Dengan demikian, pendidikan yang sesuai dengan perubahan masyarakat akan menjadi kunci penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan

6.5 Program dan Aktivitas Pendidikan Non Formal dalam Pemberdayaan Masyarakat

a. Program Pelatihan Keterampilan

Program Pelatihan Keterampilan memiliki peran vital dalam meningkatkan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, individu dan kelompok di masyarakat dapat memperoleh keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha. Berbagai program pelatihan keterampilan yang ditawarkan dapat mencakup beragam bidang, seperti keterampilan teknologi informasi, keahlian mekanik, pembuatan kerajinan tangan, dan keterampilan berbahasa asing. Dengan mengikuti pelatihan ini, masyarakat dapat meningkatkan potensi diri mereka dalam berbagai sektor dan memperoleh kesempatan baru untuk berkontribusi dalam perekonomian secara berarti.

Contoh dari Program Pelatihan Keterampilan adalah "Program Kewirausahaan untuk Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)." Program ini menawarkan pelatihan dan pembinaan bagi para calon wirausaha dalam berbagai sektor bisnis, seperti kuliner, kerajinan, dan jasa. Peserta akan diajarkan tentang manajemen bisnis,

perencanaan strategis, dan pemasaran untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui pelatihan ini, para peserta dapat mengasah keterampilan mereka dalam berwirausaha dan mempersiapkan diri untuk menjalankan usaha mandiri

b. Kursus dan Workshop Peningkatan Kapasitas

Dalam sektor pertanian, kursus dan workshop berperan sentral dalam meningkatkan kapasitas individu dan kelompok petani dalam memahami isu-isu sosial yang relevan dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam industri pertanian. Program-program ini memberikan peluang bagi petani untuk memperoleh pengetahuan tentang praktik pertanian yang berkelanjutan, teknologi modern, dan inovasi terbaru dalam bidang pertanian. Selain itu, kursus dan workshop juga membahas isu-isu sosial seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kesejahteraan petani.

Contoh Implementasi di Pertanian: "Kursus Praktik Pertanian Berkelanjutan" adalah program yang memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan. Para peserta mempelajari cara mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menggantinya dengan metode pengendalian organik, memanfaatkan kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah, serta mengimplementasikan pola tanam rotasi untuk mengurangi risiko erosi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan.

c. Kelompok Diskusi dan Komunitas Belajar

Kelompok diskusi dan komunitas belajar memiliki peran penting sebagai wadah untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan memperkuat rasa saling mendukung di antara anggotanya. Dalam kelompok ini, individu dapat berinteraksi secara intensif, berdiskusi

tentang topik-topik yang relevan, dan memperluas wawasan mereka melalui perspektif-perspektif yang berbeda. Komunikasi dua arah ini menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan merasa dihargai. Sebagai salah satu contoh: ada seorang petani yang berhasil mengatasi masalah hama tanaman dengan metode organik berbagi pengalamannya dengan anggota lain, dan hal ini menjadi inspirasi bagi mereka untuk mengadopsi praktik yang sama di lahan mereka. Selain itu, dalam kelompok diskusi ini, para petani juga mengatasi masalah bersama, seperti akses ke pasar dan permodalan, dengan berdiskusi dan berkolaborasi mencari solusi yang lebih baik. Dalam prosesnya, komunitas ini menjadi wadah yang memperkuat rasa saling mendukung dan membangun solidaritas di antara para petani, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus berinovasi dalam praktik pertanian mereka.

d. Kampanye Kesadaran Masyarakat

Kampanye kesadaran masyarakat memiliki peran utama dalam memberikan penjelasan tentang isu-isu penting yang berdampak pada kehidupan mereka dan mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam penyelesaiannya. Contoh isu yang dapat diangkat melalui kampanye kesadaran masyarakat adalah isu kesetaraan gender.

Contoh Implementasi Kampanye Kesadaran Masyarakat: "Kampanye Kesetaraan Gender untuk Masyarakat Inklusif" adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan mendukung pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan. Kampanye ini menyampaikan informasi tentang hak-hak perempuan, kesempatan yang setara untuk pria dan wanita,

serta mengajak masyarakat untuk menghapuskan stereotip gender yang membatasi peran dan potensi perempuan.

6.6 Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pendidikan Non Formal

a. Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Non Formal

Tantangan pelaksanaan pendidikan non formal melibatkan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah pendanaan yang terbatas. Program pendidikan non formal membutuhkan sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dan menghadirkan fasilitator yang berkualitas. Namun, karena pendidikan non formal seringkali tidak mendapatkan prioritas anggaran yang tinggi, pendanaan yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam menyediakan program yang efektif dan berkelanjutan.

b. Solusi dan Strategi Menghadapi Tantangan

Solusi dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan pelaksanaan pendidikan non formal meliputi:

1. Kolaborasi antarlembaga: Menggalang kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan swasta untuk menyediakan program pendidikan yang lebih komprehensif dan berdampak lebih besar.
2. Pendekatan berbasis masyarakat: Melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan non formal untuk menghadirkan manfaat yang relevan dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Pemanfaatan teknologi informasi: Menggunakan teknologi informasi seperti platform e-learning, aplikasi mobile, dan media sosial untuk memperluas akses belajar dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan program pendidikan.
4. Pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar: Meningkatkan kualitas guru dan fasilitator pendidikan non formal melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam menyampaikan materi.
5. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan: Melakukan evaluasi secara rutin untuk mengukur dampak dan efektivitas program, serta melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhak, Ishak dan Suprayogi, U. (2012). *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Daulay, H.P., dan Pasa, N. (2012). *Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmat, A. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Pada Pendidikan Nonformal*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sudjana. (2010). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Falah Production.

BAB 7

MASYARAKAT MODERNISASI

Oleh Abdi Suprayitno

7.1 Pendahuluan

Masyarakat modernisasi mengacu pada suatu bentuk masyarakat yang mengalami transformasi dan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Konsep ini mencerminkan pergeseran dari masyarakat tradisional yang cenderung memiliki nilai-nilai dan struktur yang konservatif, menuju masyarakat yang lebih terbuka, dinamis, dan terhubung dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, menjadi pendorong utama perubahan dalam masyarakat modernisasi. Internet, media sosial, komunikasi digital, dan inovasi teknologi lainnya telah mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks masyarakat modernisasi, tradisi dan nilai-nilai budaya seringkali dihadapkan pada perkembangan yang pesat. Perubahan ini meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sistem pendidikan, lapangan kerja, struktur keluarga, pola konsumsi, dan hubungan antarindividu. Masyarakat modernisasi juga menghadapi tantangan global, termasuk ketimpangan sosial dan ekonomi, kerentanan lingkungan, dan konflik budaya (Ibrahim, 2019).

Namun demikian, masyarakat modernisasi juga memberikan peluang dan manfaat, seperti akses yang lebih luas terhadap informasi, mobilitas sosial, peluang kerja baru, dan kemajuan dalam sektor ekonomi. Penting untuk mengelola perubahan ini dengan bijaksana agar masyarakat mampu mengatasi tantangan yang muncul dan memanfaatkan potensi positif yang ditawarkan oleh modernisasi.

Dalam bab ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai perubahan sosial, dampak teknologi, tantangan, peran pendidikan, masyarakat inklusif, etika, dan nilai-nilai dalam konteks masyarakat modernisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini serta memberikan wawasan kepada pembaca agar mampu menghadapi dan berkontribusi dalam masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi.

7.2 Perubahan Sosial dalam Masyarakat Modernisasi

Perubahan sosial dalam masyarakat modernisasi melibatkan transformasi yang signifikan dalam pola hubungan, struktur sosial, nilai-nilai, dan gaya hidup masyarakat. Kemajuan teknologi dan proses globalisasi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan sosial ini. Beberapa aspek perubahan sosial dalam masyarakat modernisasi menurut Kusumadinata (2015) adalah dibawah ini:

a) Perubahan Nilai dan Norma Sosial.

Masyarakat modernisasi mengalami pergeseran dalam nilai-nilai dan norma sosial yang dominan. Nilai-nilai tradisional sering kali digantikan oleh nilai-nilai yang lebih berorientasi pada individualisme, materialisme, dan pencapaian kesuksesan pribadi. Sebagai contoh, pentingnya keluarga besar dan kehidupan berkomunitas dapat tergeser

oleh kepentingan individu dan kehidupan pribadi yang lebih terfragmentasi.

b) Mobilitas Sosial.

Masyarakat modernisasi sering mengalami peningkatan dalam mobilitas sosial. Kemajuan di bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi memberikan peluang bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Perubahan ini dapat mengubah struktur kelas sosial dan memberikan kesempatan bagi orang dari latar belakang yang berbeda untuk mencapai kesuksesan.

c) Posisi Perempuan.

Perubahan sosial dalam masyarakat modernisasi juga mencakup pergeseran peran dan posisi perempuan. Perempuan semakin terlibat dalam dunia kerja, memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik. Hal ini menghasilkan perubahan dalam dinamika keluarga, hubungan gender, dan pandangan tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat.

d) Perubahan Struktur Keluarga.

Masyarakat modernisasi cenderung mengalami perubahan dalam struktur keluarga tradisional. Pola keluarga yang lebih kecil dan peningkatan angka perceraian menjadi hal yang umum. Peran individu dalam keluarga dan pola interaksi antara anggota keluarga juga berubah, dengan adanya penekanan pada individualisme dan otonomi pribadi.

e) Urbanisasi.

Pertumbuhan kota dan urbanisasi menjadi karakteristik masyarakat modernisasi. Banyak orang yang bermigrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan

peluang hidup yang lebih baik. Urbanisasi membawa perubahan dalam pola hidup, struktur sosial, dan cara orang berinteraksi.

f) Pluralisme Budaya.

Masyarakat modernisasi sering menjadi semakin pluralistik dalam hal budaya. Globalisasi membawa pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia, dan interaksi antara kelompok budaya menjadi lebih umum. Hal ini menciptakan masyarakat yang lebih beragam, dengan terjadi percampuran dan penggabungan budaya yang lebih banyak.

Perubahan sosial dalam masyarakat modernisasi dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Meskipun perubahan ini membawa peluang dan kebebasan baru, mereka juga dapat menimbulkan tantangan seperti ketidakseimbangan sosial, hilangnya nilai-nilai tradisional, dan perubahan dalam dinamika sosial (Sriyana, 2020). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengelola perubahan ini dengan bijaksana dan mempromosikan nilai-nilai yang memperkuat keadilan sosial, solidaritas, dan kesatuan sosial dalam masyarakat modernisasi.

7.3 Tantangan dalam Masyarakat Modernisasi

Tantangan dalam masyarakat modernisasi melibatkan rangkaian perubahan dan kompleksitas yang dihadapi oleh individu, kelompok, dan masyarakat dalam menghadapi transformasi dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Tantangan utama yang dihadapi dalam masyarakat modernisasi dijelaskan pada dibawah ini:

- a) Modernisasi memberikan peluang ekonomi dan kemajuan, masyarakat modernisasi juga menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan (Jurdi, 2010). Ketidaksetaraan pendapatan, kesenjangan akses terhadap

pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketimpangan dalam akses teknologi dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan konflik dalam masyarakat.

- b) Menurut Atmadja (2010) perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat modernisasi dapat mengancam identitas budaya tradisional. Proses globalisasi dan kemajuan teknologi dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal dan tradisional, serta menimbulkan tantangan dalam mempertahankan keunikan budaya dan identitas lokal.
- c) Perkembangan teknologi dan urbanisasi dalam masyarakat modernisasi sering kali berdampak negatif pada lingkungan (James, 2023). Peningkatan polusi, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan penurunan sumber daya alam menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat modernisasi dalam mencapai keberlanjutan lingkungan, seperti yang dipaparkan oleh Suprayitno (2019) bahwa kesadaran masyarakat terutama pengusaha wisata tidak lagi mempertimbangkan sisi keamanan lingkungan.
- d) Perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat modernisasi dapat menciptakan konflik antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai yang lebih modern (Madiong, 2014). Perbedaan budaya, agama, dan pandangan dunia dapat menyebabkan gesekan sosial dan konflik antarindividu atau kelompok dalam masyarakat modernisasi.
- e) Rusyad (2020) berpendapat bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dan ketergantungan pada media sosial serta perangkat digital dapat menyebabkan masalah seperti isolasi sosial, kecanduan, dan penurunan kualitas interaksi sosial. Hal ini dapat mengganggu hubungan antarindividu dan menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Perkembangan teknologi dan otomatisasi dapat mengubah lanskap pekerjaan dan menciptakan ketidakpastian dalam

karier. Beberapa pekerjaan tradisional dapat digantikan oleh mesin atau kecerdasan buatan, sementara pekerjaan baru dengan keterampilan yang berbeda muncul. Hal ini menuntut penyesuaian dan pembelajaran berkelanjutan bagi individu dalam masyarakat modernisasi (Muary, 2022).

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat modernisasi untuk mencari solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, perlindungan sosial yang kuat, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, serta pemeliharaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan lingkungan dapat membantu masyarakat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam era modernisasi.

7.4 Peran Pendidikan dalam Masyarakat Modernisasi

Peran pendidikan memiliki signifikansi yang besar dalam menghadapi masyarakat modernisasi. Pendidikan memainkan peran yang sentral dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di era modernisasi. Peran pendidikan dalam menghadapi masyarakat modernisasi menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan kemasyarakatan.

Pendidikan berperan dalam menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan dunia modern. Pendidikan yang berkualitas memberikan bekal kepada individu dalam hal keterampilan teknis, berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kemampuan adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja dan masyarakat.

Pendidikan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan ruang bagi eksplorasi ide dan pemecahan masalah. Melalui pendidikan, individu didorong untuk berpikir di luar kebiasaan, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, dan menciptakan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi dalam masyarakat modernisasi (Ali, 2018).

Pendidikan membantu individu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif. Dalam masyarakat modernisasi yang kompleks, individu perlu mampu memahami informasi dengan sikap kritis, memilah fakta dari opini, dan mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan bukti.

Pendidikan berperan dalam memupuk kemampuan kolaborasi dan komunikasi yang efektif (Hilir, 2021). Dalam masyarakat modernisasi yang terhubung secara global, individu perlu mampu bekerja dalam tim yang melibatkan berbagai budaya, berkomunikasi secara efektif melalui berbagai platform, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain.

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab sosial kepada individu. Dalam masyarakat modernisasi yang kompleks, individu perlu memiliki dasar moral yang kuat dan pemahaman tentang implikasi etis dari tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kesenjangan sosial, dan hak asasi manusia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini, individu dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada solusi yang berkelanjutan dalam masyarakat modernisasi.

Melalui peran yang kuat dan holistik, pendidikan dapat membantu individu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam masyarakat modernisasi. Penting untuk

memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, serta memperbarui kurikulum dan metode pengajaran yang relevan dengan tuntutan masa depan. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif dan kemajuan dalam masyarakat modernisasi.

7.5 Masyarakat Inklusif Dalam Era Digital

Masyarakat inklusif dalam era digital mengacu pada masyarakat yang memastikan partisipasi, aksesibilitas, dan kesetaraan bagi semua individu dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari teknologi digital. Ini berarti tidak ada kelompok yang dikesampingkan atau terpinggirkan dalam mengakses, menggunakan, atau memberikan kontribusi dalam lingkungan digital. Berikut adalah beberapa dampak dari masyarakat inklusif dalam era digital menurut (Sriekaningsih, 2020):

- a) Masyarakat memiliki akses universal ke teknologi digital. Upaya dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet dapat diakses dengan setara oleh semua orang.
- b) Masyarakat memiliki kesetaraan akses terhadap informasi dalam era digital. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan informasi yang relevan dan bermanfaat. Tidak ada diskriminasi atau hambatan dalam mengakses informasi berbasis digital.
- c) Masyarakat mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, dan kemampuan semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau menghadapi tantangan aksesibilitas. Desain yang inklusif memastikan bahwa semua

orang dapat menggunakan teknologi dengan mudah dan tanpa hambatan.

- d) Memberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan kepada semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang kurang berpengalaman dalam menggunakan teknologi digital. Keterampilan digital yang kuat membantu mengurangi kesenjangan dan memperkuat inklusi.
- e) Menghormati berbagai kebutuhan, preferensi, dan praktik individu dan kelompok dalam menggunakan teknologi digital. Hal ini melibatkan memastikan bahwa pilihan dan kebebasan individu dihormati dalam lingkungan digital.
- f) Partisipasi yang demokratis dalam pengambilan keputusan terkait teknologi dan memastikan bahwa suara semua kelompok didengar dan dipertimbangkan.

Melalui upaya inklusif ini, masyarakat dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi digital. Masyarakat inklusif dalam era digital memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, dan kesetaraan, serta mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan yang mungkin timbul.

7.6 Etika dan Nilai dalam Masyarakat Modernisasi

Etika dan nilai-nilai memegang peran yang penting dalam masyarakat modernisasi. Masyarakat modernisasi menghadapi berbagai perubahan dan kompleksitas dalam hal sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Dalam situasi ini, etika dan nilai-nilai memberikan pedoman moral dan prinsip yang membantu mengarahkan perilaku dan interaksi dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi dalam masyarakat modernisasi memunculkan berbagai isu etika. Menurut Susanto (2023) dalam penggunaan teknologi, etika terkait dengan privasi, keamanan data, penyalahgunaan teknologi, dan dampak sosial yang

mungkin terjadi. Nilai-nilai seperti integritas, privasi, transparansi, dan tanggung jawab menjadi penting untuk mengatur penggunaan teknologi secara bijaksana.

Masyarakat modernisasi dihadapkan pada tantangan lingkungan yang signifikan. Etika keberlanjutan menjadi penting dalam mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial terhadap lingkungan. Nilai-nilai seperti keadilan lingkungan, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan menjadi dasar bagi keputusan dan tindakan yang mendukung upaya menjaga keseimbangan ekologi.

Isu ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi penting dalam masyarakat modernisasi. Etika keadilan sosial melibatkan upaya untuk memperjuangkan kesetaraan, mendistribusikan ulang sumber daya, dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan sosial menjadi landasan bagi tindakan yang mempromosikan keseimbangan dan inklusi sosial.

Masyarakat modernisasi seringkali menjadi semakin pluralistik dalam hal budaya dan agama. Etika multikulturalisme dan toleransi melibatkan penghargaan terhadap keragaman budaya, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong dialog antarbudaya yang saling menghormati. Nilai-nilai seperti saling pengertian, dialog terbuka, dan kesetaraan menjadi penting dalam mengelola perbedaan dan membangun masyarakat yang harmonis (Barus, Amiruddin dan Kahar, 2021).

Etika profesional dan kode etik memiliki peran penting dalam konteks pekerjaan dan bisnis dalam masyarakat modernisasi. Etika profesional melibatkan tanggung jawab individu terhadap pekerjaannya, integritas, dan kualitas kerja. Kode etik dalam berbagai profesi membantu mengatur perilaku dan memastikan standar etika yang tinggi dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Masyarakat modernisasi sering berupaya memperkuat nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif. Etika partisipasi demokratis melibatkan penghargaan terhadap hak-hak individu, mendengarkan dan menghargai suara semua anggota masyarakat, serta mendorong partisipasi yang demokratis dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan, dan partisipasi menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang kuat dan inklusif.

Dalam masyarakat modernisasi, penting untuk menghadapi perubahan dengan mempertimbangkan etika dan nilai-nilai yang mendukung keadilan sosial, keberlanjutan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman. Etika dan nilai-nilai ini membantu membangun dasar moral yang kuat dalam pengambilan keputusan dan interaksi dalam masyarakat. Dengan menghormati dan mempromosikan etika dan nilai-nilai ini, masyarakat modernisasi dapat menghadapi tantangan dengan bijaksana dan memanfaatkan peluang positif yang ditawarkan oleh perubahan yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. M. (2018) *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media.
- Atmadja, N. B. (2010) *Ajag Bali Gerakan, Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Barus, M. I., Amiruddin and Kahar, S. (2021) *Model Pendidikan Karakter Mahasiswa*. Mandailing Natal: Madina Publisher.
- Hilir, A. (2021) *Pengembangan Teknologi Pendidikan Peranan Pendidik Dalam Menggunakan Media Pembelajaran*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Ibrahim, J. T. (2019) *SOSIOLOGI PEDESAAN*. Malang: UMM Press.
- James, G. (2023) *Pengantar Ekonomi Makro*. Denver: Gilad James Mystery School.
- Jurdi, S. (2010) *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*. Edisi Pert. Kencana.
- Kusumadinata, A. A. (2015) *Pengantar Komunikasi Perubahan Sosial*. Sleman: Deepublish.
- Madiong, B. (2014) *SOSIOLOGI HUKUM Suatu Pengantar*. Edited by Sobirin. Makassar: SAH MEDIA.
- Mansyur, A. R. (2020) 'Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia', *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, pp. 113–123.
- Muary, R. (2022) *Sosiologi: Pengantar, Teori dan Paradigma*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Rusyad, D. (2020) *Virtue-spirited Marketing Success Recipe Pemasaran di Era Informasi*. Bandung: Daniel Rusyad.
- Sriekaningsih, A. (2020) *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sriyana (2020) *Perubahan Sosial Budaya*. Malang: Literasi Nusantara.

Suprayitno, A., Huda, A. M. M. and Muntaha, M. (2019) 'Analisis Rock Mass Rating Di Tepi Pantai Samabe, Pulau Bali', *Jurnal Geosaintek*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS, 5(2), p. 36. doi: 10.12962/j25023659.v5i2.5449.

Susanto, D. (2023) *Etika Bisnis*. Makassar: Tohar Media.

BAB 8

MODAL SOSIAL

Oleh Marhawati

8.1 Pendahuluan

Di era kompetitif ini, peran *human capital* cenderung berperan dominan dalam membangun eksistensi sosial. Modal untuk pembangunan mencakup sumber daya keuangan dan sosial. Di sini, modal sosial tidak dimaksudkan untuk dilihat sebagai sesuatu yang nyata, melainkan sebagai kemampuan setiap orang untuk mendorong kohesi sosial dan kerjasama antar kelompok lokal. Modal sosial didefinisikan dalam studi sosiologis sebagai potensi individu yang diwakili oleh keyakinan, nilai, norma, dan jaringan sosial. Setiap individu memiliki potensi yang dapat diberdayakan secara efektif untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang sedang mereka hadapi.

Masalah utamanya adalah kurang percaya pada kemampuannya sendiri, dan akibatnya, masyarakat melakukan sedikit usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di lingkungan desanya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pembatasan pengertian dan konsep seringkali menjadi kendala. Terlepas dari kenyataan bahwa modal sosial merupakan sumber daya yang prospektif, ia dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial baik secara pribadi maupun kolektif. Setiap orang niscaya memiliki jaringan sosial yang ditandai dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain; jaringan ini mungkin menghasilkan jenis kolaborasi yang dapat meningkatkan mobilitas sosial.

Menurut (Agustinus, Albertus and Pranaka, 2020) Modal sosial adalah prasyarat dalam pembangunan yang harus terwujud. Penyebab utama dari berbagai isu dan inkonsistensi yang ada di berbagai negara adalah keterbelakangan modal sosial. Modal sosial yang lemah akan mengurangi rasa kebersamaan, mengintensifkan kemiskinan, meningkatkan pengangguran dan kejahatan, dan menggagalkan setiap upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Modal sosial adalah komponen jaringan, sikap, dan keyakinan yang membentuk kehidupan sosial dan mendorong keterlibatan agar dapat bekerja lebih sukses sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Jejaring sosial menyediakan kerja sama dan komunikasi, keduanya dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan memiliki efek menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan secara empiris bagaimana pergaulan orang-orang dalam jaringan sosial yang memiliki rasa saling percaya (*multicultural trust*) memperkuat nilai-nilai yang berkaitan dengan kebutuhan untuk saling membantu.

Sampai saat ini, modal sosial dianggap sangat penting untuk kesuksesan dan berperan dalam pertumbuhan masyarakat. Rasa saling percaya, jaringan kerja sama, dan norma semua elemen modal sosial dilihat secara positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, khususnya dalam pertukaran antara negara industri dan negara berkembang (Raga, 2014).

Tiga komponen kunci dari gagasan modal sosial yaitu jaringan, nilai, dan kepercayaan dapat menekankan hubungan kausal antara modal sosial dan kinerja ekonomi dan kesejahteraan individu. tiga gagasan berikut: Kepercayaan (Trust) atau saling percaya yaitu sangat penting untuk keberadaan komunitas mana pun. Komunitas yang tidak saling percaya akan berantakan. Saling percaya secara bertahap berkembang. Ketika peserta saling menghormati dan terbuka satu sama lain, rasa saling percaya akan berkembang. Saling

menghormati dan kejujuran merupakan sub-komponen kepercayaan.

Nilai (*Value*) terkait erat dengan kepercayaan dan jaringan. Nilai akan dihasilkan dari transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nilai bersifat timbal balik, artinya didasarkan pada hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk memastikan bahwa suatu kegiatan tertentu akan menghasilkan manfaat. Jaringan lama yang menjamin keuntungan kedua belah pihak tersebar secara merata, standar keadilan yang melampaui dasar-dasar keadilan juga akan muncul dan dihukum seberat-beratnya.

Model hubungan antara orang-orang dalam masyarakat atau organisasi sosial disebut jaringan (*Network*) atau jaringan. Orang-orang yang saling mengenal, mengingat satu sama lain, berbagi informasi satu sama lain, dan saling membantu dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan masalah membentuk jaringan. Pengetahuan dari jaringan berfungsi sebagai blok bangunan utama untuk mengembangkan kepercayaan strategis. Jejaring dalam konteks modal sosial berhubungan dengan hubungan antar individu atau kelompok (Raga, 2014).

Kehidupan dalam masyarakat desa, modal sosial berpotensi menjadi sumber daya yang berharga bagi daerah pedesaan yang dapat digunakan dalam beberapa cara oleh pemerintah. Modal sosial secara pribadi akan memperoleh kerja sama dalam pengelompokan masyarakat, dan bahkan kerja sama kemasyarakatan yang lebih umum. (Maarif, 2023) mengungkapkan bahwa secara umum ada dua cara untuk mempelajari modal sosial. Pertama, dari perspektif aktor Bourdieu, yang melihat modal sosial memiliki sumber daya yang dapat digunakan oleh aktor tertentu karena kepemilikan jaringan yang eksklusif. Kedua, dari sudut pandang masyarakat yang memandang modal sosial sebagai sumber daya bersama yang dikelola melalui jaringan sosial dan organisasi horizontal.

Coleman mengkaji kedua sudut pandang ini secara mendalam tetapi menggunakan modal sosial yang lebih beragam, seperti ekspektasi, norma, dan hukuman. Dari sudut pandang tersebut di atas, modal sosial dapat dilihat dari sudut pandang penduduk desa sebagai aktor yang berpotensi untuk terlibat dalam kehidupan sosial, yang akan menghasilkan bentuk saling ketergantungan dan kemandirian lokal. Sementara itu, dari perspektif komunitas, hubungan sosial tumbuh di dalam kelompok sosial yang dinamis yang dibangun di atas kepercayaan, nilai, dan jaringan sekaligus berfungsi sebagai agen pengikat kehidupan sosial. Untuk memungkinkan pertemuan sosial yang lebih sering antara warga dan pertukaran informasi dan nilai dan norma sosial yang bervariasi, hubungan sosial akan terbentuk dalam lingkungan kolaborasi yang baik.

Konsep modal sosial (*social capital*) merupakan salah satu prinsip kunci dari model pembangunan manusia karena menurut model ini, orang adalah subyek penting yang mempengaruhi bagaimana pembangunan dilakukan. Bagi masyarakat untuk berkontribusi pada model pembangunan manusia, partisipasi dan kemampuan untuk mengatur sangat penting. Sebenarnya perkembangan kedua kemampuan ini bergantung pada modal sosial yang dimiliki masyarakat.

Dengan semakin ditekankannya pentingnya prakarsa, inovasi, dan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, kekuatan modal sosial dapat menjadi landasan untuk mengembangkan sumber daya sosial. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan harus dimulai dengan identifikasi masalah, melalui perumusan dan pemilihan program, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Gagasan pembangunan desa yang menekankan peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, disebut juga pembangunan konvensional, sangat tidak mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bahkan membatasinya hanya sebagai sasaran atau objek hasil

pembangunan desa. Karena sebagian besar harapan dan keinginan masyarakat tidak terkait dengan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat desa tidak dapat menikmati manfaat pembangunan secara maksimal. Oleh karena itu, pembangunan desa ke depan harus difokuskan pada inisiatif untuk meningkatkan potensi modal sosial sebagai sumber daya sosial agar pembangunan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Keberadaan modal sosial sangat penting dalam pengendalian kemiskinan karena dengan mengentaskan kemiskinan tidak cukup mencakup dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, namun juga perluasan akses sumber daya untuk kehidupan sehari – hari, yang bergantung pada kemampuan masyarakat untuk membentuk jejaring kerja (*network*) dan membangun kepercayaan satu sama lain (*mutual trust*) di kalangan masyarakat. Dengan adanya modal sosial dalam masyarakat pedesaan, maka modal sosial yang dimiliki masyarakat desa akan mendorong atau berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa.

8.2 Definisi Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) dapat diartikan sebagai kapasitas individu untuk berkolaborasi dalam beberapa organisasi untuk mencapai tujuan. Ekonomi *neo-klasik* percaya bahwa aspek budaya perilaku manusia sebagai individu yang rasional dan mementingkan diri sendiri adalah sesuatu yang disediakan atau dikesampingkan, yang menyebabkan sejumlah kelainan dan kegagalan ini (Fukuyama, 1992) dalam (Zuhri, 2020) . Dengan kata lain, budaya memengaruhi semua bidang kehidupan manusia, termasuk perilaku ekonomi, dalam sejumlah cara krusial yang membuat kehidupan ekonomi tidak mungkin dipisahkan dari budaya.

Modal sosial merupakan sumber daya yang dikenal sebagai modal sosial dalam memanfaatkan koneksi dan ikatan antarpribadi untuk memajukan tujuan sosial dan ekonomi. Hubungan tersebut didukung oleh kepercayaan dan konvensi sosial yang mungkin menguntungkan. Individu yang membentuk hubungan sosial akan menciptakan modal sosial baru sebagai lawan dari jenis modal lainnya (Maarif, 2023).

Modal sosial adalah keseluruhan sumber daya dan potensial yang dapat diakses oleh orang atau organisasi berkat jaringan dan koneksi yang dibangun berdasarkan saling pengakuan dan keakraban. Kemampuan komunitas atau individu untuk mempertahankan sebanyak mungkin ikatan sosial disebut sebagai modal sosial. Modal sosial lebih banyak dimiliki oleh orang atau kelompok yang hubungannya lebih luas.

Menurut Piere Bourdieu, definisi modal sosial Jumlah sumber daya, nyata atau virtual, yang terkumpul dalam diri seseorang atau kelompok sebagai akibat dari memiliki jaringan hubungan timbal balik kenalan dan pengakuan yang bertahan lama yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan (Alfiansyah, 2023) Menurut James Coleman, modal sosial adalah kapasitas individu dalam berbagai kelompok dan organisasi untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Menurut Robert D. Putnam dalam (Zuhri, 2020), modal sosial adalah komponen kehidupan sosial termasuk jaringan, konvensi, dan nilai-nilai yang memotivasi orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (dalam Field, 2011: 51).

(Laura *et al.*, 2018) mendefinisikan modal sosial pada hakekatnya aturan atau prinsip tidak tertulis yang memungkinkan kerjasama antar anggota kelompok. Apabila antara anggota kelompok itu mempercayai bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai satu sama lain. Apabila dalam perusahaan semua karyawannya mempunyai satu tujuan dalam keberhasilan perusahaannya dan saling mempercayai menurut

serangkaian norma etis bersama, maka dalam berusaha hanya menyiapkan sedikit dana untuk membangun usahanya.

Modal sosial merupakan salah satu faktor penting yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam modal sosial mempunyai komponen - komponen atau unsur contohnya rasa saling percaya (*trust*), norma-norma, dan jejaring yang memiliki peran menyelesaikan persoalan bersama (Azizah and Raharjo, 2020). Peran komponen - komponen modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat pernah diriset oleh (Subagyo and Legowo, 2021) yang membuktikan bahwa komponen - komponen dalam modal sosial berperan dalam menyelesaikan masalah yang sering terjadi untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa.

8.3 Unsur dan Komponen Modal Sosial

Kepercayaan (*Trust*), nilai dan norma (*Norms*), dan jaringan sosial (*Networks*) adalah tiga komponen utama, sumber daya, dan komponen kunci yang membentuk modal sosial. Ketiga unsur modal sosial tersebut dijelaskan sebagai berikut:

8.3.1 Kepercayaan (*Trust*)

Menurut (Maarif, 2023), kepercayaan biasanya dipahami sebagai keyakinan yang dimiliki oleh subjek yang tergabung dalam suatu jaringan dimana mereka tidak akan merugikan satu sama lain, melanggar komitmen, atau terlibat dalam penipuan. Di sisi lain, mereka akan saling mendukung dalam hal kesadaran, sikap, dan perilaku untuk mencapai tujuan kesadaran untuk kesejahteraan bersama. Kepercayaan, di sisi lain, adalah sikap siap menerima dan mengabaikan adanya bahaya di masa depan, menurut Casson dan Godley. Kita akan lebih mudah mengembangkan kemitraan kooperatif jika kita mulai dengan kepercayaan. Ikatan kerja sama semakin kuat semakin banyak kepercayaan yang dibangun (Maarif, 2023).

Homogenitas, susunan populasi, dan ketidaksetaraan semuanya memengaruhi kepercayaan. Akan ada lebih banyak kepercayaan di suatu tempat jika populasinya sangat homogen dan tidak merata. Menurut Williamson, persahabatan dan hubungan keluarga adalah tempat kepercayaan cenderung berkembang. Ketika modal sosial dibangun, perilaku didasarkan pada kepercayaan. Perkembangan hubungan timbal balik atau kemitraan akan tergantung pada adanya kepercayaan dalam perilaku dan interaksi keluarga. Agar individu lebih menyukai ikatan berdasarkan kepercayaan daripada ikatan yang dibuat menggunakan oportunisme. (Nurwahyuliningsih, Akhmad Nulhaqim and A. Rachim, 2022)

(Zuhri, 2020) Kepercayaan didefinisikan sebagai standar kerja sama seperti kejujuran dan kesiapan untuk membantu yang hanya dapat dibagi dalam kelompok individu tertentu dan tidak dengan orang asing atau anggota kelompok sosial yang sama. Anggota kelompok lebih mungkin untuk mempercayai satu sama lain jika mereka percaya bahwa orang lain akan bertindak terhormat dan dapat diandalkan. (Zuhri, 2020) mengatakan salah satu produk sampingan utama dari norma sosial kooperatif, yang menghasilkan modal sosial, adalah kepercayaan. Kelompok akan terbentuk lebih cepat dan lebih mampu mencapai tujuan bersama jika masyarakat dapat dipercaya untuk menjunjung tinggi komitmen, menghormati standar saling membantu, dan menghindari perilaku oportunistik.

Menurut (Pranadji, 2016) kepercayaan seharusnya harus diingat bahwa percaya lebih merupakan produk sampingan dari kebajikan daripada kebajikan moral itu sendiri. Ketika orang bekerja dengan satu sama lain karena mereka menjunjung standar kejujuran dan ketersediaan yang sama, kepercayaan berkembang. Keegoisan atau oportunisme yang berlebihan mengikis kepercayaan. Akibatnya, ketika orang percaya satu sama lain, mereka cenderung menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan mereka sendiri.

Mollering dalam (Pranadji, 2016) mengidentifikasi enam peran penting kepercayaan (*trust*) dalam interaksi sosial kemasyarakatan adalah antara lain :

- a. Kepercayaan dalam arti *confidence*, yang bekerja pada ranah psikologis individual. Orang-orang akan terinspirasi oleh mentalitas ini untuk membuat keputusan dengan percaya diri setelah mempertimbangkan dengan cermat risiko yang terlibat. Orang lain akan secara bersamaan berbagi keyakinan ini dalam tindakan sosial, memberinya rasa legitimasi universal
- b. Kerja sama akan mendorong integrasi sosial yang tinggi. Kerja sama, yang sering disebut sebagai proses sosial asosiatif, adalah proses di mana interaksi antar manusia terjalin tanpa landasan ketidakpercayaan di kedua sisi. Selain itu, kerja sama akan mendorong integrasi sosial tingkat tinggi.
- c. Penyederhanaan pekerjaan, di mana *trust* membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi lembaga sosial. Proses yang disederhanakan ini dapat mengurangi biaya transaksi, yang bisa menjadi sangat tinggi jika moralitas ketidakpercayaan digunakan untuk membangun hubungan sosial.
- d. Ketertiban. *Trust* berguna untuk *inducing behavior* setiap individu, yang berkontribusi pada pembentukan perdamaian dan mengurangi kemungkinan kerusakan sosial. Dengan demikian, *trust* membantu dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum, beradab, dan tertib.
- e. Pemelihara kohesivitas sosial. *Trust* berpartisipasi dalam melekatkan setiap unsur sosial yang berada dalam suatu komunitas berkembang menjadi suatu kesatuan yang tidak terputus.
- f. Modal sosial. *Trust* adalah sumber daya berharga dalam kehidupan sosial yang memastikan sistem sosial tetap stabil dan berjalan efektif.

Giddens mendefinisikan kepercayaan sebagai keyakinan akan keterandalan seseorang atau sistem dalam kaitannya dengan berbagai hasil dan kejadian, di mana keyakinan tersebut

mengkomunikasikan keyakinan (iman) pada ketulusan kasih sayang orang lain atau kebenaran prinsip-prinsip abstrak (pengetahuan teknis) (Maarif, 2023). (Agustinus, Albertus and Pranaka, 2020) menegaskan bahwa maraknya perilaku jujur, tertib, dan kooperatif berdasarkan norma-norma umum merupakan tanda tumbuhnya kepercayaan dalam masyarakat.

Kepercayaan membantu mengurangi atau menghilangkan kerugian yang disebabkan oleh perilaku tertentu. Kepercayaan biasanya berkorelasi dengan kemungkinan daripada bahaya. Alih-alih mengandalkan kalkulasi kognitif logis, kepercayaan meningkatkan kerja sama manusia dengan mempertimbangkan penyangga antara keinginan yang sangat dibutuhkan dan harapan bahwa keinginan itu akan terpenuhi sebagian. Tanpa rasa saling percaya di antara orang-orang yang terlibat, kolaborasi tidak mungkin dilakukan, dan kepercayaan dapat meningkatkan toleransi seseorang terhadap ambiguitas (Laura *et al.*, 2018).

8.3.2 Nilai dan Norma (*Norms*)

Menurut Horton dan Hunt, nilai adalah pendapat tentang pentingnya pengalaman. Nilai memainkan peran penting dalam budaya; suatu tindakan dianggap sah jika selaras dengan nilai-nilai yang dianut dan dipertahankan oleh masyarakat tempat tindakan itu dilakukan.

Sedangkan norma adalah hukum kehidupan sosial kolektif atau kolektif yang melibatkan hukuman yang berbeda, termasuk hukuman moral dan fisik, untuk individu atau kelompok individu yang tidak mematuhi nilai-nilai sosial. Norma digunakan untuk menekan orang agar memastikan bahwa tidak ada yang mereka lakukan bertentangan dengan cita-cita yang telah disepakati bersama (Alfiansyah, 2023).

Nilai dan norma adalah komponen mendasar proses interaksi sosial. Nilai dan norma bagaimana orang seharusnya berperilaku dalam masyarakat demokratis. Baik birokrat maupun pemerintah tidak bertanggung jawab atas penciptaan norma-norma, yang merupakan unsur modal sosial. Tradisi, sejarah, dan karakter karismatik yang membentuk pola perilaku seseorang atau kelompok membantu menciptakan norma. Di dalam norma-norma tersebut, modal sosial secara alamiah akan berkembang dalam kerangka penciptaan aturan-aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok (Raga, 2014).

Norma adalah nilai yang spesifik dan dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap orang dalam bertindak sesuai dengan norma sosial. Putnam berpendapat bahwa karena nilai-nilai ini hadir dalam jejaring sosial, mereka berfungsi sebagai faktor penghubung bagi orang untuk membentuk hubungan. Dalam ikatan yang terjalin antara orang-orang dalam kelompok, diantisipasi bahwa orang-orang akan mendahulukan tujuan kelompok atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Untuk mengontrol setiap anggota kelompok dan memastikan bahwa mereka menerima imbalan yang sepadan dengan kontribusinya, norma harus ada

Menurut Hasbullah dalam (Nusawakan, Tesabela Messakh and Jambormias, 2019) , norma adalah hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Norma sosial sangat penting dalam mengatur jenis perilaku yang diperbolehkan dalam masyarakat. Sebagai strategi pencegahan, norma sosial biasanya dilembagakan dan menyertakan konsekuensi sosial khusus untuk memastikan bahwa orang tidak menyimpang dari tradisi atau praktik yang berlaku di komunitas mereka. Pedoman ini, yang mengatur pola perilaku yang tepat dalam menjalin ikatan sosial, biasanya tidak dituliskan tetapi diketahui oleh setiap anggota masyarakat.

Pertukaran yang saling menguntungkan inilah yang menyebabkan terbentuknya norma. Tidak akan ada lagi perdagangan sosial di masa depan jika transaksi hanya membantu satu pihak. Norma diciptakan melalui serangkaian interaksi sosial yang saling menguntungkan daripada pertukaran sosial tunggal yang terisolasi. Sebagai hasil dari sifat timbal baliknya, norma menggabungkan hak dan kewajiban dari mereka yang dapat memastikan keuntungan dari perilaku tertentu. Siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang berat dan berdampak pada keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Jaringan yang dapat bertahan lama dan memastikan anggotanya mendapat keuntungan yang sama akan memunculkan konsep keadilan. Siapa pun yang mengabaikan aturan ini juga akan menghadapi hukuman berat.

8.3.3 Jaringan Sosial (*Networks*)

Jaringan adalah hubungan antar node (individu atau kelompok) yang dihubungkan oleh ikatan sosial dan diikat oleh kepercayaan. Norma yang dipatuhi kedua belah pihak membantu menjaga kepercayaan tetap hidup. Jaringan adalah hubungan antara orang-orang yang memiliki koneksi atau asosiasi sewenang-wenang dengan hal-hal lain, seperti tautan dan simpul (Nusawakan, Tesabela Messakh and Jambormias, 2019).

Menurut Lenggono dalam Saifuddin, yang dimaksud dengan “jaringan” adalah hubungan sosial yang berlangsung terus menerus, teratur, dan berkesinambungan. Ada banyak orang yang terlibat dalam hubungan itu, bukan hanya dua. Keterkaitan ini juga akan menciptakan jaringan yang menunjukkan adanya pengelompokan sosial dalam masyarakat. Suparlan lebih lanjut mendefinisikan jejaring sosial sebagai proses membangun kelompok yang terdiri dari banyak orang (minimal tiga), di mana setiap orang memiliki identitas yang mengarah pada pengembangan ikatan sosial (Maarif, 2023).

Jejaring sosial memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyebaran informasi yang diperlukan tentang isu-isu terkini dan diskusi solusi. Jejaring sosial, norma, dan nilai yang ada berperan penting dalam memperkuat institusi yang terlibat dalam proses pemberdayaan.

Jaringan terbentuk karena berasal dari asal daerah yang sama, gagasan kepercayaan politik atau agama, ikatan silsilah, dan lain-lain. Jaringan pembentukan masyarakat untuk memperoleh modal sosial, jaringan komunitas harus diorganisasikan dalam suatu setting yang mendapat pertimbangan khusus.

Jejaring sosial terkadang sangat kuat dalam komunitas yang sehat. Tipologi yang normal biasanya akan menambah warna pada jejaring sosial sesuai dengan sifat dan orientasi kelompok. Secara tradisional, pengelompokan sosial dibuat berdasarkan pengalaman bersama dengan orang lain (interaksi sosial berulang) dan perspektif bersama tentang dimensi persyaratan (keyakinan agama).

8.4 Tipe – Tipe Modal Sosial

Modal sosial menyatakan mampu mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, karena sejarahnya modal sosial masyarakat dilatarbelakangi adanya kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan hubungan jejaring (*network*). Dimana adanya relevansi dengan modal sosial yang dijelaskan oleh Wolcock yang membagi modal sosial dalam 3 (tiga) tipe:

8.4.1 Modal Sosial Terikat (*Bonding Social Capital*)

Bonding social capital adalah jenis modal sosial yang menggambarkan hubungan dalam suatu kelompok atau komunitas yang ditandai dengan tingkat kesamaan yang tinggi dalam karakteristik demografis, sikap, dan informasi serta sumber daya yang tersedia. Modal sosial ikatan ada antara 'orang-

orang seperti kita' yang 'bersama-sama' dan yang biasanya memiliki hubungan dekat yang kuat. Contohnya termasuk anggota keluarga, teman dekat, dan tetangga.

Menurut Hasbullah dalam (Nurwahyuliningsih, Akhmad Nulhaqim and A. Rachim, 2022) , bonding social capital biasanya bersifat eksklusif. Kualitas yang menentukan tipologi ini dalam hal ide, hubungan, dan perhatian adalah bahwa tipologi ini memiliki orientasi pandangan ke dalam yang lebih kuat daripada orientasi pandangan ke luar. Keanggotaan kelompok ini umumnya homogen atau cenderung homogen.

Bonding social capital sering disebut sebagai ciri masyarakat sakral dalam berbagai bahasa. (Laura *et al.*, 2018) menegaskan bahwa dogma-dogma tertentu berlaku dalam masyarakat suci dan menjunjung tinggi struktur masyarakat yang diktator, hierarkis, dan tertutup. Interaksi sosial sehari-hari selalu diatur oleh nilai-nilai dan konvensi yang mendukung tingkat hierarki dan feodalisme tertentu.

Menurut (Nurwahyuliningsih, Akhmad Nulhaqim and A. Rachim, 2022) suatu bentuk modal sosial yang dikenal dengan social bounding memiliki sifat ikatan yang kokoh dalam suatu sistem sosial. Adanya kepercayaan yang dibangun dalam masyarakat tidak diragukan lagi merupakan dasar dari ikatan ini. Selain itu, landasan kepercayaan telah didirikan dalam kehidupan masyarakat.

Bonding social capital digambarkan sebagai hubungan kuat yang berkembang antara orang-orang dengan latar belakang dan minat yang sama, biasanya termasuk keluarga dan teman, memberikan dukungan materi dan emosional, dan lebih melihat ke dalam dan melindungi. *Bonding social capital* mengacu pada jaringan dengan kepadatan hubungan yang tinggi antar anggota, di mana sebagian besar, jika tidak semua, individu yang tergabung dalam jaringan saling berhubungan karena mereka saling mengenal dan sering berinteraksi satu sama lain.

Misalnya, setiap orang dalam kelompok komunal berasal dari suku yang sama. Kepedulian berpusat pada upaya menegakkan prinsip-prinsip warisan yang telah diakui dan dijunjung tinggi sebagai komponen kode etik dan moralitas (kode etik). Mereka menekankan pembangunan solidaritas di atas upaya yang lebih nyata untuk membangun diri mereka sendiri dan organisasi komunitas mereka sesuai dengan tuntutan prinsip dan norma sosial yang lebih liberal. Mereka lebih konservatif.

Ada tema konsisten yang muncul: tidak benar mengklaim bahwa kelompok masyarakat yang terbentuk dalam masyarakat konvensional yang berwawasan ke dalam kekurangan modal sosial. Ada modal sosial, tetapi pengaruhnya terbatas pada dimensi kohesivitas kelompok. Aspek keintiman dari hubungan emosional yang sangat dalam membantu kelompok bersatu dan menciptakan kohesi. Kedekatan ini juga merupakan hasil dari pola nilai-nilai konvensional yang tertanam dalam setiap aktivitas interaksi. Mereka juga kekurangan nilai-nilai yang menopang masyarakat egaliter dan bebas, yang mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan persaingan. Efek lain dari struktur dan tipologi ketertutupan sosial ini adalah tantangan untuk menciptakan konsep, sudut pandang, dan konvensi baru yang meningkatkan yang sudah ada. Pada akhirnya kelompok modal sosial yang terbentuk cukup resisten terhadap perubahan.

8.4.2 Modal Sosial Menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Menurut (Laura *et al.*, 2018) *Social bridging* merupakan hubungan sosial yang dikenal sebagai jembatan sosial berkembang sebagai respons terhadap ciri-ciri kelompok tertentu. Jembatan sosial juga terkait dengan partisipasi luas seperti yang ditunjukkan oleh orang, asosiasi, dan jaringan.

Sedangkan menurut (Alfiansyah, 2023) sosial bridging adalah ruang lingkup sosial asli yang muncul sebagai respons terhadap sifat-sifat kelompok yang beragam. Mereka memilih untuk memanfaatkan kekuatan dan kelemahan mereka biasanya

karena ada banyak jenis kekurangan yang ada di sekitar mereka. Jembatani sosial juga terkait dengan partisipasi luas seperti yang ditunjukkan oleh orang, asosiasi, dan jaringan.

Tujuannya adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan mengembangkan potensi yang telah ada di dalamnya. Ketiga jenis modal sosial (nilai, institusi, dan proses) dapat mengaktifkan dan berfungsi sebagai forum dalam hubungan antara orang dan kelompok, menunjukkan kapasitas modal sosial untuk mempromosikan integrasi sosial.

Sosial Bridging atau jembatan sosial adalah jenis modal sosial yang menggambarkan hubungan yang menghubungkan orang-orang melintasi belahan yang biasanya memisahkan masyarakat (seperti ras, atau kelas, atau agama). Ini adalah asosiasi yang 'menjembatani' antara komunitas, kelompok, atau organisasi.

Perbedaan modal sosial *bonding* dan *bridging* berkaitan dengan sifat hubungan atau asosiasi dalam kelompok sosial atau komunitas. *Bonding social capital* ada di dalam kelompok atau komunitas sedangkan *bridging social capital* ada di antara kelompok sosial, kelas sosial, ras, agama atau karakteristik sosiodemografi atau sosioekonomi penting lainnya. Perbedaan *bonding/bridging* dapat dibuat dalam kaitannya dengan berbagai karakteristik hubungan dan jaringan. Tabel di bawah merangkum fitur utama masing-masing.

Tabel 8.1. Merangkum fitur utama masing-masing.

<i>Sosial Bonding</i>	<i>Sosial Bridging</i>
Di dalam	Antara
Intra	Antar
Inklusif	Eksklusif
Tertutup	Terbuka
Pandangan ke dalam	Pandangan ke luar

<i>Sosial Bonding</i>	<i>Sosial Bridging</i>
Bertahan	Maju
Vertikal	Horizontal
Ikatan yang kuat	Ikatan yang lemah
Orang yang sama	Orang yang berbeda
Kepercayaan tebal	Kepercayaan tipis
Penutupan jaringan	Lubang Struktural
Model public baik	Model pribadi baik

Sumber: Penulis. 2023

Sosial bridging menggambarkan hubungan pertukaran sosial, seringkali asosiasi antara orang-orang dengan minat atau tujuan yang sama tetapi membedakan identitas sosial. Meskipun teman biasanya dianggap sebagai modal sosial yang mengikat, persahabatan juga dapat bertindak sebagai hubungan yang menjembatani, karena mereka mungkin berada di antara orang-orang dari latar belakang budaya, latar belakang sosial ekonomi, atau usia yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memberikan akses ke informasi dan kelompok atau individu lain yang sebelumnya tidak dikenal oleh yang lain.

Bentuk modal sosial yang menjembatani seringkali mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Menurut temuan berbagai penelitian, semakin berkembangnya jenis modal sosial penghubung ini, akan memungkinkan pembangunan di banyak bidang kehidupan, korupsi yang terkendali, operasi pemerintah yang lebih efektif, dan tingkat keberhasilan yang lebih cepat untuk upaya pengentasan kemiskinan. Akibatnya, baik kualitas hidup masyarakat maupun kekuatan negara akan meningkat.

Menurut Hasbullah dalam (Maarif, 2023) persoalannya adalah fakta yang ada di negara-negara berkembang cenderung menunjukkan kecenderungan bahwa pengaruh modal sosial yang

menguntungkan dari mekanisme outward facing tidak berjalan sebagaimana idealnya. Sekalipun perkumpulan itu dibuat oleh masyarakat, memiliki keanggotaan yang beragam, dan didirikan dengan maksud untuk mengatasi masalah sosial ekonomi di masyarakat (berorientasi pada pemecahan masalah), mereka tidak dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

8.4.3. Modal Sosial Jaringan (*Linking Sosial Capital*)

Social linking atau hubungan sosial adalah jenis modal sosial yang menggambarkan norma-norma rasa hormat dan jaringan hubungan saling percaya antara orang-orang yang berinteraksi lintas kekuatan atau otoritas yang eksplisit, formal atau dilembagakan atau gradien otoritas dalam masyarakat. Hubungan ini digambarkan sebagai 'vertikal' dan ciri utamanya adalah perbedaan posisi atau kekuasaan sosial. Contohnya bisa berupa hubungan antara organisasi berbasis masyarakat dan pemerintah atau penyandang dana lainnya.

Menurut (Laura *et al.*, 2018) *Social Linking* (hubungan/jaringan sosial) adalah jenis hubungan sosial di mana ada hubungan antara beberapa tingkat sosial kekuasaan sosial dan status. Jenis modal sosial ketiga yang disebut hubungan sosial memperluas perbedaan antara ikatan umum dan hubungan yang dikenal dalam pendekatan teori jaringan untuk modal sosial. Analisis jaringan, yang didasarkan pada individualisme metodologis dan teori pilihan rasional, adalah tempat ikatan dan jembatan bervariasi. Konsep ini mendapat kecaman karena mengelompokkan elemen jaringan dan norma yang saling bertentangan. Berbagai metode tersebut berbeda dalam cara memperlakukan aspek struktural dan kognitif modal sosial.

Social linking dapat dilihat sebagai perluasan dari bridging social capital yang melibatkan jaringan dan ikatan dengan individu, kelompok atau pelaku korporasi yang diwakili dalam lembaga public, sekolah, kepentingan bisnis, lembaga hukum dan kelompok agama atau politik.

Social Linking mengacu pada hubungan antara individu dan kelompok dalam strata sosial yang berbeda dalam suatu hirarki dimana kekuasaan, status sosial dan kekayaan diakses oleh kelompok yang berbeda. Dengan demikian sejauh mana individu membangun hubungan dengan institusi dan individu yang memiliki kekuasaan relatif atas mereka, misalnya untuk menyediakan akses ke layanan, pekerjaan atau sumber daya. Menghubungkan hubungan juga melibatkan timbal balik. Misalnya, penyandang dana mengharapkan layanan yang efektif dan berkualitas untuk hibah mereka dan mentor berharap bahwa orang-orang yang bekerja dengan mereka akan merefleksikannya dengan baik dengan melakukan yang baik dalam hidup mereka atau memberikan bantuan yang sama kepada orang lain.

Menurut Seregaldin dan Grooteart dalam (Subagyo and Legowo, 2021) modal sosial juga penting bagi struktur organisasi formal, ikatan organisasi formal, keragaman politik, sistem hukum dan peradilan, serta kebebasan politik. Bagi warga untuk memiliki akses ke sumber daya dan otoritas yang diperlukan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, modal sosial sangat penting. Hubungan sosial antara orang dan kelompok dalam berbagai strata sosial hierarki disebut sebagai modal sosial penghubung, menurut (Pranadji, 2016) Modal sosial yang terkait menunjukkan tingkat kohesi kelompok tertentu. Persoalannya adalah bagaimana memaksimalkan potensi tersebut. Adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat juga mempengaruhi potensi ini. Tingkat kepercayaan dan kepatuhan anggota masyarakat yang tinggi terhadap standar merupakan fondasi kekuatan modal sosial.

8.5 Peran Modal Sosial dalam Masyarakat Desa

Modal sosial menunjuk pada segi-segi organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan-jaringan sosial yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif. Modal sosial mendorong orang untuk bekerja sama meningkatkan kualitas hidup mereka, melakukan perbaikan yang lebih bermanfaat, dan secara konsisten menjunjung tinggi komitmen mereka. Sehubungan dengan hal ini, (Pranadji, 2016) mendefinisikan norma sosial sebagai cara masyarakat umum terlibat dalam aktivitas asosiatif (membentuk ikatan dengan orang lain), menjadikannya pertimbangan penting tidak hanya untuk ekonomi tetapi juga untuk norma sosial lainnya.

Menurut Koput dalam (Maarif, 2023) N, Dampak hubungan sosial terhadap peran modal sosial antara lain sebagai berikut. Pertama, hubungan sosial membantu orang mempelajari informasi penting tentang tuntutan lingkungan. Agen sosial dan masyarakat akan lebih siap untuk mengenali kebutuhan dan mengantisipasi kebutuhan apa yang akan muncul di masyarakat di masa depan jika mereka memiliki akses ke banyak informasi. Membuat prakiraan tentang sumber daya yang dapat diinvestasikan sesuai kebutuhan juga dimungkinkan setelah memahami informasi tersebut. Kedua, Berhubungan dengan kelompok yang dapat mengatur dukungan melalui hubungan sosial adalah suatu kemungkinan. Jadi, semakin banyak koneksi yang Anda miliki, semakin besar dampak yang akan Anda dapatkan saat mendapatkan otoritas. Ketiga, Hubungan sosial berfungsi sebagai wahana untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip konstruktif yang mendorong pertumbuhan (kepercayaan), menarik pihak luar atau kelompok lain yang berkepentingan untuk membentuk hubungan timbal balik. Keempat, menjadi alat untuk meningkatkan kehidupan dan identitas sehingga individu dapat lebih mudah membangun koneksi yang didasarkan pada saling pengakuan. Mungkin lebih mudah bagi aktor sosial untuk berbagi kepentingan sumber daya

ketika ada saling menghargai atau pengakuan. Di sisi lain, tautan ini juga menawarkan rasa aman dan memastikan kelanjutan program.

Kesadaran modal sosial dalam masyarakat memerlukan kesadaran yang mendalam tentang keragaman yang ada di antara para anggotanya dalam hal keyakinan, budaya, minat, posisi sosial, tingkat pendidikan, uang, dan kemampuan, serta jenis kelamin mereka. Sementara itu, memahami nilai dan standar sangat penting. Jaringan kerja sama, rasa percaya dan jaminan keamanan di antara anggota, saling memberi satu sama lain, keterlibatan timbal balik, dan bersikap proaktif adalah komponen penting dari modal sosial (Zuhri, 2020).

Berdasarkan prinsip kepercayaan, gotong royong, dan keuntungan bersama, dianggap bahwa berbagai bentuk modal sosial di pedesaan telah mampu menopang penduduk pedesaan. Masyarakat desa pada dasarnya memiliki ketiga gagasan tersebut sebagai modal sosial. Namun demikian, modal sosial masih perlu berperan lebih besar dengan mengikutsertakan masyarakat pedesaan secara aktif guna mencapai dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Wawasan, pengalaman, kerukunan, peningkatan swadaya masyarakat, kelestarian lingkungan, kesehatan balita, kebersamaan antar warga, tukar pengalaman, silaturahmi, kesinambungan program, peningkatan komunikasi, menampung aspirasi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hanyalah sebagian kecil dari keunggulan modal sosial yang dipetik masyarakat.

(Agustinus, Albertus and Pranaka, 2020) berpendapat bahwa praktik-praktik budaya seperti agama, tradisi, atau kebiasaan yang mendarah daging adalah cara yang efektif untuk mentransmisikan modal sosial. Modal sosial mengadopsi kualitas seperti kesetiaan, kejujuran, dan ketergantungan dan lebih menekankan pada komunitas moral, individu dengan tingkat modal sosial yang tinggi akan mendapat manfaat dari kesehatan

fisik dan mental yang lebih baik, ekonomi yang lebih kuat, dan sistem pengasuhan anak yang lebih baik.

Kemampuan masyarakat (bangsa) untuk bekerjasama dalam rangka menciptakan jaringan untuk mencapai tujuan bersama merupakan aspek sentral dari kajian modal sosial. Kerjasama tersebut ditandai dengan pola hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, dibangun atas dasar kepercayaan, serta didukung oleh norma dan nilai sosial yang kuat dan positif. Kemitraan ini akan semakin kuat jika didukung oleh semangat proaktif dalam mengembangkan hubungan berdasarkan prinsip-prinsip sikap partisipatif, saling peduli, saling memberi dan menerima, saling percaya, serta diperkuat dengan nilai dan norma yang mendukungnya.

Konsekuensinya, diperlukan berbagai inisiatif yang mengutamakan pembangunan modal manusia dan sosial masyarakat. Dimungkinkan untuk melaksanakan implikasi kewirausahaan dalam kegiatan komersial dengan menyiapkan dan mengondisikan lingkungan di mana modal sosial dan modal manusia meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara bersamaan.

Untuk memaksimalkan modal sosial untuk kepentingan masyarakat pedesaan, diperlukan kepemimpinan transformasional. Tipe kepemimpinan ini dapat mengubah status quo, menumbuhkan kreativitas individu, menginspirasi dan memotivasi orang, serta memiliki pandangan idealis. Modal manusia yang dapat menghasilkan inovasi bagi warga sekitar juga harus membantu modal sosial. Program pendampingan berperan penting dalam meningkatkan kompetensi masyarakat pedesaan dengan meningkatkan pengetahuan pertanian dan keragaman pertanian.

Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di luar masyarakat, seperti isu pembangunan infrastruktur di pedesaan, modal sosial menjadi sebuah kekuatan. Kemampuan beradaptasi mereka dapat ditunjukkan dalam upaya mereka untuk merespons dalam bentuk keterlibatan dan kerja sama. Keterampilan ini berfungsi sebagai landasan yang kokoh bagi ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan stabilitas masyarakat pedesaan dalam menghadapi perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, E., Albertus and Pranaka, R.N. (2020) 'Role and Types of Social Capital in Supporting Food Security of Farmer Families in Living Villages', *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(2), pp. 102–114.
- Alfiansyah, R. (2023) 'Modal Sosial sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Desa', 10, pp. 41–51. Available at:
<https://doi.org/https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.378>.
- Azizah, N. and Raharjo, B.B. (2020) 'Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Proses Keputusan Pasien Memilih Layanan Kesehatan', *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 4(2), pp. 189–200. Available at:
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higeia.v4i2.33140>.
- Laura, N. *et al.* (2018) 'The Role of Community Social Capital in Managing Natural Potential as a Survival Strategy in Dukung Limang, Kelapa District, Bangka Barat Regency', *Society*, 6(2).
- Maarif, U. (2023) 'Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul Malang', *Jurnal Unissula*, 05(01), pp. 1–16.
- Nurwahyuliningsih, E., Akhmad Nulhaqim, S. and A. Rachim, H. (2022) 'Kepemimpinan Dan Pengambilan Keputusan Pada Organisasi Layanan Manusia', *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 2, Juni 2022), pp. 136–145. Available at:
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5310>.
- Nusawakan, A.W., Tesabela Messakh, S. and Jambormias, S. (2019) 'Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Dalam Penggunaan Layanan Kesehatan Pada Wilayah Kerja Puskesmas Tawiri', *Media Ilmu Kesehatan*, 6(2), pp. 129–138. Available at:
<https://doi.org/10.30989/mik.v6i2.188>.

- Pranadji, T. (2016) 'Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali', *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), p. 178. Available at:
<https://doi.org/10.21082/jae.v24n2.2006.178-206>.
- Raga, G. (2014) 'Modal Sosial Dalam Pengintegrasian Masyarakat Multietnis Pada Masyarakat Desa Pakraman Di Bali', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), pp. 209–221. Available at:
<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i2.2176>.
- Subagyo, R. and Legowo, M. (2021) 'Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro', *Jurnal Penamas*, pp. 181–202. Available at:
<http://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/article/view/518/218>.
- Zuhri, M. (2020) 'Penguatan Modal Sosial Kelembagaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Di Pantai Utara Dan Pantai Selatan', *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(1), pp. 121–130. Available at:
<https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v18i1.813>.

BAB 9

MASALAH SOSIAL

Oleh Sari Anggarawati

9.1 Pendahuluan

Daerah pedesaan menampilkan lebih banyak ruang terbuka dan lebih sedikit keramaian. Tingkat kejahatan kekerasan dan properti masyarakat jauh lebih rendah daripada di kota-kota besar, seperti yang telah kita lihat. Udara lebih bersih karena lebih sedikit lalu lintas dan lebih sedikit pabrik dan fasilitas lain yang mengeluarkan polusi. Kehidupan di daerah pedesaan dianggap lebih lambat, menghasilkan tingkat kecemasan yang lebih rendah dan rasa relaksasi yang lebih besar. Untuk alasan ini dan lainnya, rata-rata penduduk pedesaan menunjukkan kesehatan mental yang lebih baik daripada penduduk perkotaan. Pedesaan yang identik dengan kawasan pertanian tidak terlepas juga dari permasalahan sosial. Gambaran desa yang tenang dengan masyarakatnya yang ramah tamah, suka tolong menolong dan gotong royong, yang lebih mementingkan keharmonisan sosial bukannya tanpa permasalahan di kehidupan komunitasnya. Hijaunya bentang alam yang ada, ternyata juga menyimpan potensi terjadinya konflik sosial di masyarakatnya.

Permasalahan sosial sendiri adalah merujuk pada suatu kondisi atau situasi yang dianggap dapat mengganggu kesejahteraan, keharmonisan, dan kestabilan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Masalah sosial melibatkan berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan antarindividu, kelompok, atau komunitas, serta berdampak negatif pada kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Masalah sosial bisa

terjadi di berbagai tingkat, mulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas, hingga tingkat nasional atau bahkan global.

Bahasan masalah sosial dalam tulisan ini hanya penyangkut permasalahan yang terjadi di kawasan perdesaan atau pertanian, di mana masalah sosial yang ditemui akan menunjukkan sifatnya yang khas mencerminkan kondisi perdesaan dan berbeda dengan kondisi yang terjadi di perkotaan.

9.2 Masalah Sosial Menurut Para Ahli

Menurut para ahli, masalah sosial adalah suatu kondisi di mana ada ketidaksesuaian di antara unsur-unsur masyarakat atau kebudayaan, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial. Apabila terjadi bentrokan atau konflik di antara unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan sosial seperti ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat atau berkelompok (Soekanto, 2013).

Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang digambarkan dan disepakati oleh suatu komunitas yang ditenggarai dapat mengancam nilai-nilai dalam suatu masyarakat atau komunitas yang berakibat pada sebagian besar dari anggota masyarakat tersebut (Blumer, 1971) dan (Thompson, 1988).

Masalah-masalah sosial adalah hal-hal yang dapat menyebabkan rusaknya ikatan sosial dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas, karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam masyarakat atau kebudayaan yang dapat mengancam kehidupan kelompok tersebut atau menghalangi terpenuhinya keinginan-keinginan pokok pada anggota kelompok sosial tersebut (Gillin and Gillin, 1954).

Masalah sosial merupakan suatu kondisi sosial yang telah dirumuskan oleh suatu masyarakat, di mana kondisi tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada di

masyarakat tersebut. Masyarakat dapat menyatakan suatu kondisi dapat menjadi masalah sosial jika dalam kondisi tersebut didapati sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak sesuai bagi masyarakat tersebut (Pincus and Minahan, 1980).

Masalah sosial dijabarkan sebagai suatu kondisi yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, namun kondisi tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada kelompok tersebut (Rubington and Weinberg, 2010).

Ketidaksesuaian kondisi yang terjadi di masyarakat, bukan merupakan sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki dan tidak memerlukan persetujuan bersama untuk merubah kondisi tersebut agar dapat disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut.

9.3 Faktor-Faktor Penyebab Masalah Sosial

Masalah sosial yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pencetus, faktor-faktor tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun simultan menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial seringkali bersifat kompleks dan multifaktorial, dan melibatkan interaksi berbagai faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial di masyarakat dikelompokkan menjadi faktor ekonomi, pendidikan, budaya, biologis, psikologis, lingkungan, konflik dan kekerasan, demografi dan teknologi.

9.3.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan pengangguran, menjadi pemicu utama dan terbesar penyebab dari masalah sosial. Hal ini dapat dipahami karena setiap individu atau rumah tangga perlu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Kesenjangan ekonomi seperti ketidakadilan dalam distribusi sumberdaya lahan, akses terhadap modal, produksi dan pendapatan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan ketegangan dan konflik sosial.

Kemiskinan pedesaan dianggap lebih persisten daripada kemiskinan perkotaan karena beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka tersebut. Faktor-faktor ini termasuk migrasi keluar pekerja muda yang sangat terampil; kurangnya pekerjaan industri yang biasanya bergaji lebih tinggi daripada pekerjaan pertanian; dan peluang terbatas untuk pekerjaan bergaji tinggi di era informasi.

9.3.2 Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan seperti tingginya tingkat drop-out, rekrutmen guru berkualitas dan ketersediaan sarana pendidikan di wilayah pedesaan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Sekolah yang pasti ada di wilayah pedesaan adalah setingkat sekolah dasar (SD), untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA/SMK, biasanya ada di kota kecamatan yang lokasinya relatif jauh dari tempat tinggal keluarga pedesaan. Jarak sekolah yang relatif jauh membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengangkut anak-anak ke dan dari sekolah, atau tambahan biaya untuk kost.

Merekrut dan mempertahankan guru berkualitas di daerah pedesaan sulit dipenuhi, karena guru-guru yang berkualitas lebih memilih sekolah di kota. Masalah yang lain adalah, agar guru-guru mau mengajar di pedesaan, maka pihak sekolah perlu menyediakan fasilitas perumahan kepada staf sekolah mereka.

Sarana pendidikan yang tersedia di sekolah-sekolah pedesaan seperti ketersediaan alat peraga, modul, laboratorium, komputer dan lainnya terbatas dalam jumlah, kemutakhiran, bahkan kadang tidak tersedia.

9.3.3 Faktor Budaya

Faktor budaya suatu masyarakat mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, kepercayaan, bahasa, dan perilaku yang dibagikan oleh anggota masyarakat tersebut. Faktor-faktor budaya dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk cara berpikir, berinteraksi dan bertindak.

Nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat mempengaruhi bagaimana orang berperilaku dan bertindak. Misalnya, nilai-nilai seperti hormat pada orang tua, kejujuran, atau solidaritas kelompok dapat membentuk pola tingkah laku yang khas masyarakat pedesaan yang berbeda dengan kota.

Norma sosial yang berupa aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat masih sangat kuat di masyarakat pedesaan. Norma-norma ini dapat berkaitan dengan cara berpakaian, adat istiadat, etika bisnis, dan sebagainya

Struktur keluarga yang dominan dalam suatu budaya, seperti keluarga inti atau keluarga yang besar, masih sangat kuat di pedesaan. Hal ini dapat mempengaruhi pola hubungan antar anggota keluarga dan peran mereka dalam masyarakat

Kedatangan orang luar ke dalam komunitas masyarakat desa dengan perbedaan kebudayaan, bisa memicu pelanggaran norma, nilai dan kepentingan sosial masyarakat. Kebudayaan yang berbeda bisa menimbulkan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat.

9.3.4 Faktor Biologis

Faktor biologis disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial. daerah pedesaan seringkali kekurangan jumlah profesional perawatan kesehatan, rumah sakit, dan klinik medis yang memadai.

Masalah di pedesaan yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang pertama adalah bahwa rumah sakit kecil khas daerah pedesaan umumnya kekurangan perawatan dan peralatan berkualitas tinggi. Seorang pasien yang membutuhkan operasi bypass jantung, operasi otak, atau jenis perawatan medis kompleks lainnya kemungkinan besar harus melakukan perjalanan ke rumah sakit perkotaan yang jauh.

Masalah kedua adalah jarak yang jauh yang harus ditempuh ambulans dan pasien. Karena ambulans dan kendaraan darurat lainnya harus melakukan perjalanan jauh, penduduk pedesaan dengan keadaan darurat menerima perawatan medis lebih lambat daripada penduduk perkotaan. Jarak yang jauh yang harus ditempuh masyarakat mempersulit pasien yang mengalami gangguan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis dengan segera. Jarak perjalanan di daerah pedesaan juga berarti bahwa penduduk pedesaan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan penduduk perkotaan untuk menerima layanan pencegahan seperti pemeriksaan fisik dan vaksinasi untuk berbagai penyakit dan penyakit.

Penduduk pedesaan lebih berisiko daripada penduduk perkotaan untuk masalah kesehatan tertentu, termasuk kematian. Misalnya, hanya sepertiga dari semua kecelakaan kendaraan bermotor terjadi di daerah pedesaan, tetapi dua pertiga dari semua kematian akibat kecelakaan tersebut terjadi di daerah pedesaan. Masalah-masalah ini membantu menjelaskan mengapa penduduk pedesaan lebih mungkin daripada penduduk perkotaan untuk melaporkan kesehatan yang adil atau buruk dalam survei pemerintah (Bennett, Bankole and Probst, 2008).

Masalah kesehatan tambahan di daerah pedesaan muncul dari profil usia penduduk mereka. Dibandingkan dengan daerah perkotaan, daerah pedesaan memiliki “populasi yang menua”, atau persentase orang dewasa berusia 65 tahun ke atas yang lebih besar. Fakta ini menambah masalah perawatan kesehatan yang harus ditangani oleh daerah pedesaan.

9.3.5 Faktor Psikologis

Faktor psikologis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek mental, emosional, dan kognitif individu yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir mereka. Faktor psikologis memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian, sikap, dan cara individu berinteraksi dengan dunia sekitarnya

Kesehatan mental di daerah pedesaan kurang mendapat penanganan, begitu juga akses ke layanan kesehatan mental merupakan kendala utama bagi orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Masalah utama kesehatan mental adalah kekurangan perawatan kesehatan mental, program dan konseling penyalahgunaan narkoba, dan layanan lain yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental.

9.3.6 Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan alam yang mencakup unsur-unsur alamiah seperti alam, udara, air, tanah, fauna, flora, serta berbagai elemen fisik lainnya yang ada di planet ini.

Faktor lingkungan alam memiliki dampak signifikan pada kehidupan dan kesejahteraan manusia serta ekosistem secara keseluruhan. Faktor lingkungan alam mempengaruhi keberlanjutan kehidupan di bumi dan peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan bencana alam dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya, konflik, dan pengungsian, yang semuanya berkontribusi pada masalah sosial.

9.3.7 Faktor Konflik dan Kekerasan

Faktor konflik dan kekerasan seperti perbedaan identitas, persaingan sumberdaya, gangguan luar, politik dan lainnya dapat memicu masalah sosial, baik yang terjadi antara individu maupun kelompok.

Perbedaan identitas seperti agama, etnis, budaya, atau bahasa yang kuat, sering kali dapat memunculkan konflik, kekerasan dan ketidakamanan karena masing-masing pihak merasa superior atau berbeda dari yang lain, hal ini dapat menjadi penyebab utama masalah sosial di wilayah pedesaan.

Persaingan atau perebutan hak pengelolaan atas sumberdaya yang terbatas seperti lahan, air, atau kekayaan alam seringkali juga menjadi pemicu konflik antar individu maupun kelompok. Gangguan yang berasal dari luar wilayah pedesaan berupa penggusuran dan pemindahan, eksploitasi sumber daya alam, invasi spesies asing, intervensi dan industri pariwisata. Contoh dari beberapa gangguan tersebut adalah:

- a. Penggusuran dan pemindahan penduduk dalam rangka merencanakan proyek besar seperti pembangunan bendungan, perkebunan, tambang, atau infrastruktur besar lainnya di wilayah pedesaan.
- b. Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar atau asing seperti hutan, pertambangan, atau perikanan, hal ini dapat menyebabkan gangguan bagi masyarakat setempat.
- c. Invasi spesies asing seperti hama tanaman atau penyakit dapat mengganggu ekosistem di wilayah pedesaan dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani dan peternak.
- d. Intervensi yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau negara untuk mempengaruhi atau mengubah suatu situasi atau proses yang sedang berlangsung.
- e. Industri pariwisata yang berkembang pesat di wilayah sekitar pedesaan dapat menyebabkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan, termasuk pengaruh budaya dari luar yang dapat mengganggu tradisi lokal.

Faktor politik berupa korupsi, ketidakstabilan politik, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan penguasaan kekuasaan yang otoriter dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik sosial.

9.3.8 Faktor Demografi

Faktor demografi berkaitan dengan perubahan demografis, termasuk pertumbuhan populasi yang cepat, migrasi, dan perubahan struktur kelompok umur, dapat mempengaruhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dan bisa menyebabkan masalah sosial.

Perubahan demografi dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi (perpindahan penduduk) akan mempengaruhi struktur kelompok umur. Struktur kelompok umur digambarkan oleh distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia, seperti anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, dan lanjut usia. Migrasi yang massif pada kelompok umur produktif akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja pada sektor pertanian, demikian juga keengganan sebagian besar generasi muda bekerja di sektor pertanian mengancam keberlanjutan sektor pertanian, dan berujung pada masalah sosial di pedesaan.

9.3.9 Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini, sangat mempengaruhi kehidupan manusia, membawa dampak perubahan lingkungan alami, lapangan pekerjaan, hubungan sosial, dan akses terhadap informasi, bila tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan masalah sosial.

Teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan ekonomi. Inovasi teknologi, seperti komputer, kecerdasan buatan, dan otomatisasi, telah meningkatkan efisiensi produksi dan mengubah cara bisnis beroperasi. Adopsi teknologi di sektor pertanian ditandai dengan adanya mekanisasi dalam proses produksi tanaman mulai dari pengolahan tanah sampai pascapanen.

Teknologi juga dapat berdampak pada lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi hijau, dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam beberapa kasus, teknologi dapat memberikan manfaat yang besar, sementara dalam kasus lain, tantangan dan masalah baru mungkin muncul. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi yang bijaksana dan bertanggung jawab menjadi penting untuk memastikan dampak positifnya bagi masyarakat dan lingkungan.

9.4 Masalah Sosial di Sektor Pertanian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang dapat menjadi pencetus masalah sosial, maka pada sub-bab ini akan diulas permasalahan sosial yang seringkali terjadi dan berpengaruh penting bagi kehidupan masyarakat pedesaan/pertanian. Beberapa masalah sosial yang dapat ditemui di sektor pertanian, di antaranya:

9.4.1 Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi yang biasa diukur dengan disparitas kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi. Tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,88 %, sementara di pedesaan sudah mencapai dua digit yakni sebesar 13,20% (Taufiq, Prasetya and Mumtaz, 2020). Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa, terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan atau kesempatan ekonomi antara wilayah pedesaan dengan perkotaan, di mana masyarakat desa lebih rendah tingkat ekonominya dibandingkan masyarakat kota. Pedesaan yang identik dengan pertanian sebagian besar kehidupan petani berada dalam kondisi miskin atau terjebak dalam siklus kemiskinan.

Selain itu, kesenjangan ekonomi juga terjadi di wilayah pedesaan, kesenjangan yang timbul karena perbedaan akses terhadap sumberdaya ekonomi seperti lahan pertanian, modal, sarana dan prasarana produksi pertanian. Ada perbedaan yang besar antara petani yang memiliki lahan yang subur dan teknologi modern dengan petani yang memiliki lahan kecil dan kurang akses terhadap sumberdaya yang diperlukan. Tidak semua wilayah pedesaan memiliki potensi yang sama dalam hal kesuburan tanah, akses ke air irigasi, teknologi pertanian, dan pasar yang menguntungkan. Akibatnya, beberapa wilayah dapat lebih maju dalam produksi pertanian daripada yang lain.

Sumber kegiatan ekonomi pedesaan biasanya hanya bergantung pada sektor tertentu, seperti pertanian, perikanan atau industri tertentu. Jika terjadi ketidakstabilan dalam sektor tersebut, dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi ketika wilayah ini tidak memiliki sumber penghasilan alternatif atau tidak ada diversifikasi kegiatan ekonomi lainnya.

9.4.2 Ketenagakerjaan

Masalah utama lainnya yang saat ini menjadi keprihatinan adalah ketenagakerjaan di sektor pertanian. Banyak generasi muda yang tidak lagi tertarik bekerja di bidang pertanian, mereka meninggalkan pedesaan dan lebih suka untuk mencari pekerjaan di sektor lain di perkotaan, menimbulkan permasalahan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Di sisi lain, buruh pertanian seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak menguntungkan dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kurangnya perlindungan sosial.

Berdasarkan data BPS Tahun 2019, jumlah petani muda (pemuda tani) yang berusia kisaran 20-39 tahun hanya sebesar 8%, yaitu sebesar 2.700.00 jiwa dari 33.400.000 jumlah petani terdata. Data BPS lainnya menunjukkan, dalam kurun waktu hanya satu tahun, yaitu antara Tahun 2017-2018 telah terjadi

penurunan jumlah petani muda sebesar 415.789 orang (Pambudi *et al.*, 2022).

Petani usia muda adalah mereka yang mengadopsi teknologi baru, sebagaimana dari hasil penelitian menunjukkan usia petani yang menerapkan sistem tanam jajar paling banyak adalah usia muda antara 25 – 34 tahun (Adhi Alamsyah, Anggarawati and Eka Suwarnata, 2022). Jumlah petani muda yang cenderung menurun, membuat keprihatinan di masa depan bagi wilayah pedesaan, dan bila dibiarkan akan menimbulkan krisis regenerasi petani muda yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi pedesaan.

9.4.3 Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah

Dalam rangka mendorong pembangunan sektor pertanian, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah banyak memberikan bantuan-bantuan subsidi berupa pupuk, bibit dan alat-alat pertanian. Upaya ini dilakukan agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produksinya, namun hal ini membuat petani bergantung pada subsidi dan bantuan pemerintah untuk menjalankan usaha taninya. Kondisi ini lama kelamaan menciptakan ketergantungan yang tinggi pada kebijakan pemerintah dan membuat petani rentan terhadap perubahan kebijakan atau pengurangan bantuan.

Bila ada program yang diberikan Dinas Pertanian atau lembaga lainnya, tanpa disertai adanya bantuan atau subsidi, seringkali tidak berjalan dengan baik, atau mereka kembali pada pola tanam yang biasa mereka lakukan sebelumnya.

9.4.4 Akses terhadap Sumberdaya

Petani dengan tingkat pendidikan yang rendah dan penguasaan lahan yang sempit sering menghadapi kesulitan untuk dapat mengakses sumberdaya yang penting bagi pertanian seperti air irigasi, pupuk, dan benih yang berkualitas.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam mengembangkan usaha pertaniannya adalah keterbatasan modal dimiliki, penguasaan teknik budidaya belum maksimal dan ketiadaan sub unit bisnis pendukung (Prayoga, Wibaningwati and Anggarawati, 2022). Hal ini semua berkaitan dengan kemampuan petani atau kelompok tani dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan. Kurangnya akses ini dapat membatasi produktivitas mereka dan meningkatkan kesenjangan antara petani yang mampu dan yang kurang mampu.

9.4.5 Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor pertanian. Iklim yang berubah menciptakan tantangan baru bagi para petani, mempengaruhi produktivitas pertanian, keamanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Peningkatan suhu dapat menyebabkan stres panas pada tanaman dan ternak, menyebabkan penurunan produksi dan kualitas hasil pertanian. Beberapa tanaman mungkin juga mengalami perubahan pola pertumbuhan dan periode berbuah.

Perubahan iklim cenderung menyebabkan perubahan dalam pola curah hujan. Banjir atau kekeringan yang ekstrem dapat mengganggu penanaman, pemeliharaan, dan panen tanaman. Variabilitas curah hujan juga dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi dan kebutuhan lain dalam pertanian. Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan badai. Bencana-bencana ini dapat merusak tanaman dan infrastruktur pertanian, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani.

Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi pola hama dan penyakit yang menyerang tanaman dan ternak. Beberapa hama dan penyakit dapat berkembang biak lebih cepat atau menyebar ke wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau, mengancam hasil pertanian.

Petani sering harus menyesuaikan pola tanam mereka dengan perubahan iklim. Beberapa tanaman mungkin tidak lagi cocok tumbuh di daerah tertentu, sementara tanaman baru yang lebih tahan terhadap kondisi iklim baru mungkin diperkenalkan. Petani perlu menghadapi tantangan dalam mengadaptasi praktik pertanian mereka agar sesuai dengan kondisi iklim yang berubah.

9.4.6 Konflik Lahan

Konflik lahan di pedesaan sering kali berkaitan dengan pertanian, hutan, sumber air, dan sumber daya alam lainnya yang menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk desa yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, atau akses terhadap lahan dan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Persoalan kepemilikan lahan yang tidak jelas atau hak atas lahan yang tidak diakui secara hukum dapat menyebabkan konflik antara pemilik lahan, masyarakat adat, petani, dan pihak-pihak lain yang mengklaim hak atas lahan yang sama. Demikian juga persaingan penggunaan lahan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri, perumahan, atau konservasi dapat menyebabkan konflik antara pemilik lahan, petani, atau komunitas lokal dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengubah penggunaan lahan tersebut.

Persaingan untuk mengakses sumber daya alam seperti hutan, tambang, air, atau lahan pertanian yang subur dapat menyebabkan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam memperebutkan akses atau hak atas sumber daya tersebut.

Perselisihan terkait kepemilikan, penggunaan lahan dan akses terhadap lahan dan sumberdaya alam dapat menimbulkan konflik yang dapat mengakibatkan kehilangan lahan, pemaksaan, atau kerugian ekonomi bagi petani.

9.4.7 Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan bagi petani adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan keberlanjutan pertanian. Pendidikan dan pelatihan membantu petani untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim serta perkembangan teknologi di sektor pertanian.

Namun demikian, masih banyak petani tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan pertanian dan pengelolaan usahatannya. Beberapa masalah dalam mengakses pendidikan dan ketrampilan antara lain:

- a. Lokasi pertanian seringkali terpencil atau jauh dari pusat pendidikan dan pelatihan. Petani di daerah terpencil atau pedesaan sulit untuk mengakses program pendidikan dan pelatihan karena terbatasnya transportasi dan fasilitas infrastruktur.
- b. Beberapa program pendidikan dan pelatihan mungkin memerlukan biaya yang tinggi, seperti biaya pendaftaran, transportasi, dan akomodasi. Biaya ini dapat menjadi kendala bagi petani dengan sumber daya terbatas.
- c. Petani seringkali memiliki jadwal yang padat dan terikat oleh kegiatan pertanian yang harus dilakukan sesuai musim atau waktu tertentu. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
- d. Program pendidikan dan pelatihan memerlukan instruktur atau fasilitator yang berkualitas untuk menyampaikan materi dengan baik. Kurangnya jumlah dan kualitas instruktur bisa mengurangi efektivitas program tersebut.

- e. Kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah terhadap pendidikan dan pelatihan bagi petani menjadi kendala dalam menyediakan program-program yang relevan dan bermanfaat bagi para petani.

Rendahnya tingkat pendidikan petani ditambah dengan kurangnya pengetahuan teknis dan keterampilan yang bisa diakses petani dapat menghambat inovasi dan meningkatkan produktivitas.

9.4.8 Keberlanjutan Lingkungan

Pengembangan pertanian, terutama jika tidak dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, dapat memberikan ancaman serius bagi lingkungan. Beberapa ancaman utama dari pengembangan pertanian terhadap lingkungan antara lain:

- a. Penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian baru menyebabkan deforestasi, yang mengurangi luasnya hutan dan keanekaragaman hayati. Deforestasi juga menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies tumbuhan dan hewan, serta merusak ekosistem alami.
- b. Praktik pertanian yang tidak tepat, seperti penggunaan metode tanam-tanam dengan tebang dan bakar, atau tanam-tanam dengan cara membuka hutan secara besar-besaran, dapat menyebabkan erosi tanah yang parah. Erosi tanah mengurangi kesuburan tanah, menyebabkan kehilangan lapisan atas tanah yang mengandung hara, dan mengakibatkan sedimentasi di perairan
- c. Penggunaan pestisida, insektisida, dan pupuk kimia dalam pertanian dapat menyebabkan pencemaran air. Bahan kimia tersebut dapat terbawa oleh aliran air ke sungai, danau, atau sumber air lainnya, mengancam kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan.
- d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah. Akibatnya, tanah menjadi kurang subur dan memerlukan dosis yang lebih

tinggi dari bahan kimia tersebut untuk mempertahankan produktivitas.

- e. Penerapan monokultur atau praktik pertanian intensif seringkali mengurangi keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengurangi ketahanan ekosistem terhadap perubahan lingkungan dan penyakit.
- f. Pengembangan pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menjadi kontributor utama pemanasan global melalui emisi gas rumah kaca, seperti metana dari peternakan atau karbon dioksida dari pembakaran hutan.

Perlindungan lingkungan dalam pertanian menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari sektor pertanian itu sendiri.

9.5 Dampak Masalah Sosial

Beberapa masalah sosial yang telah diuraikan sebelumnya, dapat memberi pengaruh terhadap lingkungan sosial, bisa pengaruh negatif maupun juga pengaruh positif.

9.5.1 Dampak Positif

Beberapa dampak positif dari masalah sosial yang ada di pedesaan antara lain:

- a. Layanan dasar pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan berdampak pada produktivitas dan ketahanan masyarakat pedesaan.
- b. Kemiskinan dan kurangnya diversifikasi usaha, mendorong masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, membuka peluang kerja baru, membantu

mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c. Upaya menciptakan nilai tambah melalui pengembangan potensi ekonomi lokal yang berbasis komoditas unggulan dengan mengembangkan sistem agribisnis dari hulu sampai hilir untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan.
- d. Keberhasilan program pembangunan ekonomi membutuhkan partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat, melalui penguatan komunitas, semangat gotong royong, dan pemecahan masalah bersama.
- e. Tumbuhnya kesadaran dan perlindungan lingkungan yang lebih baik dengan menerapkan langkah-langkah konservasi alam untuk memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan melindungi ekosistem.
- f. Kesenjangan gender untuk mendapatkan akses yang sama di bidang pendidikan, kesehatan dan peluang usaha sebagai upaya pemberdayaan perempuan pedesaan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Peningkatan pendidikan berarti peningkatan kualitas bagi generasi mendatang yang lebih baik.

9.5.2 Dampak Negatif

Masalah sosial bisa memberikan dampak negatif dalam masyarakat, berikut contoh masalah sosial di pedesaan:

- a. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, dan pendidikan. Hal ini menghambat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Akses terbatas terhadap layanan kesehatan, sanitasi yang buruk, dan gizi yang buruk, kematian bayi yang tinggi, penyebaran penyakit menular, dan masalah kesehatan

kronis dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius di pedesaan.

- c. Ketidaksetaraan pendidikan dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka
- d. Kurangnya lapangan kerja dan peluang ekonomi yang terbatas dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi di pedesaan, hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan ketergantungan pada pertanian atau sektor informal.
- e. Migrasi penduduk dari desa ke kota untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, dapat menyebabkan depopulasi pedesaan dan mengganggu struktur sosial tradisional.
- f. Deforestasi, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, dan penggunaan energi fosil berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan dampak negatif pada pertanian dan sumberdaya alam di pedesaan.
- g. Ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya dapat menyebabkan konflik sosial di pedesaan, konflik ini dapat mengganggu perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.
- h. Penebangan hutan, penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan penurunan kualitas tanah dan air.

Upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, organisasi nirlaba, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi masalah sosial di pedesaan dan mengurangi dampak negatifnya. Penanganan masalah sosial harus melibatkan pendekatan yang berkelanjutan, partisipatif, dan menyeluruh untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Alamsyah, A., Anggarawati, S. and Eka Suwarnata, A. A. (2022) 'Feasibility of rice farming jagar legowo planting system in Dramaga, Ciomas, and Tamansari Sub-District, Bogor Regency', *E3S Web of Conferences*, 361. doi: 10.1051/e3sconf/202236102019.
- Bennett, K. J., Bankole, O. and Probst, J. C. (2008) 'Health Disparities : A Rural – Urban Chartbook', *Rural Health Research & Policy Center*, pp. 1–112. Available at: [http://rhr.sph.sc.edu/report/\(7-3\) Health Disparities A Rural Urban Chartbook - Distribution Copy.pdf](http://rhr.sph.sc.edu/report/(7-3) Health Disparities A Rural Urban Chartbook - Distribution Copy.pdf).
- Gillin, J. L. and Gillin, J. P. (1954) *CULTURAL SOCIOLOGY (A revision of An Introduction to Sociology)*. New York: The Macmillan Company.
- Pambudi, A. *et al.* (2022) *Penulis : Ekonomi Pertanian GET PRESS*. 1st edn. Edited by M. Sari. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. Available at: www.globaleksekutifteknologi.co.id.
- Pincus, A. and Minahan, A. (1980) *Social Work Practice: Model and Method*. Los Angeles: F.E. Peacock Publishers.
- Prayoga, R., Wibaningwati, D. B. and Anggarawati, S. (2022) 'Strategi Pemasaran Produk Sayuran Pada Kelompok Wanita Tani di Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor', *Agrisintech (Journal of Agribusiness and Agrotechnology)*, 2(2), p. 67. doi: 10.31938/agrisintech.v2i2.352.
- Rubington, E. and Weinberg, M. (2010) *The Study of Social Problems*. Seventh. Edited by E. Rubington and M. Weinberg. Oxford: Oxford University Press. Available at: <https://global.oup.com/ushe/product/the-study-of-social-problems-9780199731879?cc=id&lang=en&>.

- Soekanto, S. (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar oleh Soejarno Soekanto*. 4th edn. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Available at: https://epdfx.com/queue/sosiologi-suatu-pengantar-oleh-soerjono-soekanto_59b7187108bbc56516ffde9a_pdf?queue_id=59b7187f08bbc5c14fffdea0.
- Taufiq, N., Prasetya, A. A. and Mumtaz, T. (2020) *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. 04340.2002. Edited by N. Sahrizal, N. Taufiq, and Masfufah. Jakarta: BPS. doi: 04340.2002.

BIODATA PENULIS



Amruddin

Dosen Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar

Penulis lahir, bersekolah di Makassar. Penulis merupakan dosen tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan 2014-2018 menjadi ketua program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Penulis menyelesaikan S1 di Fakultas Peternakan UNHAS, S2 di UNM Program Studi Sosiologi dan UIM Program Studi Agribisnis serta menyelesaikan S3 April 2021 di UNM Program Ilmu Sosiologi. Penulis suka menulis, buku pertama yang diterbitkan adalah Kota Tanpa Maksiat (1995). Beberapa buku kolaborasi diterbitkan 8 penerbit diantaranya diterbitkan oleh Global Eksekutif Teknologi adalah Pengantar Manajemen, Manajemen SDM di Era Society 5.0, Pertanian Organik, Pengantar Agroindustri, Dasar-Dasar Bisnis, Metodologi Penelitian Manajemen, Pemberdayaan Masyarakat, Manajemen Produksi Ternak dan Sosiologi Pertanian. Sehari-hari mengajar matakuliah, Modal Sosial Pertanian, Manajemen Agribisnis, Agribisnis Peternakan serta Sosiologi Pertanian

BIODATA PENULIS



Ir. Roosganda Elizabeth, M.Si., MS.PNLP.
BRIN

Google Scholar : roosimanru@yahoo.com ; roosimanru@gmail.com
Orcid : 0000-0003-4937-9739
SCOPUS ID : 57218892768
SINTA ID : 6671403

Penulis, berkarya nyata sebagai fungsionalis peneliti ASN – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bidang Pemberdayaan dan Inovasi Kompetensi SDM, Kelembagaan, Sosial Ekonomi Manajemen Bisnis dan Agribisnis, Ekonomi Khusus, Kerakyatan dan Kreatif, Pengabdian Masyarakat, Founder Start Up, Dewan Komisaris Perkebunan Swasta Nasional, Mitra Bestari, Reviewer, dan Editor anggota Tim Dewan Redaksi dan Editorial Board beberapa publikasi dan jurnal. Aktif menulis karya tulis ilmiah (KTI) di berbagai publikasi nasional dan internasional; berkarya nyata sebagai fungsionalis dan pengurus aktif di beberapa organisasi dan profesi ilmiah. Ber-orientasi sektor publik dengan menyelaraskan keberpihakan dan pendampingan. Pembimbing Mahasiswa agar mampu menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, desertasi berkualitas dan sempurna agar segera mampu memanfaatkan keilmuannya di masyarakat dan lingkungan luas dengan kompetensi, qualified, bernilai jual tinggi dan

bertanggungjawab serta ber-ahlak, ber-attitude, menjunjung tinggi dan komit melaksanakan etika dan norma empati, simpati dan toleransi dalam bermasyarakat yang majemuk dan beragam, untuk dan supaya mampu menuliskan, mendiseminasikan, mensosialisasikan dan menyebarluaskan hasil karya nyata mereka kepada masyarakat luas (nasional dan internasional) melalui karya tulis ilmiah, artikel, deskripsi dan statement ilmiah dan populer yang kompeten, bertanggungjawab, bermanfaat tinggi dan luas.

BIODATA PENULIS



Faidah Azuz

Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Bosowa Makassar

Faidah lahir di Ambon tanggal 15 Maret 1965. Penulis adalah Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bosowa Makassar. Telah menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Pattimura, dan melanjutkan S2 bidang Kependudukan dan S3 Jurusan Sosiologi. Pendidikan S2 dan S3 diselesaikan pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penulis menekuni bidang sosiologi pedesaan.

BIODATA PENULIS



Dr.Ir. Talitha Wenifrida Massenga, M.Si

Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Indonesia -
Manado

Penulis lahir di Tonasa – Pangkajene Kepulauan- Sulawesi Selatan tanggal 2 September 1965. Penulis adalah dosen Dpk pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Indonesia-Manado. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian di Universitas Hasanuddin dan melanjutkan S2 pada Jurusan Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor dan melanjutkan Pendidikan S3 Program Studi Ilmu Lingkungan di Universitas Brawijaya – Malang.

BIODATA PENULIS



Herlyna Novasari Siahaan, S.P., M.Sc

Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan
Kehutanan Universitas Satya Terra Bhinneka

Penulis lahir di Kabupaten Labuhanbatu, 23 November 1995. Penulis adalah Dosen tetap Program Studi Agribisnis Universitas Satya Terra Bhinneka. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Agribisnis Universitas Bengkulu dan melanjutkan S2 pada jurusan Magister Manajemen Agribisnis Universitas Gadjah Mada. Sebagai seorang Dosen, penulis menyadari untuk berpartisipasi aktif dalam tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengalaman di bidang riset, penulis sebagai anggota tim Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023.

Pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat, Penulis pernah menjadi tenaga Pendamping Lapangan Program APBN-P Kementerian Pertanian di tahun 2017 dengan tugas mendampingi kelompok tani untuk melakukan penanaman kedelai di lahan perkebunan yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu juga penulis sebagai tenaga pendamping koperasi Modern Program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022-2023. Di tahun 2022, tugas pendampingan kepada koperasi produsen yang memproduksi Buncis dan melakukan ekspor ke Singapura di Kabupaten Purbalingga Jawa

Tengah, sedangkan pada tahun 2023 tugas pendampingan kepada koperasi pemasaran yang memproduksi minyak makan merah di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara. Penulis dapat dihubungi melalui email:
herlynanovasarisiahaan@satyaterabhinneka.ac.id

BIODATA PENULIS

Lili Winarti, S.P., M.P.

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Darwan Ali

Penulis lahir di Kuala Pembuang tanggal, 14 Maret 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Darwan Ali. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian ULM Banjarbaru Tahun 2007 dan memperoleh gelar Magister Pertanian (S2) pada Program Ekonomi Pertanian ULM banjarbaru Tahun 2011. Spesialisasi mata kuliah yang diajarkan Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Kemitraan Agribisnis, Studi kelayakan Agribisnis, Manajemen Agribisnis, dan Ilmu Usahatani.

BIODATA PENULIS



Abdi Suprayitno, S.T., M.Eng

Dosen Program Studi Teknik Perminyakan
Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan

Penulis lahir di Balikpapan tanggal 10 September 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Perminyakan Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan S2 pada Program Studi Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada.

Riset yang ditekuni saat ini adalah berkaitan dengan Mitigasi Bencana Geologi dan Airtanah. Selain Tridharma juga berkegiatan di komunitas wakaf produktif dan wirausaha. Terimakasih. Korespondensi dapat ke email abdi.sttmigas@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Hj. Marhawati, M. Si.

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar

Penulis Lahir di Birengere, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Juli 1963. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di kampung halamannya SDN Tonasa tahun 1975. Melanjutkan Pendidikan SMP Muhammadiyah di kota Ujung Pandang tahun 1979. Setelah tamat SMA NEGERI I Ujung Pandang tahun 1982, penulis melanjutkan studi S1 di Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (Ir) tahun 1987. Menyelesaikan S2 Program Studi Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (M.Si) tahun 1997. Selanjutnya penulis melanjutkan S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dan meraih gelar (Dr) tahun 2019. Sejak tahun 1989 sampai 2010 penulis mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian hijrah ke Universitas Negeri Makassar tahun 2011, sampai saat ini penulis menjadi dosen tetap di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Beberapa buku telah dihasilkan baik berupa buku referensi, monograf maupun book chapter dan telah memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Sebagai peneliti, telah menghasilkan beberapa artikel yang terbit pada jurnal dan prosiding baik skala nasional maupun Internasional.

BIODATA PENULIS



Ir. Sari Anggarawati, M.Si.

Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Bangsa

Penulis lahir di Bangkalan tanggal 6 April 1965. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Bangsa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Agribisnis-Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Nusa Bangsa. Penulis menekuni bidang Agribisnis, mengajar mata kuliah Ekonomi Pertanian, Manajemen Agribisnis, Ilmu Usahatani, Dasar-dasar Agribisnis, Komunikasi dan Perilaku Konsumen, *Urbang Farming* serta Agrowisata.

Penulis juga aktif sebagai tenaga ahli di beberapa konsultan swasta maupun BUMN (Sucofindo dan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan lain-lain. Penulis memiliki pengalaman sebagai auditor untuk penilaian Pengelolaan Hutan Lestari dan Auditor Lingkungan. Penulis juga menjadi salah satu penulis di *book chapter* Paradigma Agribisnis, Pengantar Ilmu Pertanian, Perilaku Konsumen, Ekonomi Pertanian, Kepariwisata, Perencanaan Agribisnis Pertanian Berkelanjutan, Dasar-dasar Agrobisnis dan Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian.